



LAPORAN KINERJA BKKBN 2018

LUAR
AN KELUARGA
2018

ntas S... am... B
ualitas... er Day... us

13-14 FEBRU

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



www.bkkbn.go.id

LAPORAN KINERJA BKKBN 2018

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



Sambutan Sekretaris Utama

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengemban amanah untuk melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Menyelenggarakan Keluarga Berencana dalam rangka Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2018. Laporan ini merupakan wujud komitmen BKKBN dalam melaksanakan amanat yang diterima oleh sesuai Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Oleh karena itu, setiap tahun BKKBN berkewajiban untuk menyampaikan secara akuntabel dan transparan kepada publik dan pemangku kepentingan atas kinerjanya dalam melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana guna mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas.

Penyusunan laporan kinerja BKKBN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta penjabarannya dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar laporan kinerja ini menyampaikan informasi tentang capaian kinerja BKKBN berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta targetnya yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, berbagai rencana kinerja dan pencapaian atas rencana kinerja tersebut, realisasi anggaran, upaya lain guna mengatasi hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan capaian kinerja, serta rumusan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Ukuran kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan ditandatangani setiap awal tahun anggaran merupakan acuan dan komitmen pimpinan BKKBN secara menyeluruh untuk mencapai kinerja secara maksimal. Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan bahan evaluasi dalam membuat laporan kinerja pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja ini juga dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan program dan anggaran, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN, baik Kementerian/Lembaga, Komisi IX DPR-RI, Badan Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Organisasi Profesi, Swasta, LSM, Lembaga donor internasional, serta masyarakat luas yang telah mendukung tugas dan fungsi BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia sehingga berkontribusi nyata dalam pencapaian kinerja BKKBN pada tahun 2018. Kami sangat berharap Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN serta menjadi bahan evaluasi pengelolaan kinerja guna mendorong peningkatan akuntabilitas BKKBN di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Sekretaris Utama BKKBN


Nofrijal



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

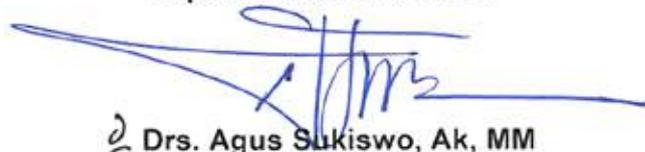
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2019

Inspektur Utama BKKBN


Drs. Agus Sukiswo, Ak, MM

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tentang BKKBN	2
C. Tugas, Fungsi dan Wewenang	3
D. Penerima Manfaat	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sumber Daya	6
G. Permasalahan, Tantangan dan Peluang	9
H. Isu Strategi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja BKKBN	30
B. Realisasi Anggaran	97
C. Kinerja dan Capaian Lain	98
D. Evaluasi Kinerja	112
BAB IV PENUTUP	117
Lampiran	156

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penerima Manfaat BKKBN	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi BKKBN	4
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai BKKBN per Desember 2018 Menurut Jenis Kelamin	6
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai BKKBN per Desember 2018 Menurut Jenis Jabatan	6
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai BKKBN per Desember 2018 Menurut Jenis Jabatan Fungsional Tertentu	7
Gambar 1.6	Jumlah Pegawai BKKBN per Desember 2018 Menurut Jenis Jabatan Fungsional Umum	7
Gambar 1.7	Jumlah Pegawai BKKBN per Desember 2018 Menurut Umur	8
Gambar 1.8	Jumlah Pegawai BKKBN per Desember 2018 Menurut Golongan	8
Gambar 2.1	Pohon Kinerja	19
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja BKKBN Tahun 2018	20
Gambar 2.3	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	22
Gambar 2.4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)	24
Gambar 2.5	Pelaksanaan RAKORNIS Kemitraan BKKBN Tahun 2018.....	25
Gambar 2.6	Peta Strategi BKKBN	26
Gambar 2.7	Aplikasi QPR	28
Gambar 2.8	Aplikasi SMART	28
Gambar 3.1	Kerangka Analisis Faktor –Faktor yang mempengaruhi fertilitas	30

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pagu Anggaran BKKBN Per Program TA 2018.....	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan BKKBN	14
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama BKKBN.....	16
Tabel 2.3	Output Prioritas BKKBN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018	18
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Kinerja	30
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2018	31
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 tahun) Tahun 2018	32
Tabel 3.4	Indikator Sosial Ekonomi	33
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian TFR Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	33
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian TFR Tahun 2018 dengan Akhir tahun RPJMN 2015-2019	34
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2018	34
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2018 Dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	36
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2018 Dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	36
Tabel 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (unmet need) Tahun 2018	37
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Unmet need Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	38
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Unmet need Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	38
Tabel 3.13	Persentase Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2018	39
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	40
Tabel 3.15	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	40
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2018	41

Tabel 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	42
Tabel 3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Pemakaian Kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	42
Tabel 3.19	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2018	42
Tabel 3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Peserta KB Baru (PB) Tahun 2018	44
Tabel 3.21	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Peserta KB Baru (PB) Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	44
Tabel 3.22	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Peserta KB Baru (PB) Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	45
Tabel 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15 – 19 Tahun pada Tahun 2018	47
Tabel 3.24	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15 – 19 Tahun Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017.....	47
Tabel 3.25	Perbandingan Target dan Realisasi <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15 – 19 Tahun Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	47
Tabel 3.26	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Tahun 2018	48
Tabel 3.27	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	49
Tabel 3.28	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	50
Tabel 3.29	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga yang memiliki Pemahaman dan Kesadaran tentang Fungsi Keluarga Tahun 2018	50
Tabel 3.30	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Keluarga yang memiliki Pemahaman dan Kesadaran tentang Fungsi Keluarga Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	51
Tabel 3.31	Persentase Keluarga Menurut Pengetahuan Minimal Dua Nilai di Masing-masing Fungsi dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	51
Tabel 3.32	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga yang memiliki Pemahaman dan Kesadaran tentang Fungsi Keluarga Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	52
Tabel 3.33	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Pencapaian Indeks Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2018	52
Tabel 3.34	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Pencapaian Indeks Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	54

Tabel 3.35	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015-2019	55
Tabel 3.36	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga Mengetahui Tentang Isu Kependudukan Tahun	55
Tabel 3.37	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga Mengetahui Tentang Isu Kependudukan Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	56
Tabel 3.38	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga Mengetahui Tentang Isu Kependudukan Tahun 2018 dengan Target RPJM Tahun 2019	57
Tabel 3.39	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018	57
Tabel 3.40	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	59
Tabel 3.41	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Peningatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, 2017.....	61
Tabel 3.42	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Peningatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional dengan Target Akhir Tahun RPJMN 2015-2019	62
Tabel 3.43	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018	63
Tabel 3.44	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	64
Tabel 3.45	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun RPJMN 2015 - 2019	64
Tabel 3.46	Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multirateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2018	65
Tabel 3.47	Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multirateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	65
Tabel 3.48	Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multirateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun RPJMN 2015 - 2019	66
Tabel 3.49	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional Tahun 2018	66
Tabel 3.50	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	68
Tabel 3.51	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional Tahun 2018 dengan Target Akhir Tahun RPJMN 2015 - 2019	68
Tabel 3.52	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap peserta yang mengikuti pendidikan jangka pendek di LN hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2018	69

Tabel 3.53	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS Dan Kependudukan KKBPK Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	69
Tabel 3.54	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2018	70
Tabel 3.55	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	70
Tabel 3.56	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019	71
Tabel 3.57	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan Di Provinsi Tahun 2018	71
Tabel 3.58	Perbandingan Target dan Realisasi pencapaian jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi Tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016, dan 2017	72
Tabel 3.59	Perbandingan Target Dan Realisasi Pencapaian Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan Di Provinsi Tahun 2018 Dengan Target Akhir Tahun RPJMN 2015 - 2019	72
Tabel 3.60	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018	72
Tabel 3.61	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016, dan 2017	73
Tabel 3.62	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018 dengan Target RPJMN Tahun 2019	73
Tabel 3.63	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018	74
Tabel 3.64	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016, dan 2017	75
Tabel 3.65	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018 dengan Target RPJMN Tahun 2019	75
Tabel 3.66	Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Opini Laporan Keuangan Oleh BPK Tahun 2018	76
Tabel 3.67	Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Opini Laporan Keuangan Oleh BPK Tahun 2018 Dengan Tahun 2015, 2016, Dan 2017	76
Tabel 3.68	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK Tahun 2018 Dengan Target RPJM Tahun 2019	76

Tabel 3.69	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja Tahun 2018	77
Tabel 3.70	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017.....	78
Tabel 3.71	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Peserta KB Baru (PB) Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019	78
Tabel 3.72	Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap)Tahun 2018	79
Tabel 3.73	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap)Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	79
Tabel 3.74	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap)Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019	80
Tabel 3.75	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun 2018	80
Tabel 3.76	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	81
Tabel 3.77	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019	81
Tabel 3.78	Perbandaingan Target dan Realisasi Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Tahun 2018	82
Tabel 3.79	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	83
Tabel 3.80	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Pencapaian Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019	83
Tabel 3.81	Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018	84
Tabel 3.82	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	84
Tabel 3.83	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019	85

Tabel 3.84	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2018	86
Tabel 3.85	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	86
Tabel 3.86	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2018 Dengan Target RPJM Tahun 2019	86
Tabel 3.87	Capaian Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional	87
Tabel 3.88	Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Tahun 2018	89
Tabel 3.89	Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Penguatan Advokasi Program KKBPK bagi Stakeholder dan Mitra Kerja	89
Tabel 3.90	Terlaksananya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di Faskes (DKI Jakarta)Tahun 2018	90
Tabel 3.91	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Tenaga Lini Lapangan yang meningkat kinerjanya Tahun 2018	91
Tabel 3.92	Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya penggerakkan Pelayanan KB MKJP Tahun 2018	91
Tabel 3.93	Perbandingan Target dan Realisasi Terlaksananya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di Faskes (Provinsi) Tahun 2018	92
Tabel 3.94	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Penggerakan Dan Pembinaan Program KKBPK Oleh PKB/PLKB Dan Sub PPKBD	93
Tabel 3.95	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB	94
Tabel 3.96	Analisis atas Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya	95
Tabel 3.97	Daftar Alokasi dan Realisasi Anggaran per Program	97
Tabel 3.98	Daftar Alokasi Anggaran dan Realisasi Proyek Prioritas Nasional	98
Tabel 3.99	Perbandingan Target dan Realisasi Presentase Capaian Kinerja 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang Berhasil Mencapai Target Tahun 2018	112
Tabel 3.100	Perbandingan Target dan Realisasi Presentase Capaian Kinerja 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang Belum Mencapai Target Tahun 2018	114

Berlandaskan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Dalam Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan tujuan BKKBN yaitu **“Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”**.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, BKKBN menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang sesuai dengan sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2015-2019, yaitu: (1). Menurunnya angka kelahiran total (*TFR*); (2). Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (*mCPR*); (3). Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*); (4) Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan (5) Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi.

Lebih lanjut, BKKBN melakukan penjabaran tugas dan fungsinya kedalam 4 (empat) besaran program sebagaimana dalam Renstra BKKBN 2015-2019, yaitu: (1). Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah; (2). Program Dukungan Manajemen, dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN; dan (4) Program Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis maupun program-programnya diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara keseluruhan, pada tahun 2018 telah ditetapkan 25 IKU pada level BKKBN *Wide* yang merupakan komitmen Pimpinan BKKBN. Lima IKU berasal dari sasaran strategis dan 20 IKU dari program. Kriteria IKU dikatakan berhasil dicapai apabila realisasinya mencapai 100% atau lebih, dan dinyatakan tidak berhasil apabila masih di bawah 100%.

Disamping itu, pada tahun 2018 BKKBN mendapat amanat untuk melaksanakan 11 (sebelas) Proyek Prioritas Bidang yang mendukung Prioritas Nasional (Pro-PN), yaitu: (1). Proyek pemenuhan ketersediaan alokon (DKI Jakarta), (2). Proyek pemenuhan ketersediaan alokon di faskes 32 provinsi, (3). Proyek penguatan komitmen & dukungan stakeholder Pusat-Prov-Kab/Kota, (4). Proyek penguatan pemahaman masyarakat tentang program KBPK, (5). Proyek peningkatan promosi pengasuhan 1000 HPK, (6). Proyek penggerakan pelayanan KB MKJP, (7). Peningkatan promosi dan penguatan Keluarga Lansia dan Lansia melalui BKL, (8). Penggerakkan mekanisme operasional lini lapangan, (9). Proyek peningkatan kinerja tenaga lini lapangan, (10). Proyek penguatan dan pengembangan Kampung KB, dan (11). Proyek pendidikan dan pelatihan internasional kependudukan dan KB dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan. Masing-masing proyek prioritas bidang tersebut memiliki satu indikator output yang harus dicapai, sehingga secara keseluruhan ada 11 indikator Pro-PN.

Hasil capaian kinerja BKKBN tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 5 sasaran strategis hanya 2 (dua) yang berhasil memenuhi target, yaitu Penurunan angka putus pakai dan Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP). Sedangkan 3 (tiga) sasaran strategis belum dapat memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan, yaitu Penurunan angka kelahiran total (*TFR*), Penggunaan kontrasepsi modern (*mCPR*), dan Penurunan *unmet need*. Apabila dilihat dari capaian program, maka dari 20 IKU yang ditetapkan ada 16 IKU yang mencapai target, dan 4 IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2018. Secara keseluruhan, dari 25 IKU yang ada, terdapat 18 IKU yang berhasil dicapai oleh BKKBN pada tahun 2018, atau sebesar 72%. Sedangkan untuk Pro-PN, ada 7 indikator yang dapat dicapai dari 11 indikator output Pro-PN 2018 yang telah ditetapkan.

Dukungan anggaran tahun 2018 untuk BKKBN sebagaimana yang tertuang dalam APBN adalah sebesar Rp 5.544.784.337.000,-. Selain dana APBN, pada tahun 2018 BKKBN juga mendapat tambahan dana

hibah dari dalam dan luar negeri, sebesar Rp. 29.377.827.204,-. Sehingga pagu akhir BKKBN pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 5.574.162.165.000. Namun demikian, kemampuan BKKBN dalam merealisasikan anggaran tahun 2018 masih rendah, yaitu hanya sebesar Rp 4.298.681.741.504,- (77,12%).

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran strategis, tahun 2018 BKKBN mendapat dukungan sumber daya penganggaran dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yaitu melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub-Bidang KB dan Bantuan Operasional Khusus KB (BOKB) yang ditransfer langsung ke Kabupaten dan Kota. Untuk DAK Fisik Sub-Bidang KB mendapat alokasi sebesar Rp. 525.590.296.000,- yang diperuntukkan bagi 479 Kabupaten dan Kota. Sedangkan untuk BOKB mendapat alokasi sebesar Rp. 1.808.787.200.000,- bagi 504 Kabupaten dan Kota.

Pengelolaan program dalam rangka mencapai kinerja tidak hanya dikejar melalui serangkaian pencapaian penetapan kinerja (*outcome/output*), tetapi juga melalui percepatan peningkatan kinerja manajerial untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan dinamis melakukan pembaharuan. Untuk itu organisasi secara internal melakukan pengelolaan reformasi birokrasi, penyempurnaan pengelolaan kinerja, meningkatkan pengelolaan barang dan jasa serta Barang Milik Negara (BMN), dan peningkatan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sehingga pencapaian kinerja tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk mencapai output ataupun penyerapan anggaran, tetapi juga merefleksikan efisiensi, akuntabilitas, dan terutama peningkatan manfaat untuk masyarakat.

Pada Tahun 2018, BKKBN berhasil prestasi/ penghargaan baik di tingkat Nasional maupun Internasional yaitu : 1) pemenang dalam PR Indonesia Award (PRIA) 2018 dalam kategori Media Cetak Internal; 2) BKKBN melanjutkan mempertahankan statusnya sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Tenis dan Diklat Fungsional untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Kependudukan dan KB dibawah lingkungan BKKBN dan lembaga diklat pemerintah lainnya; 3) penganugerahan Penghematan Energi dan Air tingkat Kementerian dan Lembaga oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta mendapatkan penghargaan dalam inovasi berupa lampu tenaga surya dan sistem pemanenan air hujan dan air AC sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penghematan energi listrik dan air; 4) *host pada Inter-Ministerial Conference on South-South and Triangular Cooperation: Emerging Population and Development Issues Influencing the 2030 Agenda*; 5) *host pada the South East Asia Biennial Conference on Population and Health*; 6) peringkat III pada *International Competition on South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Population and Development* yang diselenggarakan oleh UNFPA Headquarters; 7) BKKBN sebagai *Executive Director UNESCAP* di Bangkok Thailand sehingga aspirasi Indonesia di PBB khususnya Regional Asia Tenggara dapat lebih terwadahi; 8) BKKBN sebagai anggota *Partnership in Population and Development (PPD)* dimana Sekretaris Utama BKKBN berperan sebagai PCC; 9) *Chair* dari *International Council on Management of Population Programmes (I Comp)* untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; 10) BKKBN melakukan Proyek percontohan yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Malang (Jawa Timur), Lahat (Sumatera Selatan), and Aceh Barat (Aceh) untuk program *Bridging Leadership* sebagai salah satu program prioritas nasional pendidikan dan kerjasama Selatan-Selatan.

*Pada Tahun 2018,
BKKBN berhasil
mencapai prestasi/
penghargaan
baik di tingkat
Nasional maupun
Internasional*

BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang*
- B. Tentang BKKBN*
- C. Tugas, Fungsi dan Wewenang*
- D. Penerima Manfaat*
- E. Struktur Organisasi*
- F. Sumber Daya*
- G. Permasalahan, Tantangan dan Peluang*
- H. Isu Strategis*



Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang dipercayakan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), maka diperlukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti peraturan tersebut, maka BKKBN membuat Surat Sekretaris Utama Nomor 3678/RC.01/B1/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2018 kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN.

Implementasi akuntabilitas kinerja BKKBN diwujudkan melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang menyeluruh pada setiap tingkat unit kerja, yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN 2015-2019), Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2015-2019 dan Rencana Aksi Upaya Pencapaian Target/Sasaran RPJMN (dilengkapi dengan Renstra Unit Kerja Eselon I dan II), Perjanjian Kinerja BKKBN, pengukuran dan pengelolaan data kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) melalui sistem aplikasi *Quality Processes Result* (QPR) Metrics versi 15.1 serta pemantauan capaian program melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Selain itu, dalam pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP), BKKBN juga harus dapat memenuhi kaidah-kaidah *good governance* yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

B. TENTANG BKKBN

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, membawa dampak terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Peran dan fungsi BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Perubahan lingkungan strategis saat ini, terutama dalam pemerintahan periode 2015-2019, membawa dampak kepada perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, termasuk bagi BKKBN. selanjutnya, BKKBN merumuskan tujuan dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan yaitu "mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan perwujudan keluarga berkualitas".

C. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

BKKBN merupakan LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan lampiran huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional;
- b. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi;

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- e. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan.

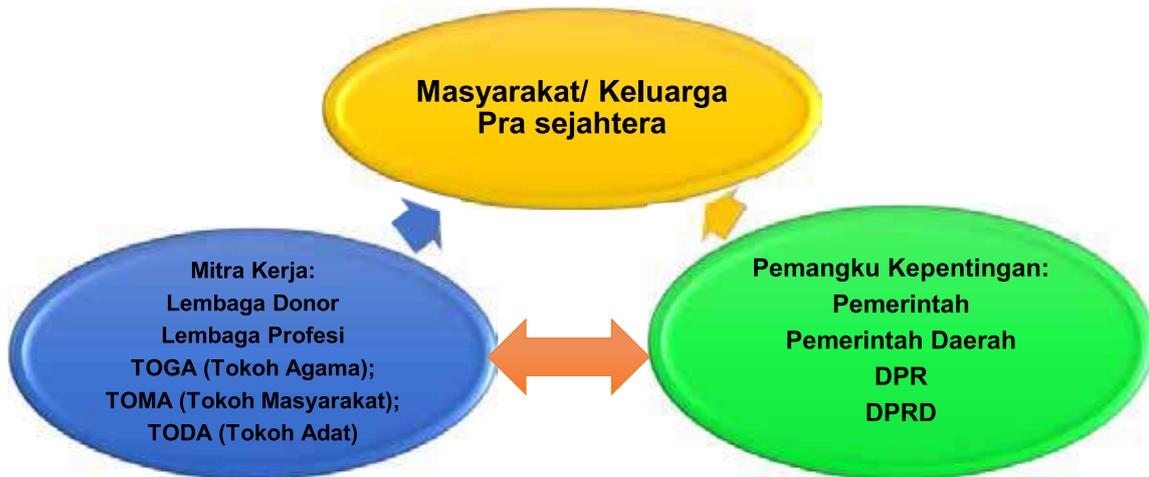
BKKBN merupakan LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian) yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Presiden.

D. PENERIMA MANFAAT

Sejalan dengan program dan kegiatan BKKBN, penerima manfaat terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Pemangku kepentingan, yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta DPR dan DPRD, menerima manfaat berupa tersedianya data basis kependudukan dan keluarga berencana, parameter kependudukan, dan integrasi program yang saling menguatkan;
- 2) Mitra kerja, terdiri dari organisasi profesi, keagamaan, pendidikan, Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, swasta, dan sebagainya, menerima manfaat berupa implementasi pelaksanaan program dan kegiatan Keluarga Berencana; dan
- 3) Masyarakat menerima manfaat berupa perubahan sikap dan perilaku terhadap Program KKBPK dan akses kualitas pelayanan Keluarga Berencana.

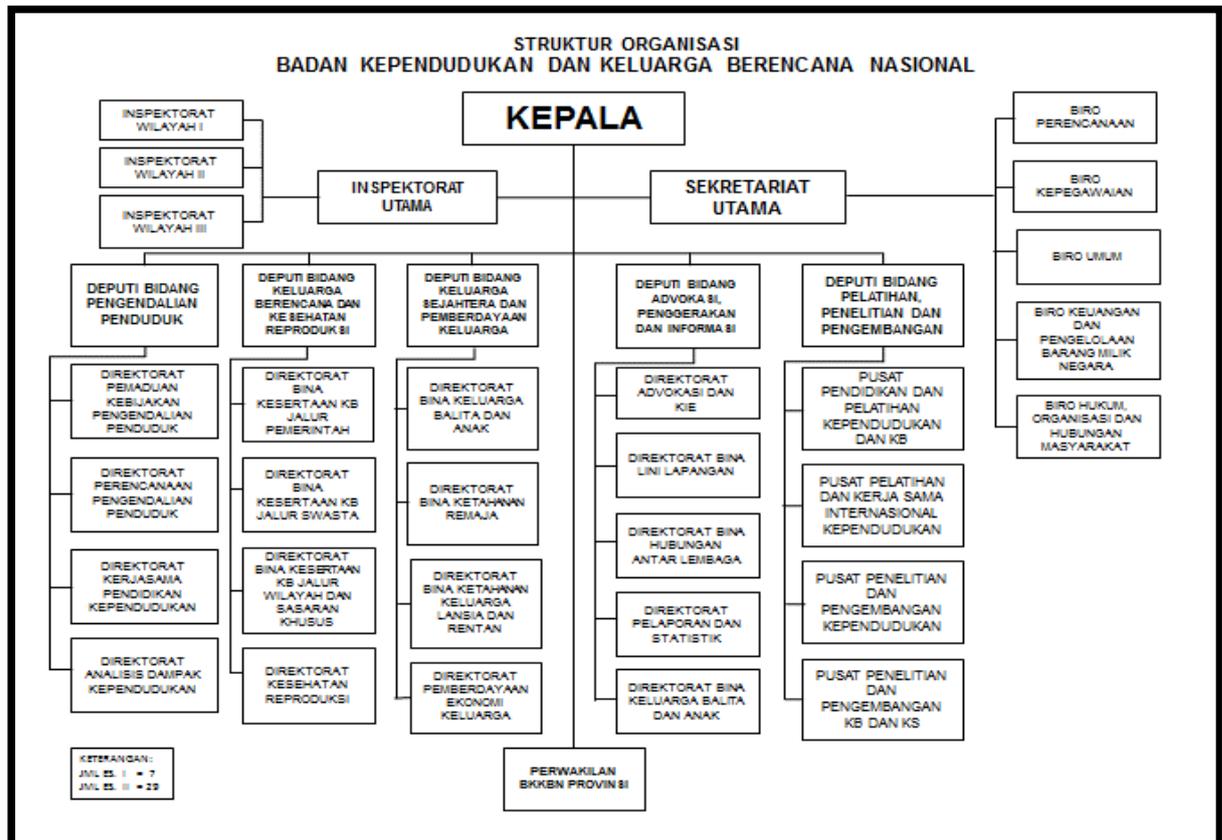
Gambar 1.1
Penerima Manfaat BKKBN



E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014, maka struktur organisasi BKKBN adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi BKKBN



Adapun penjabaran tugas masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PTM) beserta satuan kerja dibawahnya yaitu:



Sekretaris Utama

- Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN.
- Satuan Kerja yang dibawah: Biro Perencanaan; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum



Inspektoral Utama

- Tugas: Melakukan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.
- Satuan Kerja yang dibawah: Inspektoral Wilayah I; Inspektoral Wilayah II; Inspektoral Wilayah III



Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- Satuan Kerja yang dibawah: Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah; Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta; Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus; Direktorat Kesehatan Reproduksi.



Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

- Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- Satuan Kerja yang dibawah: Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak; Direktorat Bina Ketahanan Remaja; Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

- Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.
- Satuan Kerja yang dibawah: Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk; Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk; Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan; Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

- Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- Satuan Kerja yang dibawah: Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; Direktorat Bina Hubungan Antarlembaga; Direktorat Bina Lini Lapangan; Direktorat Pelaporan dan Statistik; Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi.



Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

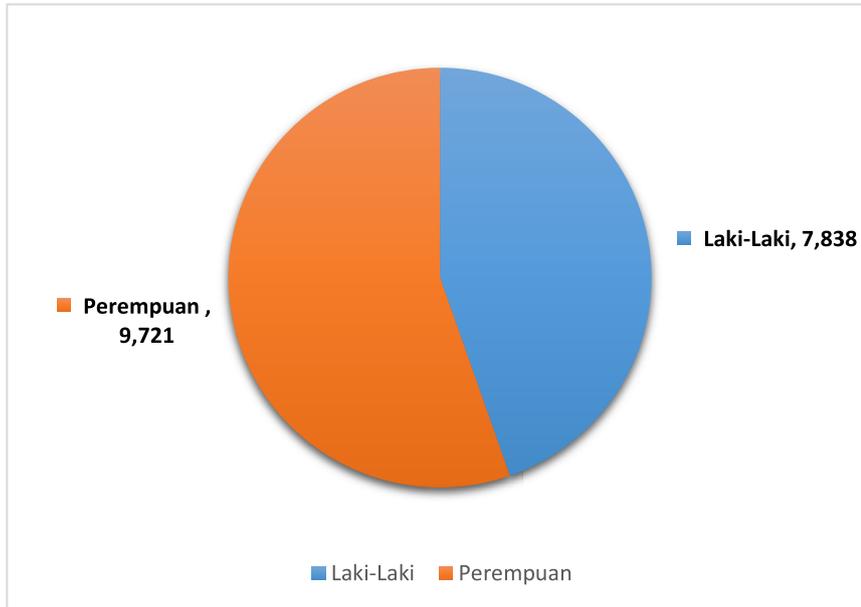
- Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- Satuan Kerja yang dibawah: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

F. SUMBER DAYA

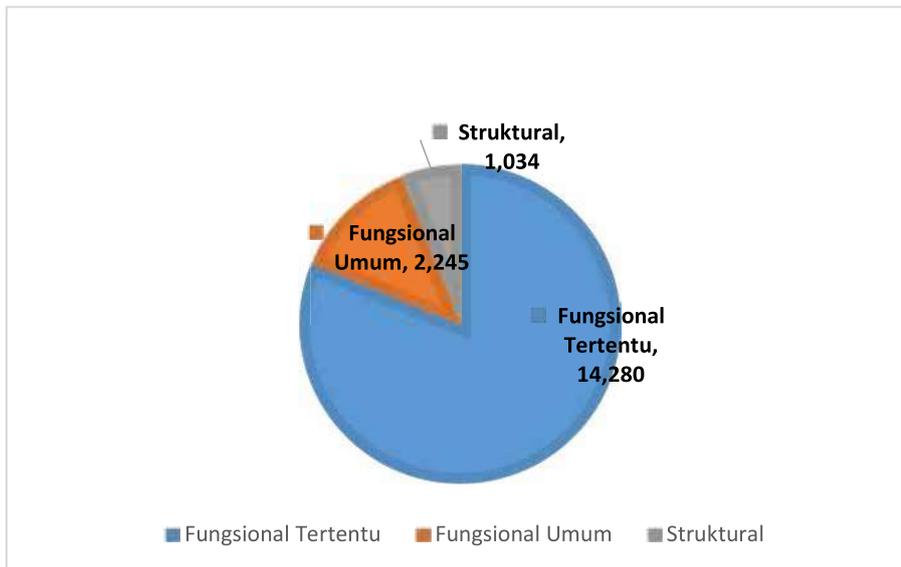
Sumber Daya Manusia (SDM);

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah SDM yang aktif di BKKBN adalah 17.559 orang. Berikut adalah profil demografi pegawai BKKBN:

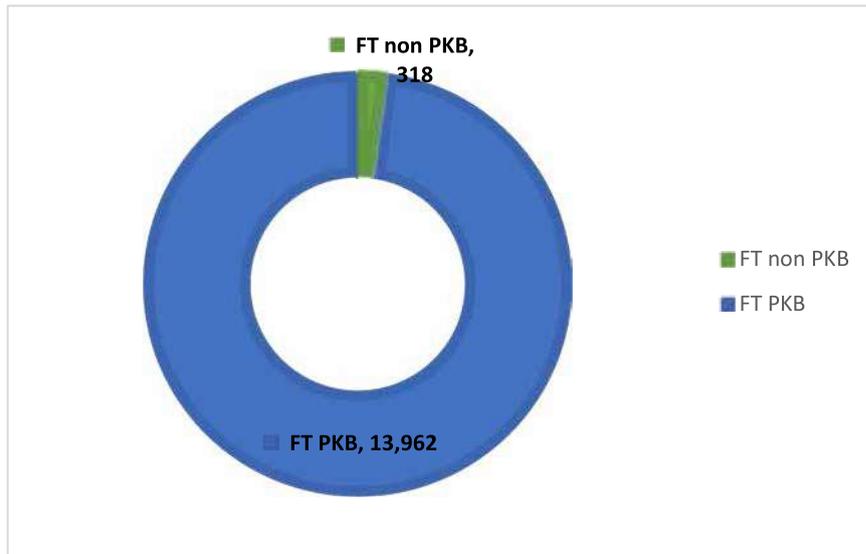
Gambar 1.3
Jumlah Pegawai BKKBN per Desember 2018 Menurut Jenis Kelamin



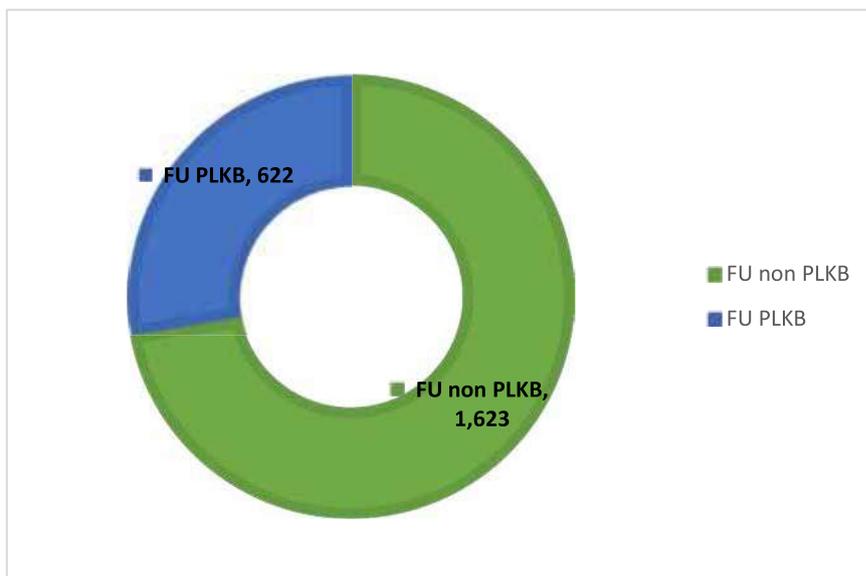
Gambar 1.4
Jumlah Pegawai BKKBN Per Desember 2018 Menurut Jenis Jabatan



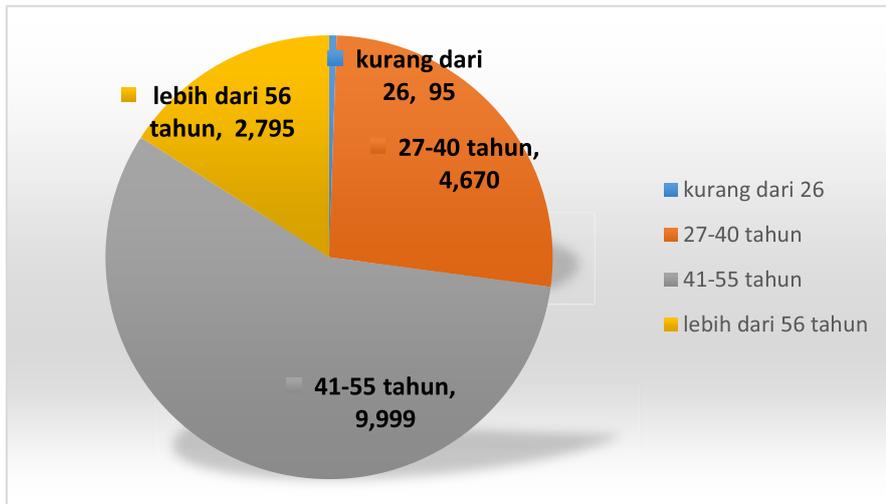
Gambar 1.5
Jumlah Pegawai BKKBN Per Desember 2018 Menurut Jenis Jabatan Fungsional Tertentu



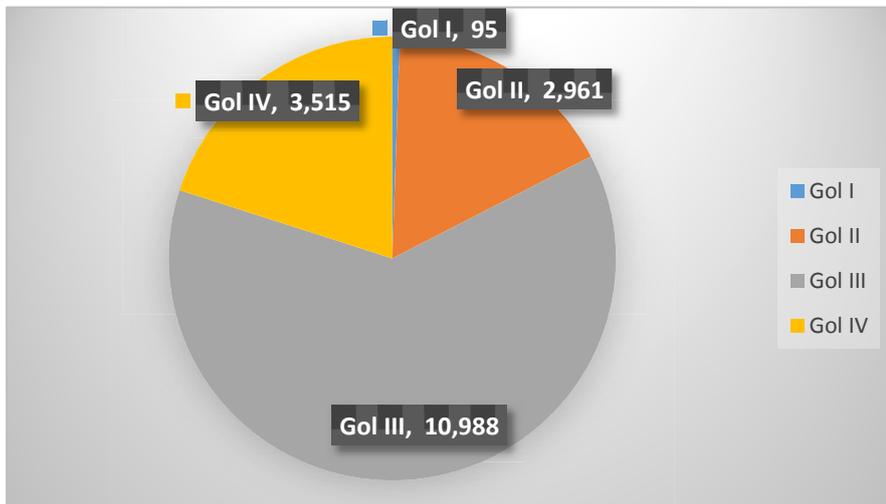
Gambar 1.6
Jumlah Pegawai BKKBN Per Desember 2018 Menurut Jenis Jabatan Fungsional Umum



Gambar 1.7
Jumlah Pegawai BKKBN Per Desember 2018 Menurut Umur



Gambar 1.8
Jumlah Pegawai BKKBN Per Desember 2018 Menurut Golongan



Sumber Daya Anggaran;

Pada tahun 2018, BKKBN memiliki sumber daya anggaran sebesar Rp.5,574,162,165,000,- terdiri dari:

Tabel 1.1
Pagu Anggaran BKKBN Per Program TA 2018

No.	Program	Pagu
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	Rp. 2,963,279,341,000,-
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Rp. 17,600,000,000,-
3	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Rp. 264,038,896,000,-
4	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Rp. 2,329,243,928,000,-
JUMLAH		Rp. 5,574,162,165,000,-

Dana tersebut diatas merupakan gabungan dari dana hibah dari dalam dan luar negeri sebesar Rp. 29.377.827.204,- sehingga pagu akhir BKKBN pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5,574,162,165,000,-.

Selain itu, terdapat juga dukungan alokasi anggaran dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bantuan Operasional KB (BOKB) bagi Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2018 DAK Sub Bidang KB (fisik) sebesar Rp 525.590.296.000,- dan BOKB sebesar Rp 1.808.787.200.000,-. Hal ini diharapkan dapat turut mendukung upaya pencapaian Program KKBPK di lini lapangan.

G. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG

Permasalahan dan tantangan

1. Belum maksimalnya pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di BKKBN yang terlihat dari pencapaian nilai reformasi birokrasi sebesar 68,65.
2. Dari sisi program, secara umum terdapat beberapa permasalahan diantaranya:
 - a. Kurangnya keterpaduan/sinkronisasi kebijakan dan program Pengendalian Penduduk lintas sektor dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan isu pengendalian penduduk.
 - c. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi belum menjadi program prioritas daerah sehingga pengelolaan program KBKR di lini lapangan belum memadai.
 - d. Ketersediaan wadah kegiatan Pembangunan Keluarga yang berbasis keluarga melalui poktan belum optimal pemanfaatannya.
 - e. Advokasi dan KIE untuk memasyarakatkan Program KKBPK belum mampu menjangkau sepenuhnya partisipasi dan peran serta masyarakat.
3. Dari sisi dukungan penganggaran Program KKBPK di Kabupaten dan Kota;
 - a. Masih rendahnya realisasi DAK dan BOKB.
 - b. Rendahnya dukungan APBD terhadap program KKBPK.
4. Kelembagaan Pemerintah Daerah urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang bervariasi dan digabung dengan berbagai urusan lainnya.
5. Dari sisi Sumber daya Manusia;
 - a. Jumlah PKB/PLKB sampai dengan Desember 2018 adalah 14.584 orang (data BIPEG). Dari jumlah tersebut telah mengikuti pelaksanaan sertifikasi, namun berdasarkan hasil sertifikasi masih ada sebanyak 7.844 PKB/PLKB berada pada kategori tindak lanjut pengembangan sehingga memerlukan intervensi pelatihan pada tahun berikutnya.
 - b. Terdapat 2 (dua) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang mengalami kekosongan sejak tahun 2017 sampai saat ini, yaitu Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.
 - c. Terdapat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong tahun 2018, pada 12 jabatan (7 jabatan di BKKBN Pusat dan 5 jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi), yaitu; 1) Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas, 2) Kepala Biro Umum, 3) Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, 4) Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, 5) Direktur Kesehatan Reproduksi, 6) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, 7) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, 8) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, 9) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, 10) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, 11)

- Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, dan 12) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Pada tahun 2018 ASN BKKBN yang purna tugas sebanyak 90 orang, sementara terdapat permasalahan lambatnya regenerasi untuk mengisi kekosongan tersebut, diantaranya disebabkan oleh adanya moratorium yang berpengaruh dari sisi kuantitas, serta belum terpenuhinya persyaratan administrasi pegawai yang tersedia untuk mengisi jabatan tinggi di lingkungan BKKBN.
6. Dari pengelolaan anggaran (termasuk pengadaan Barang/Jasa);
- a. Belum optimalnya pengadaan Barang dan Jasa, termasuk dalam pemenuhan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Implan di Provinsi, dan permasalahan dalam rehabilitasi sarana (Gedung);
 - b. Pengelolaan Anggaran, terutama terkait padaimplementasi kegiatan peningkatan kemitraan Program KKBPK melalui fasilitasi/pembinaan dan advokasi programoleh *stakeholders*/pemangku kepentingan dan mitra kerja baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam upaya mengatasinya, Pimpinan BKKBN menginstruksikan penundaan perjalanan dinas bagi seluruh pejabat di BKKBN sampai dengan kegiatan peningkatan kemitraan Program KKBPK tersebut dapat berjalan. Hal ini cukup mempengaruhi serapan anggaran di lingkungan BKKBN.

Peluang

1. Adanya sistem seleksi terbuka untuk Pejabat Pimpinan Tinggi.
2. Untuk provinsi yang tidak tayang e-katalog implan diperkenankan melakukan lelang umum.

H. ISU STRATEGIS

1. Kosongnya jabatan Pimpinan Tinggi BKKBN.
Terdapat 2 (dua) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang mengalami kekosongan sejak tahun 2017 sampai saat ini, dan 12 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong pada tahun 2018.
2. Tidak berjalannya pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog maupun lelang umum untuk implan di 7 provinsi.

Pembelian Alokon implan pada 14 Provinsi dilaksanakan melalui *e_purchasing* dengan e-katalog dan 8 Provinsi melalui lelang umum dan lelang cepat. 9 provinsi tidak melakukan pembelian alokon, dimana 3 Provinsi karena tidak dianggarkan (DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat), sedangkan 6 Provinsi dianggarkan tetapi tidak melakukan pembelian (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan). 1 Provinsi gagal lelang (Kepulauan Riau). Hal ini mempengaruhi ketersediaan alokon implan dan juga rendahnya realisasi anggaran.

3. Keterlambatan proses pelunasan pekerjaan jasa konstruksi fasade gedung Halim 2 BKKBN.

Pelaksanaan pekerjaan fasade (Alumunium Composite Panel) pada Kantor BKKBN Pusat yang berada di gedung 2 dengan anggaran Rp 6.154.610.000,- tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak dikarenakan faktor internal penyedia terlambat dalam mengajukan bank garansi sebesar 15 persen. Pada tanggal 31 Desember 2018, progress pekerjaan sebesar 85 persen sehingga diberikan

*Peluang
Adanya sistem
seleksi terbuka
untuk Pejabat
Pimpinan Tinggi*

kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan di tahun 2019 dan dianggarkan kembali oleh BKKBN pada tahun 2019 sebesar Rp 3.168.844.286,-.

4. Serapan anggaran untuk penggerakkan pelayanan KB MKJP dan pencabutan implan rendah yaitu sebesar Rp. 173.215.852.108,- dari Rp. 355.150.690.000,- (48,77%) dikarenakan adanya penyempurnaan peraturan dalam bentuk Surat Edaran terkait tata cara klaim sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK pada awal tahun 2018 yang menyebabkan beberapa provinsi menghentikan sementara kegiatan penggerakkan KB MKJP sampai dengan trimester II dan III.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

B. Perjanjian Kinerja



A. PERENCANAAN STRATEGIS

BKKBN memiliki peran strategis, khususnya pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang unggul dengan peningkatan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan.

BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi pembangunan 2015-2019 dengan perumusan tujuan untuk **"Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas"**. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu dan berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. BKKBN berkomitmen mewujudkan penduduk tumbuh seimbang sebagaimana yang diarahkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Indikator tujuan yaitu persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP).

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan BKKBN

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019
Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,21

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2015-2019 merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) periode 2015-2019.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, telah menetapkan lima sasaran strategis, yaitu:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

Untuk mencapai visi Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk, BKKBN sangat perlu memperhatikan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) sebagai salah sasaran strategis. Angka kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Melalui sasaran strategis ini, BKKBN memastikan membuat kegiatan-kegiatan strategis yang fokus pada pengendalian jumlah penduduk.

2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern

Sejak pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) pada awal tahun 1970-an, angka

"Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas".

kelahiran mengalami penurunan yang sangat berarti. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh keberhasilan peningkatan pemakaian alat dan obat kontrasepsi. Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara (*proximate determinant*) fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan. Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Melalui sasaran strategis ini, BKKBN berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsimodern guna mengendalikan angka kelahiran.

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Unmet need merupakan kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Bagi BKKBN, estimasi ukuran dan komposisi dari populasi wanita yang kebutuhan kontrasepsinya tidak terpenuhi berguna untuk menilai sejauh mana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui sasaran strategis ini, BKKBN bertekad menurunkan angka *unmet need*.

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam Program KKBPK untuk pengendalian fertilitas atau menekan pertumbuhan penduduk yang paling efektif. Dalam pelaksanaannya diupayakan agar semua metode kontrasepsi yang disediakan dan ditawarkan kepada masyarakat memberikan manfaat optimal dengan meminimalkan efek samping maupun keluhan yang ditimbulkan. Metode kontrasepsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan metoda kontrasepsi jangka pendek/non MKJP. Alat dan obat ini memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibanding non MKJP dalam hal pencegahan kehamilan.

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

BKKBN menetapkan sasaran strategis penurunan tingkat putus pakai yaitu untuk menjamin efektifitas penggunaan kontrasepsi dalam rangka mengendalikan tingkat angka kelahiran. Jumlah wanita yang menggunakan metode kontrasepsi pada waktu tertentu serta keberlangsungan pemakaian kontrasepsi berdampak terhadap efektifitas suatu metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana di Indonesia harus fokus dalam menjaga keberlangsungan pemakaian metode kontrasepsi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, maka BKKBN menetapkan lima arah kebijakan dan strategi pada Renstra 2015-2019, sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1

Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas

Arah Kebijakan 2

Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KKBPK

Arah Kebijakan 3

Peningkatan pembinaan ketahanan remaja

Arah Kebijakan 4

Peningkatan pembangunan keluarga

Arah Kebijakan 5

Penguatan regulasi, kelembagaan serta data dan informasi

Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut diatas, BKKBN memiliki 4 (empat) Program yaitu; 1) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP), 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN (DKM), 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN, dan 4) Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN (Lalitbang).

Kemudian untuk mempermudah dalam melihat alur implementasi dari tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan Program di lingkungan BKKBN (beserta target/sasaran Tahun Anggaran 2018), ditetapkan 25 ukuran kinerja yang dapat dipantau setiap tahun atau disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BKKBN

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019
	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG	1. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.31
			2. Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	61.1
			3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10.14
			4. Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	22.30
			5. Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25.0
I	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	6. Jumlah peserta KB baru/PB (juta)	7.39
			7. ASFR 15 – 19 tahun	40 per 1000 perempuan 15-19 tahun
			8. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019
			9. Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	40
			10. Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	52
			11. Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	48
			12. Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1
II	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK		
			13. Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program dan pengendalian penduduk dan KB	1
			14. Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP
			15. Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3
			16. Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	60% pengembangan SDM
			17. Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4
			18. Jumlah dukungan manajemen pengelolaan Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2019
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	19. Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	5% (dari satker yang diaudit eksternal)
			20. Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi	34 prov
IV	Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK	21. Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	90% SDM Aparatur
			22. Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	1
			23. Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3
			24. Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,3 (dari skala 1-4)
			25. Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi	34 prov

Kemudian dalam rangka turut mensukseskan program pembangunan pemerintah tahun 2018, BKKBN memiliki output prioritas yang mendukung proyek prioritas nasional:

Tabel 2.3
Output Prioritas BKKBN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Tahun 2018

No	Proyek Prioritas	Target
Pusat		
1.	Proyek pendidikan dan pelatihan internasional Kependudukan dan KB dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan	105 orang
2.	Proyek Penguatan Pemahaman Masyarakat tentang Program KKBPK	40 media
3.	Proyek peningkatan advokasi program KKBPK bagi stakeholder dan mitra kerja	421 stakeholder
4.	Proyek pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokasi di Fasilitas Kesehatan (DKI Jakarta)	546 Faskes
5.	Proyek Peningkatan Kinerja Tenaga Lini Lapangan	10.746 PKB/PLKB

No	Proyek Prioritas	Target
Perwakilan BKKBN Provinsi		
6.	Proyek Penggerakan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	1.829.788 Peserta KB
7.	Proyek pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di fasilitas kesehatan	19.427 Faskes
8.	Proyek peningkatan promosi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan	2.353.789 keluarga
9.	Peningkatan promosi dan penguatan keluarga lansia dan lansia melalui Bina Keluarga Lansia	1.467.662 keluarga
10.	Penggerakan mekanisme operasional	5 gerak/tahun
11.	Proyek penguatan dan pengembangan Kampung KB	6.727 Desa

B. PERJANJIAN KINERJA

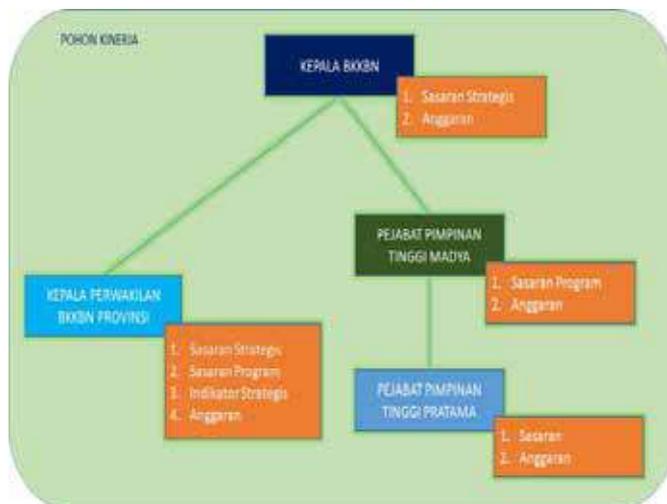
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil maka dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) BKKBN. PK merupakan penjabaran atas Renstra sehingga seluruh pelaksanaan BKKBN dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra.



Target Perjanjian Kinerja BKKBN tahun 2018 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019, serta dengan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang sudah ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja yang merupakan bentuk komitmen dan ditetapkan serta ditandatangani oleh Kepala BKKBN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dokumen tersebut mencakup: (1) penandatanganan Kontrak Kinerja Pusat dan Provinsi Tahun 2018; (2) Indikator Kinerja Utama dan target BKKBN Tahun 2018 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Gambar 2.1
Pohon Kinerja



Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja BKKBN Tahun 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Prihutomo

Jabatan : Pjt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2018
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional.
Pjt. Kepala,

Sigit Prihutomo



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,31
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)	2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	61,1
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,14
4	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4 Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP	22,3
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25,0

Program	Anggaran
1 Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Rp 2,299,866,100,000
2 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	Rp 2,963,061,741,000
3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional	Rp 264,256,496,000
4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Rp 17,600,000,000

Jakarta, Januari 2018

Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

Sigit Prihutomo

Untuk tahun anggaran 2018, penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan pada bulan Januari 2018. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Didalam peraturan tersebut ditekankan bahwa perjanjian kinerja harus disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Untuk itu penandatanganan perjanjian kinerja dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sehingga dilaksanakan setelah DIPA BKKBN tahun 2018 disahkan oleh kementerian keuangan dan diberikan kepada kepala BKKBN.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2018 Kepala BKKBN melakukan Perjanjian Kerja dengan seluruh Pejabat Tinggi Madya dan seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2018 Kepala BKKBN melakukan Perjanjian Kinerja dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Perjanjian kinerja yang dilakukan antara kepala BKKBN dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mencakup sasaran program, indikator kinerja, target, serta anggaran per kegiatan di lingkup kerja masing-masing Pimpinan Tinggi Madya dimaksud. Perjanjian kinerja yang dilakukan antara BKKBN dengan Kepala BKKBN Provinsi mencakup sasaran strategis, sasaran program, indikator strategis diluar renstra dengan masing-masing indikator kinerja dan target tahun 2018 serta anggaran dari kegiatan pengelolaan program KKBPK Provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melakukan perjanjian kinerja dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bidangnya masing-masing mencakup sasaran yang berkenaan, indikator kinerja (indikator kinerja RPJMN, kegiatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Renstra, dan strategis diluar renstra) serta anggaran dari kegiatan dimaksud.

Gambar 2.3
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2018



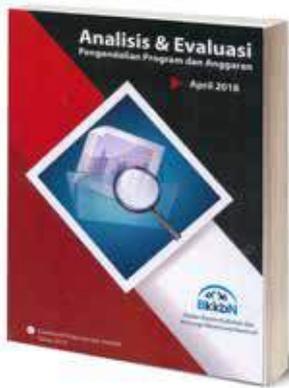
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Rencana aksi upaya pencapaian target/sasaran RPJMN dan Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 serta sebagai upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan didalamnya.

Rencana Aksi BKKBN 2015-2019 mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang tertera dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019. Di dalam Rencana Aksi Tahun 2015-2019 diuraikan



kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat diimplementasikan setiap tahunnya (dalam periode 2015-2019) sehingga tidak menyimpang dari program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra BKKBN Tahun 2015-2019.



Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana serta untuk mendukung tercapainya sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 201/Kep/B1/2016 tentang Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Keputusan Kepala BKKBN tersebut berlaku bagi unit kerja di lingkungan BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan alat ukur prestasi kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja dan Sasaran Kinerja.

Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan hal yang rutin dilakukan di lingkungan BKKBN untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK. Monitoring dan evaluasi kinerja Program KKBPK Tahun 2018 dilaksanakan setiap bulan melalui forum RADALGRAM (rapat pengendalian program) melalui fasilitasi *VICON (Video Conference)* yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN di pusat dan provinsi. Dalam Radalgram telah diintegrasikan informasi kinerja dan pelaksanaan anggaran sehingga pimpinan mendapatkan informasi tentang capaian kinerja dan keuangan secara berkala.

Unit kerja di lingkungan BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib melaporkan hasil pelaksanaan kinerja kepada Kepala BKKBN setiap bulannya sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi yang juga dilakukan terhadap variabel Perjanjian Kinerja baik pusat maupun provinsi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Monitoring perkembangan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi dilakukan melalui mekanisme RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program) serta termuat dalam:
 - a. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan. Sub sistem ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Program KKBPK Nasional dari daerah secara baku dan teratur di seluruh tanah air. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (bulanan), Pelayanan Kontrasepsi (bulanan). Laporan umpan balik disusun berdasarkan laporan bulanan yang dilaporkan secara rutin setiap bulan melalui program aplikasi Statistik Rutin berbasis web dengan alamat <http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr>.
 - b. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Wilayah Program KKBPK Nasional. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Wilayah (Semester) merupakan laporan umpan balik mengenai data potensi wilayah yang ada di seluruh Indonesia.



- c. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Klinik KB Program KKBPK Nasional. Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Faskes KB (Semester) merupakan laporan ulasan umpan balik mengenai data potensi faskes KB yang ada diseluruh Indonesia.



- d. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB pemerintah maupun swasta, serta Dokter/Bidan Praktek Swasta, sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
 - e. Survei Indikator Kinerja Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) adalah suatu survey tahunan yang bertujuan untuk mengetahui capaian indikator program KKBPK sesuai sasaran yang tertuang dalam Renstra dan RPJMN 2015-2019. Indikator program mencakup aspek kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan pembangunan keluarga
2. Evaluasi kinerja satuan unit kerja eselon II di tingkat pusat dilakukan dengan mengisi pencapaian kinerja dengan menggunakan aplikasi QPR BSC dilakukan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan di masing-masing unit kerja. Aspek yang dinilai meliputi 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard* yaitu perspektif pelanggan (*customers*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process*), perspektif pembelajaran dan pengembangan (*learning and growth*), dan perspektif keuangan (*financial*).
 - a. Nilai skor maksimal adalah 100 persen dari pencapaian tiap indikator;
 - b. Penentuan nilai setiap variabel ditunjukkan dengan warna hijau/kuning/merah, dengan *range* sebagai berikut:



B = Hijau → Jika Nilainya antara 90-100

C = Kuning → Jika Nilainya antara 70-89-99

K = Merah → Jika Nilainya kurang dari 70

Gambar 2.4
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)



Selain itu, BKKBN melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan program tahunan. Untuk mengetahui perkembangan pencapaian kegiatan tiap kedepuitan telah dikembangkan kegiatan monitoring melalui kegiatan Rapat Kedepuitan (Rapat di lingkungan

masing-masing Kedeputusan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Bidang Pengendalian Penduduk; Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi; Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan), Rasestama (Rapat di lingkungan Sekretariat Utama), Ratama (Rapat di lingkungan Inspektorat Utama) yang rutin dilaksanakan setiap bulan.

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan perubahan RENSTRA BKKBN 2015-2019 serta pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK, maka diperlukan dukungan, sinergitas dan komitmen dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja (organisasi profesi, organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, swasta) termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan, sehingga perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program KKBPK Tingkat Nasional Tahun 2018. Tujuan dari Rakornis adalah meningkatkan peran mitra kerja dalam penggarapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), khususnya di Kampung KB untuk mewujudkan SDM dan keluarga berkualitas.

Gambar 2.5
Pelaksanaan RAKORNIS Kemitraan BKKBN Tahun 2018



Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga mengamanatkan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL dan RKAKL. Para penanggung jawab program diwajibkan melakukan evaluasi atas program yang menjadi tanggungjawabnya. Secara paralel, *E-monev* yang dilaksanakan saat ini telah memuat informasi kinerja yang dibutuhkan sebagai masukan dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Planning and Budgeting*), serta lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi kegiatan/program terhadap pencapaian target prioritas nasional. Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, BKKBN telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran melalui aplikasi *e-Monev*. Pemantauan RKP dan *e-Monev* Kinerja Penganggaran pada unit kerja Eselon II yang evaluasinya dilakukan setiap triwulanan. Hasil evaluasi tersebut secara rutin diumpankan ke unit kerja Eselon II untuk kesinambungan sistem akuntabilitas kinerja BKKBN.

Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

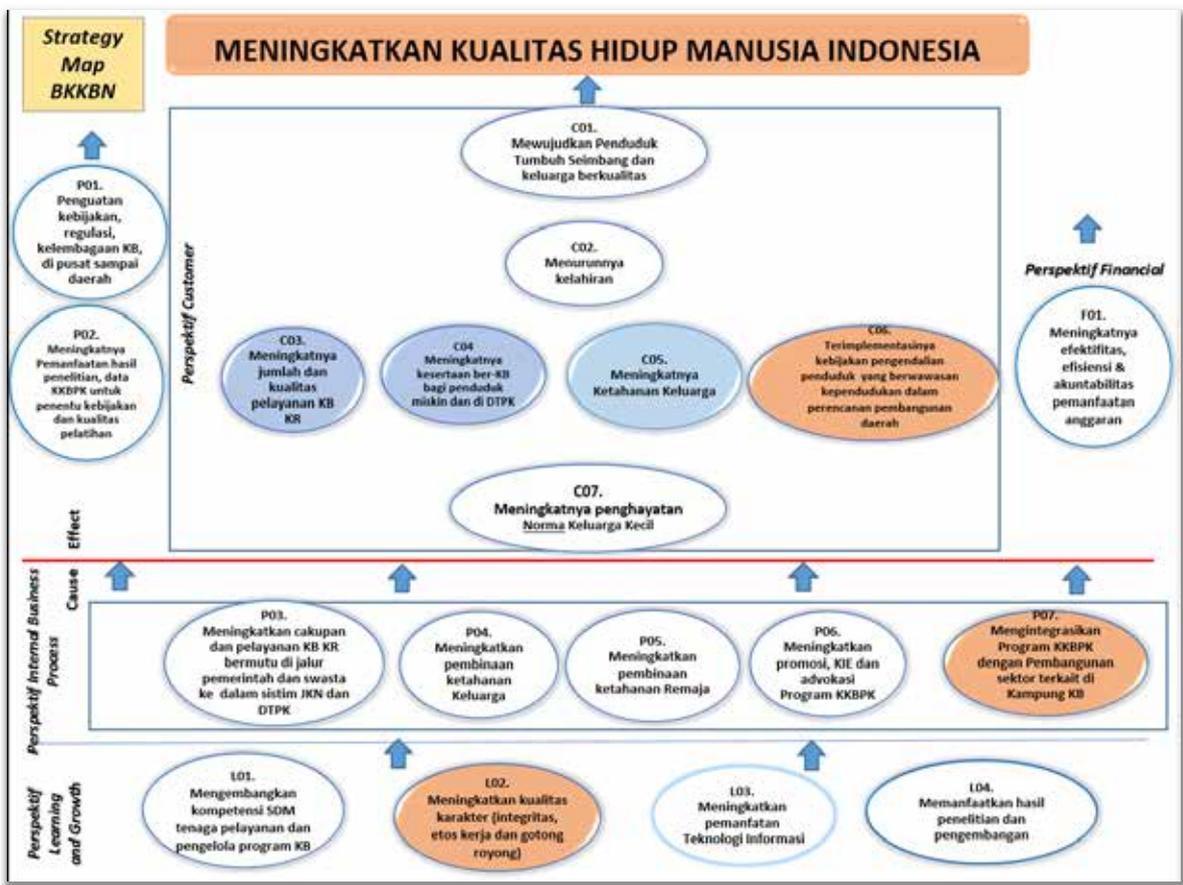
Sistem manajemen kinerja dengan pendekatan BSC di BKKBN meliputi empat tingkatan yaitu:

1. BKKBN-Wide, level lembaga;
2. Level Eselon II (*personal scorecard* Pimpinan Satuan Kerja Eselon II);
3. Level Eselon III (*personal scorecard* Pimpinan Satuan Kerja Eselon III);
4. Level Eselon IV (*personal scorecard* Pimpinan Satuan Kerja Eselon IV).

Penerapan manajemen kinerja dengan pendekatan *Balanced Scorecard* telah dilaksanakan sejak penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 dan dilanjutkan pada penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Disamping itu, penerapan manajemen kinerja dilakukan secara bertahap dan dievaluasi secara terus menerus.



Gambar 2.6
Peta Strategi BKKBN



Selain pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan statistik rutin, pengelolaan data basis kegiatan prioritas program, pelaksanaan penggunaan BSC merupakan salah satu dari pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan BKKBN. Proses otomasi dilakukan setelah pembangunan BSC selesai dilakukan. Upaya ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam proses input data, monitoring dan evaluasi dalam mendukung pengelolaan kinerja BKKBN. Untuk mengukur keberhasilan Renstra BKKBN Tahun 2015-2019, BKKBN telah menggunakan suatu sistem manajemen kinerja yaitu QPR (*Quality Processes Report*). QPR adalah aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC (*Balanced Scorecard*) yang bekerja secara online dan berfungsi untuk monitor, mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja BKKBN. Sistem aplikasi BSC yang dipakai di BKKBN adalah QPR (*Quality Processes Result*) versi 8.0 yang kemudian diperbaharui dengan versi 15.1 Software ini menggunakan aplikasi berbasis web dengan domain: jktbsc01/QPR2015-01/Portal/QPR menggunakan username dan password masing-masing unit kerja. Aplikasi tersebut dapat diakses dengan menggunakan jaringan intranet oleh pegawai BKKBN yang ditunjuk sebagai petugas administrasi BSC oleh masing-masing satuan kerja/komponen.

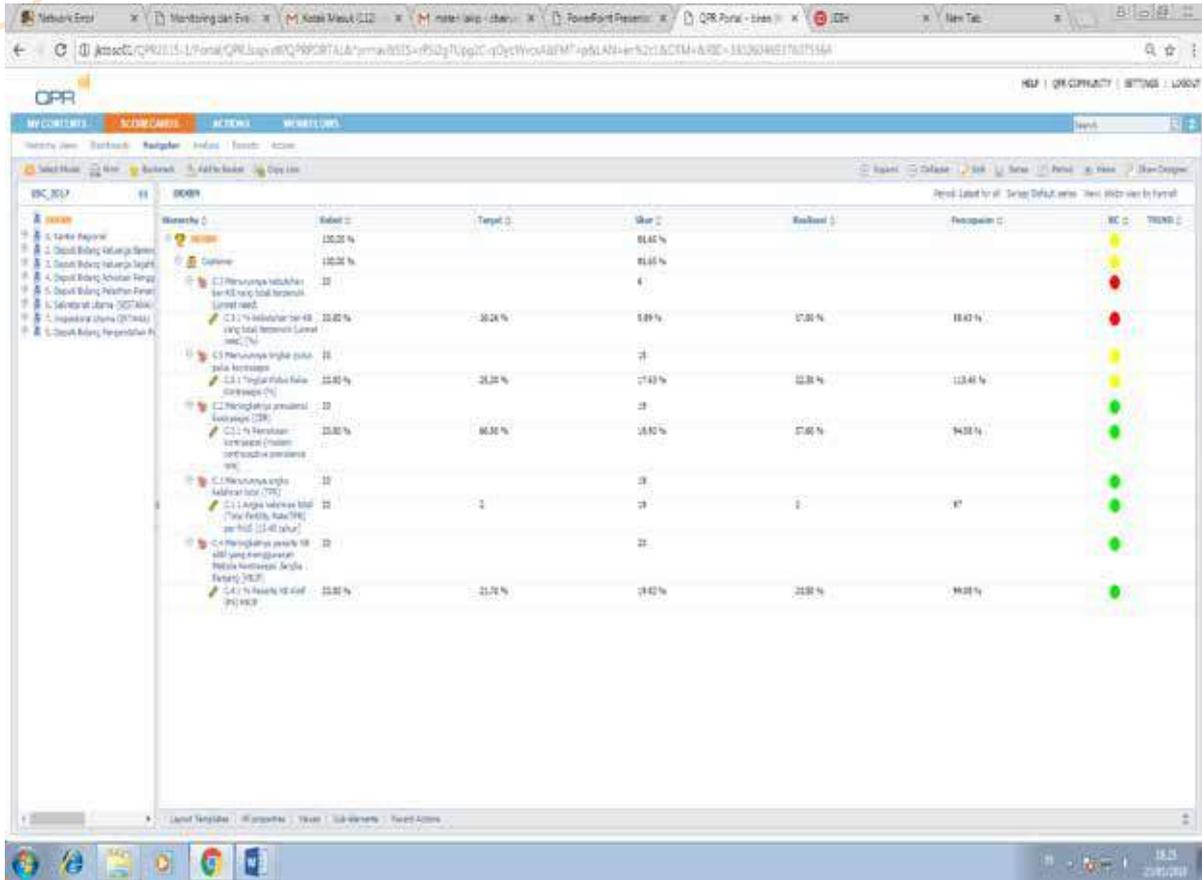
Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data IKU dari masing-masing unit kerja eselon II pusat dikoordinir oleh masing-masing perencana komponen;
2. Perekaman BSC unit kerja eselon II pusat ke dalam aplikasi BSC meliputi kegiatan perekaman data BSC unit kerja eselon II pusat yang dilakukan awal tahun setelah pembentukan BSC unit kerja eselon II pusat yang dilakukan oleh administrator BSC BKKBN, dalam hal ini adalah Biro Perencanaan. Pada tahap ini, hasil rekaman dapat langsung terlihat dalam website BKKBN;
3. Pemasukan data pencapaian IKU/KPI unit kerja eselon II pusat ke aplikasi QPR yang dilakukan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan di masing-masing unit kerja eselon II di pusat;
4. *Progress review* realisasi pencapaian seluruh IKU/KPI oleh Biro Perencanaan selaku pengelola manajemen kinerja BKKBN.

Monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan untuk menilai tingkat pencapaian dari masing-masing indikator kinerja serta kemungkinan terjadinya permasalahan atau hambatan. Dengan pendekatan BSC yang dilakukan secara berkala melalui forum khusus yang dikoordinasikan oleh tim pengelola kinerja BKKBN dengan melibatkan para pengelola BSC dari semua unit kerja eselon II. Telaah kinerja dilakukan setiap tahun.

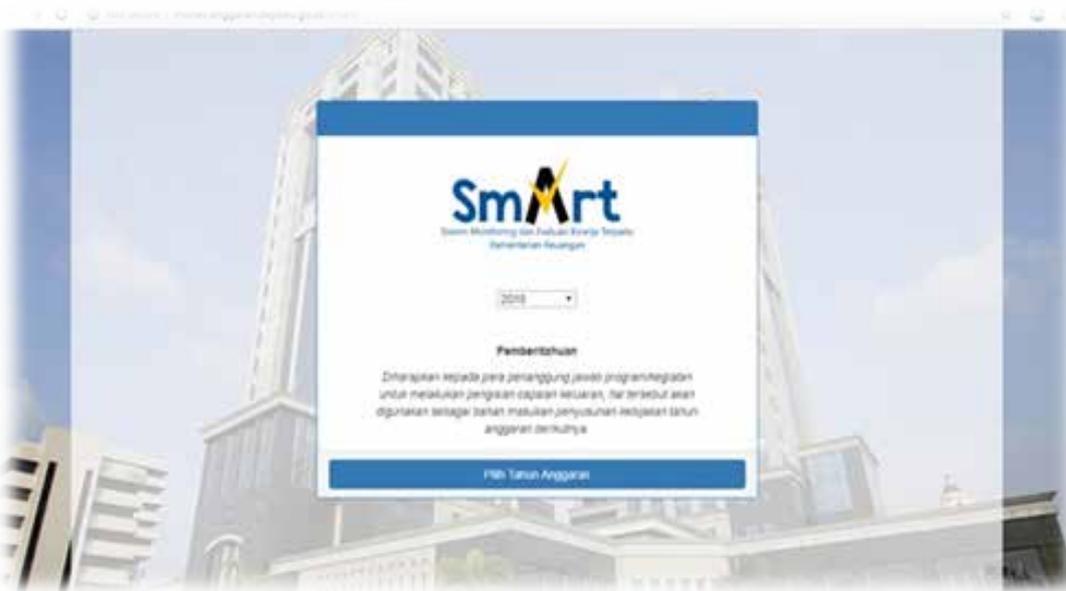
Tindak lanjut dari hasil telaah kinerja adalah melakukan penyesuaian ataupun perubahan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing satuan kerja telah ditetapkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada periode yang akan datang. Mengingat output kegiatan prioritas dari masing-masing satuan kerja telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun seperti tercantum dalam Renstra selanjutnya dilakukan penyesuaian atau perubahan dalam penetapan inisiatif strategis maupun rincian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai *output* serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Gambar 2.7
Aplikasi QPR



Untuk melihat capaian realisasi anggaran, BKKBN menggunakan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mengetahui capaian keluaran sehingga dapat digunakan bahan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya (terlampir).

Gambar 2.8
Aplikasi SMART



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja BKKBN

B. Realisasi Anggaran

C. Kinerja dan Capaian Lain

D. Evaluasi Kinerja



Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018, BKKBN telah berkomitmen semaksimal mungkin dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama BKKBN sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator dan 11 (sebelas) output yang mendukung Proyek Prioritas Nasional.

Pada bab ini, akan dibahas mengenai capaian, hambatan atau kendala dan upaya yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja 2018 serta rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memenuhi target pada tahun akhir RPJMN dan Renstra 2015-2019.

A. CAPAIAN KINERJA BKKBN

Pengukuran capaian kinerja BKKBN dengan menggunakan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Score Card* yaitu *Quality, Process, Result* (QPR). Di dalam QPR terdapat kategori penilaian capaian kinerja yang terdiri dari tiga kategori yaitu baik, sedang kurang, namun untuk mendorong peningkatan kinerja di lingkungan BKKBN maka tolak ukur keberhasilan ditingkatkan menjadi 100 persen sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria	Status	Label Status
≥100 persen Capaian Kinerja	Tercapai	
< 100 persen Capaian Kinerja	Belum Tercapai	

A.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja sasaran strategis menggunakan kerangka analisis yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran fertilitas di suatu populasi. Besarnya fertilitas dalam sebuah populasi ditentukan oleh 4 faktor utama (proximate determinan yaitu penggunaan kontrasepsi, proporsi menikah, aborsi, metode amenore laktasi). Khusus dalam hal penggunaan kontrasepsi menggunakan kerangka analisis sebagaimana yang di ilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Fertilitas



Sumber: Bongarts, J, dkk, 2012

Ukuran fertilitas dalam sebuah populasi ditentukan oleh penggunaan kontrasepsi yang dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu permintaan kontrasepsi dan kebutuhan kontrasepsi yang tidak dapat dipenuhi. Permintaan akan kontrasepsi dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang ada di masyarakat yaitu preferensi jumlah anak yang ingin dimiliki oleh sebuah keluarga. Preferensi ini sendiri dipengaruhi oleh nilai anak. Pada populasi dengan pembangunan sosial ekonomi dan angka kematian bayi yang rendah maka persepsi masyarakat terhadap anak adalah investasi pendidikan dan kesehatan kepada anak. Pada kondisi seperti ini maka kecenderungan preferensi fertilitasnya ingin memiliki anak sedikit. Sebaliknya pada kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan disertai dengan angka kematian bayi yang tinggi maka dapat di asumsikan persepsi masyarakat terhadap nilai anak adalah sebagai sumber pembantu pencari nafkah keluarga. Pada kondisi ini, preferensi fertilitasnya cenderung memiliki anak banyak.

Selain dipengaruhi oleh permintaan terhadap kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi juga ditentukan oleh *unmet need* atau permintaan yang tidak dapat dipenuhi. *Unmet need* ini dipengaruhi oleh keterjangkauan pelayanan baik dari aspek sosial, geografi, maupun finansial. Keterjangkauan kontrasepsi tersebut sangat ditentukan oleh maturitas program keluarga berencana. Dalam kerangka analisis di atas dapat disimpulkan bahwa program keluarga berencana tidak saja berpengaruh langsung terhadap aspek keterjangkauan pelayanan kontrasepsi tetapi juga terhadap nilai anak, sebaliknya pembangunan sosial ekonomi dan penurunan angka kematian dapat berkontribusi terhadap keterjangkauan pelayanan kontrasepsi.

Hasil capaian sasaran strategis BKKBN pada tahun 2018 dapat ditunjukkan pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2018

	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2,31	2,38	97,06
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	61.1	57	93.29
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	10,14	12,4	81.77
4.	Persentase peserta KB Aktif MKJP	22.3	23.1	103.59
5.	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25	25	100

Sumber: SKAP 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja utama BKKBN terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang tercapai dan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang belum tercapai.

Dua indikator kinerja utama BKKBN yang sudah tercapai pada tahun 2018 adalah (1) penurunan angka putus pakai kontrasepsi sebesar 25 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan (persentase capaian sebesar 100 persen); dan (2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) tercapai 23,1 persen dan angka ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 22,3 persen (persentase capaian sebesar 103,6 persen).

Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang perlu menjadi perhatian khusus dalam penggarapan program KKBPK ke depan adalah (1) penurunan angka kelahiran total yang baru mencapai angka 2,38 per WUS usia 15-49 tahun dari target sebesar 2,31 (persentase capaian sebesar 97,1 persen);

(2) peningkatan pemakaian kontrasepsi modern yang baru mencapai 57 persen dari target sebesar 61,1 persen (persentase capaian sebesar 93,29 persen); dan (3) penurunan angka unmet need yang baru mencapai 12,4 persen dari target sebesar 10,14 persen (persentase capaian sebesar 81,77 persen).

Pengukuran kinerja untuk 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

A.1.1 ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS (15-49 TAHUN)

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Realisasi capaian angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun) untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi
Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) Tahun 2018

IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2,31	2,38	97,06

Sumber: SKAP 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKU 1 adalah 2,38 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 2,31 maka capaiannya sebesar 97,06 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai TFR pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Program Generasi Berencana (GenRe) yang mempromosikan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja yang telah berhasil menurunkan ASFR 15-19 tahun dari 33/1000 kelahiran menjadi 30/1000 kelahiran dan meningkatkan median usia kawin pertama dari 20 pada tahun 2017 menjadi 21 pada tahun 2018; (SKAP 2017 & SKAP 2018);
- Peningkatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui penguatan fasilitas kesehatan yang melayani KB;
- Meningkatkan upaya promosi dan KIE tentang isu kependudukan telah menumbuhkan pemahaman masyarakat terkait isu kependudukan yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase pengetahuan masyarakat terhadap isu kependudukan dari 48 persen di tahun 2017 menjadi 51 persen di tahun 2018; (SKAP 2017 & SKAP 2018);
- Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam program KKBPK melalui pencantuman indikator program KKBPK (termasuk LPP dan TFR) di dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstrada dan RKPD pada 45 persen sektor, 30 persen provinsi, dan 25 persen kabupaten/kota di tahun 2018 (LAKIP Ditjakduk, 2018).

Belum tercapainya penurunan TFR sesuai dengan target tahun 2018 dapat disebabkan antara lain:

- Masih adanya persepsi nilai anak ideal lebih dari dua orang yang ditunjukkan dari hasil SDKI 2017 dimana responden wanita menyatakan nilai anak ideal sebesar 2,7 anak dan responden pria menyatakan nilai anak ideal sebesar 2,9 anak;
- Adanya penurunan pemakaian kontrasepsi modern dari 57,6 persen pada tahun 2017 menjadi 57,0 persen pada tahun 2018 (SKAP 2017 dan 2018);
- Masih tingginya angka *unmet need* pelayanan KB sebesar 12,4 persen;

- d. Adanya disparitas capaian TFR dengan kecenderungan TFR yang masih relatif tinggi di beberapa provinsi terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Salah satu penyebabnya adalah indikator pembangunan sosial ekonomi yang masih menjadi tantangan. Hasil perbandingan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki TFR tertinggi yaitu sebesar 3.23 dan Provinsi Bali yang memiliki TFR terendah yaitu sebesar 2.20 (SKAP 2018) menunjukkan bahwa indikator sosial ekonomi mempengaruhi TFR, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Indikator Sosial Ekonomi

Indikator Sosial Ekonomi	NTT TFR : 3,23	BALI TFR: 2,2
PDRB	91.160 Milyar	215.361 M
IPM	63.73	74.30
Rata-rata lama sekolah	7.15 tahun	8.55 tahun

Sumber data : BPS 2018

Tabel di atas menunjukkan semakin baik indikator sosial ekonomi maka akan semakin baik pula penurunan pencapaian fertilitas.

Adapun, perbandingan target dan realisasi TFR Tahun 2018 dengan target tiga tahun sebelumnya (2015 - 2017) dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian TFR
Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKU	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,37	2,28	103,9	2,36	2,30	102,60	2,33	2,40	97,08	2,31	2,38	97,06

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi TFR sudah menunjukkan keberhasilan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing secara berurutan 103,9 persen (2015) dan 102,60 persen (2016). Namun, untuk tahun 2017 dan 2018 mengalami stagnasi pencapaian di angka 97,08 persen di tahun 2017 dan 97,06 persen di tahun 2018.

Sementara itu, untuk perbandingan realisasi TFR tahun 2018 terhadap target tahun 2019 maka capaian IKU ini adalah sebesar 95,8 persen yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian TFR Tahun 2018 Dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2020	Presentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,31	2,28	2,38	95,80

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa realisasi pencapaian TFR tahun 2018 terhadap target akhir tahun RPJMN 2015-2019 memerlukan strategi yang lebih inklusif dan terintegrasi. Strategi yang inklusif akan dilakukan dengan memadukan kebijakan penurunan TFR yang bersinergi antar kementerian lembaga. Strategi yang terintegrasi akan dilakukan melalui penguatan kesinambungan program dan kerangka pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

A.1.2 PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi cara modern adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB modern berupa sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), Pil, IUD, Suntik, Susuk KB (Implant) dan kondom. Realisasi capaian pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) pada tahun 2018 seperti tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan target dan realisasi Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern
(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2018

IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	61.1	57	93.29

Sumber: SKAP 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pemakaian kontrasepsi modern pada tahun 2018 adalah 57 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 61.1 persen maka persentase capaiannya sebesar 93,29 persen.

Atas permasalahan pada capaian mCPR yang belum mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2018 telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan KIE dengan fokus pada strategi *below the line* yang menghasilkan peningkatan persentase pengetahuan masyarakat terhadap kontrasepsi modern. Dari 17,2 pada tahun 2017 menjadi 17,6 pada tahun 2018.
- Menyediakan alat dan obat kontrasepsi (alkon) bagi Pasangan Usia Subur di 19.973 fasilitas kesehatan dan tercapai 100 persen sesuai dengan target berdasarkan perhitungan kuantifikasi alkon (alokan program).
- Meningkatkan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi terutama pasca persalinan telah meningkatkan jumlah akseptor KB Pasca persalinan sebesar 1.354.074 akseptor pada tahun 2017 menjadi 1.385.446 akseptor pada tahun 2018. melalui program pengembangan pelayanan KB
- Meningkatkan kompetensi tenaga dokter di dalam dunia pendidikan kedokteran (*pre-service training*) melalui pemberian dukungan pelatihan bagi 6 (enam) Fakultas Kedokteran di tahun 2017 menjadi 10

(sepuluh) Fakultas kedokteran di tahun 2018. Fasilitas *Training of Trainer* bagi 13 Fakultas kedokteran di tahun 2017 menjadi 19 Fakultas Kedokteran di tahun 2018.

- e. Membuat sistem rujukan pelayanan KB yang bertujuan untuk mengatur alur mekanisme pelayanan KB antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dengan Panduan tentang Sistem Rujukan Pelayanan KB.
- f. Memperluas akses pelayanan KB di DTPK dan Miskin perkotaan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN termasuk sinergitas program, sinkronisasi data fasilitas kesehatan dan pembiayaan pelayanan KB termasuk pelayanan KB bergerak;
- h. Melaksanakan pembinaan Penggarapan pelayanan KBKR di 122 Kabupaten daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan daerah tertinggal tahun 2015 – 2019 dan 97 wilayah perkotaan yang ditetapkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Tahun 2013.
- i. Adanya pemberian penghargaan kepada fasilitas kesehatan khususnya puskesmas, rumah sakit, klinik KB perusahaan, bidan praktek yang memberikan pelayanan KB.

Realisasi mCPR yang belum tercapai dari target tahun 2018 ini dapat disebabkan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemberian KIE dan penggerakan pelayanan serta pembinaan bagi peserta KB karena jumlah PKB/PLKB tidak sebanding dengan luas wilayah binaan dengan rasio saat ini 1:6 desa (Laporan Ditbinlap, 2018);
- b. Masih rendahnya pengetahuan wanita pasangan usia subur tentang semua alat/ cara KB modern sebesar 17,6 persen (SKAP, 2018).
- c. Adanya peningkatan angka putus pakai penggunaan kontrasepsi dari 22,3 persen (SKAP 2017) menjadi 25,0 persen (SKAP 2018)
- d. Belum optimalnya akses pelayanan KB di fasilitas kesehatan karena masih rendahnya fasilitas kesehatan yang teregistrasi dalam SIM BKKBN dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yaitu sebesar 10.807 (45,6%) dibandingkan dengan jumlah fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang berpotensi melayani KB yaitu sebesar 23.697 (Data Potensi Faskes BKKBN 2018 dan Data BPJS Kesehatan 2018);
- e. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan alokon di fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya kekosongan stok alokon di fasilitas kesehatan yaitu 23 persen untuk IUD, 25 persen untuk implant, 19 persen untuk suntikan, 18 persen untuk pil, dan 31 persen untuk kondom (Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi, 2018)
- f. Menurunnya jumlah frekuensi pelayanan KB bergerak dari 3 kali gerak menjadi kurang dari 3 kali gerak/tahun/Kabupaten di wilayah Daerah Tetinggal Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) dan miskin perkotaan pada tahun 2018 dikarenakan adanya penurunan anggaran,
- g. Masih terdapat hambatan dalam pembiayaan pelayanan KB melalui program jaminan kesehatan, khususnya MOW interval yang membutuhkan rujukan medis serta pembiayaan KB pasca persalinan yang menjadi satu paket dengan persalinannya.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pemakaian kontrasepsi modern tahun 2018 dengan target tiga tahun sebelumnya (2015 - 2017) dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern
(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKU	2015	2016	2017			2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	N/A	N/A	60,9	57,6	94,6	61.1	57	93.29

Keterangan: NA : tidak diukur pada periode sebelumnya

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi IKU 2 mengalami tren penurunan dari tahun 2017 ke 2018 dari 94,6 persen (2017) menjadi 93,29 persen (2018). Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, mCPR belum dapat dinilai karena adanya perbedaan metode pengukuran dimana pada tahun tersebut dilakukan pengukuran pemakaian kontrasepsi untuk semua cara (*all method contraceptive: traditional method and modern method*)

Sementara itu, untuk perbandingan realisasi mCPR tahun 2018 terhadap target tahun 2019 maka capaian IKU ini adalah sebesar 95,8 persen yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern
(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Tahun 2018 dengan Dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	61.1	61,3	57	92,98

Dalam upaya perbaikan capaian mCPR tahun 2019 akan dilakukan dengan peningkatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi berbasis komunitas; meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN termasuk sinergitas program, sinkronisasi data fasilitas kesehatan dan pembiayaan pelayanan KB termasuk pelayanan KB bergerak; Peningkatan promosi dan sosialisasi tentang penggunaan KB pasca persalinan; Peningkatan kesertaan KB MKJP; Peningkatan advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan anggaran pelayanan KB bergerak di Kabupaten/Kota; Penguatan penggarapan daerah legok akan ditetapkan berdasarkan segmentasi wilayah dengan memperhatikan pencapaian program KB; Penguatan perencanaan kebutuhan, penyediaan dan distribusi alokon ke fasilitas kesehatan secara berjenjang; serta meningkatkan pembinaan kesertaan ber-KB dengan melakukan pemantauan kesertaan ber-KB melalui survailan pasca pelayanan kontrasepsi oleh PKB/PLKB dan memberdayakan Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

A.1.3 PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (*UNMET NEED*) (%)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) adalah persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Realisasi capaian angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) Tahun 2018

IKU	Target	Realisasi	%
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,14	12,4	81,77

Sumber: SKAP 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKU 3 adalah 12,4 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 10,14 maka capaiannya sebesar 81,77 persen.

Atas permasalahan pada capaian *unmet need* yang belum mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2018 telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- a. Menetapkan jumlah frekuensi gerak per tahun per Kabupaten sebanyak 3 (tiga) kali gerak pelayanan KB di wilayah DTPK dan wilayah miskin perkotaan;
- b. Menetapkan dan mensosialisasikan Peraturan Kepala BKKBN No. 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB Bergerak di 3 (tiga) regional (Kota Balikpapan, Kota Depok, Kota Batam) yang dihadiri oleh 163 OPDKB Kab/Kota;
- c. Mengembangkan pelayanan KB pasca persalinan di fasilitas kesehatan dengan membentuk Pusat Pelatihan KB pasca persalinan di 2 (dua) provinsi yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat yang bekerja sama dengan Litbang Provinsi, PPSDM Kementerian Kesehatan, dan JHPIEGO;
- d. Membentuk model Praktik Mandiri Bidan-Tempat Magang di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu upaya perluasan akses pelayanan KB;
- e. Mendayagunakan peran kelompok dan motivator KB pria sebanyak 1.682 kelompok di 32 provinsi serta mitra kerja untuk memberikan sosialisasi mengenai KB pria; dan
- f. Menyediakan DAK non fisik untuk distribusi alokon dan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan.

Penjelasan terhadap pencapaian *unmet need* yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program KB dan kesehatan reproduksi termasuk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan dan wilayah miskin perkotaan;
- b. Pemahaman masyarakat tentang KB termasuk efek samping dan penanganan komplikasi dan kegagalan masih rendah dikarenakan belum optimalnya pemberian KIE dan konseling yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama dalam penyediaan bahan-bahan edukasi yang komprehensif, aplikatif dan mudah diperoleh;
- c. Terbatasnya akses pelayanan KB dikarenakan kondisi dan letak geografis di wilayah Indonesia yang bervariasi (pegunungan dan kepulauan);
- d. Masih banyaknya bidan praktik mandiri yang belum menjadi jejaring fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
- e. Belum merata serta terbatasnya tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi dalam pelayanan KB MKJP sehingga akses pelayanan KB MKJP rendah;
- f. Adanya kekurangan stok alokon MKJP khususnya implan yang disebabkan karena terlambatnya pembelian alokon, tidak dilakukannya lelang dan gagal lelang yang mengakibatkan adanya potensi peserta KB implant tidak dapat dilayani;

- g. Belum optimalnya distribusi alokan ke fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan masih adanya kekosongan stok alokan di fasilitas kesehatan yaitu 23 persen untuk IUD, 25 persen untuk implant, 19 persen untuk suntikan, 18 persen untuk pil, dan 31 persen untuk kondom (Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi, 2018);
- h. Belum optimalnya penggarapan program KB pascapersalinan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya capaian KB pascapersalinan sebesar 1.385.446 dibandingkan dengan rata-rata jumlah persalinan sebesar 4-5 juta per tahun;
- i. Masih adanya hambatan dalam pembiayaan MOW interval melalui program Jaminan Kesehatan Nasional menyebabkan PUS yang sudah siap untuk ber-KB tidak dapat terlayani;
- j. Belum terselesaikannya proses penyusunan Peraturan Kepala BKKBN, sebagai pijakan untuk pembinaan dan pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus (Perka BKKBN tentang penggarapan pelayanan KB di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (Galciltas) dan Peraturan Kepala BKKBN tentang Peningkatan kesertaan KB Pria melalui kelompok KB Pria dan motivator KB Pria)
- k. Adanya budaya patrilineal dimana suami memegang keputusan mutlak dalam hal penggunaan kontrasepsi tanpa berkompromi dengan pasangannya sehingga tidak ber KB;

Adapun, perbandingan target dan realisasi unmet need tahun 2018 dengan target tiga tahun sebelumnya (2015 - 2017) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian unmet need
Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKU	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,6	14,40	73,6	10,48	15,8	66,33	10,26	17,5	58,6	10,14	12,4	81,77

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi IKU 3 dari tahun 2015 ke 2017 mengalami trend penurunan, namun pada tahun 2018 IKU ini mengalami peningkatan sebesar 23,17 persen yakni dari capaian 58,6 persen pada tahun 2017 menjadi 81,77 persen di tahun 2018.

Sedangkan untuk perbandingan realisasi 2018 jika dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian IKU 3 ini adalah sebesar 79,92 persen seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi unmet need Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,14	9,91	12,4	79,92

Perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2019 dalam mencapai target penurunan *unmet need* adalah meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui advokasi terutama dalam penggarapan program KB dan kesehatan reproduksi serta peningkatan penggarapan wilayah DTPK melalui pelayanan KB bergerak untuk menjangkau PUS yang masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses pelayanan

KB; melakukan pemetaan dan sertifikasi kompetensi kepada dokter dan bidan yang telah dilatih CTU; melakukan penguatan perencanaan kebutuhan, penyediaan dan distribusi alokon ke fasilitas kesehatan secara berjenjang; mengadvokasi organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia untuk mendorong Bidan menjadi jejaring fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; meningkatkan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan terkait pembiayaan pelayanan KB dalam program JKN terutama pelayanan KB MOW interval dan KB pascapersalinan; peningkatan kapasitas PKB dan IMP dalam memberikan KIE KB serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi terkait KB kepada masyarakat; mempercepat proses Peraturan Kepala BKKBN, sebagai pijakan untuk pembinaan dan pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus (Perka BKKBN tentang penggarapan pelayanan KB di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (Galciltas) dan Peraturan Kepala BKKBN tentang Peningkatan kesertaan KB Pria melalui kelompok KB Pria dan motivator KB Pria); dan penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan motivator KB Pria dalam mendukung program KB dan kesehatan reproduksi.

A.1.4 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MKJP

Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang adalah kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Jenis metoda yang termasuk ke dalam MKJP adalah kontrasepsi mantap pria dan wanita (tubektomi dan vasektomi), Implant dan IUD (Intra Uterine Device). Realisasi capaian angka peserta KB aktif MKJP untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Persentase Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2018

IKU	Target	Realisasi	%
Persentase peserta KB Aktif MKJP	22.3	23.1	103.59

Sumber: SKAP 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKU 4 adalah 23,1 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 22,3 persen maka persentase capaiannya sebesar 103,59 persen.

Upaya yang telah dilakukan dalam tercapainya target 2018 untuk angka peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kontrasepsi MKJP;
- Tersedianya alkon MKJP (IUD dan Implant) pada fasilitas kesehatan;
- Tersedia tenaga kesehatan (bidan dan dokter) terlatih KB MKJP;
- Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB MKJP seperti obgyn bed, IUD Kit dan Implant Kit;
- Penguatan tim pengelola (tenaga kesehatan, operator) mobil unit pelayanan KB sampai ke tingkat kabupaten dan kota;
- Tersedianya dukungan dana penggerakan pelayanan KB MKJP.
- Adanya pemberian penghargaan kepada fasilitas kesehatan khususnya puskesmas, rumah sakit, bidan praktek yang memberikan pelayanan KB MKJP

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja angka peserta KB Aktif (PA) MKJP Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Masih tingginya peserta KB non MKJP sebesar 76,9 persen yang berpotensi untuk ganti cara ke KB MKJP;

2. Adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan KB MKJP;
3. Adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penggerakan Pelayanan KB MKJP serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi serta surat edaran Kepala BKKBN No.637/I/KB06/E1/2018 tentang penggerakan pelayanan KB MKJP;
4. Adanya integrasi kegiatan pemasangan IUD dengan pemeriksaan IVA Test/papsmear;
5. Adanya program bulan pelayanan MKJP serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka hari kontrasepsi sedunia;
6. Adanya pencaanaan TNI manunggal KB kesehatan tingkat Nasional dan Provinsi yang di prioritaskan pada pelayanan KB MKJP.

Adapun, perbandingan target dan realisasi peserta KB aktif MKJP tahun 2018 dengan target tiga tahun sebelumnya (2015 - 2017) menunjukkan bahwa capaian realisasi IKU pada tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami trend penurunan yaitu 103,9 persen , 102,36 persen dan 99,07 persen . Namun pada tahun 2018. IKU 4 mengalami peningkatan sebesar 4,52 persen yakni dari capaian 99,07 persen (2017) menjadi 103,59 persen (2018) yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKU	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	20,5	21,3	103,9	21,1	21,6	102,36	21,7	21,5	99,07	22,3	23,1	103,59

Sementara itu, untuk perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap target tahun 2019 seperti tabel berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	22,3	23,5	23,1	98,30

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi tahun 2018 jika dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian IKU ini adalah sebesar 98,30 persen.

Untuk meningkatkan capaian kesertaan KB MKJP maka pada tahun 2019 akan dilaksanakan percepatan pembelian alokon IUD dan implant di provinsi, menyediakan buffer alokon di pusat, serta dukungan dana distribusi dinamis alokon; dan penyediaan dukungan dana penggerakan KB MKJP di provinsi. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pembiayaan pelayanan KB MKJP pasca persalinan dan MOW Interval dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan; Peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan melalui monitoring kepatuhan standar pelayanan KB; Peningkatan kemitraan dalam penggarapan pelayanan KB MKJP di wilayah DTPK.

A.1.5 PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KETIDAKBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI (TINGKAT PUTUS PAKAI)

Angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai/*Contraceptive Discontinuation Rate*) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (*exposure*) karena suatu alasan tertentu antara lain terjadinya kegagalan atau mengalami efek samping. Untuk tahun 2018, realisasi capaian persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai) adalah sebesar 100 persen (tabel 3.16)

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2018

IKU	Target	Realisasi	%
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai)	25	25	100

Sumber: SKAP 2018

Untuk melihat perkembangan pencapaian penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai) selama periode 4 (tahun) terakhir dari tahun 2015-2018, maka didapatkan hasil bahwa setiap tahun target dapat tercapai, meskipun terjadi penurunan dalam hal persentase capaian kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam tercapainya target 2018 untuk penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman kepada 14.569 PKB/ PLKB untuk melakukan tupoksinya terutama dalam pemberian KIE dan pembinaan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi peserta KB;
2. Melakukan sosialisasi tentang kriteria kelayakan medis untuk penggunaan kontrasepsi (*Medical Eligibility Criteria for Contraceptive use*) kepada petugas pelayanan KB yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, POGI, WHO, IBI, PKMI, UNFPA, JHPIEGO, IPAS
3. Melakukan uji coba pemantauan peserta KB melalui metode Surveilans pasca pelayanan untuk mencari model pembinaan kesertaan ber-KB di provinsi Bengkulu;
4. Menyediakan dana ayoman komplikasi dan kegagalan kontrasepsi bagi peserta KB sebanyak 157 peserta atau sebesar Rp. 314.000.000,- ;
5. Meningkatkan peran kelompok kegiatan (Poktan) baik kelompok BKB sebesar 80.401 kelompok, BKR sebanyak 43.812 kelompok, BKL sebanyak 50.797 kelompok dan UPPKS sebanyak 55.284 kelompok dalam melakukan pembinaan terhadap peserta KB untuk menjaga keberlangsungan kesertaan ber-KB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber-KB
2. Meningkatnya peserta KB MKJP dari 22,3 persen (SKAP 2017) menjadi 23,1 (SKAP 2018)
3. Adanya alih status PKB/PLKB menjadi pegawai pusat sehingga memudahkan manajemen untuk melaksanakan tupoksinya dalam melakukan pembinaan keberlangsungan ber-KB
4. Meningkatnya pembinaan kesertaan ber-KB oleh PKB/PLKB di lini lapangan yang dikarenakan antara lain adanya alih status PKB dan PLKB menjadi pegawai pusat sehingga lebih memudahkan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan dalam melaksanakan tupoksinya.

Tabel 3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Penurunan Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (Tingkat Putus Pakai) Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKU	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	26,0	24,5	106,3	25,7	20,6	124,75	25,3	22,3	113,5	25	25	100

Sementara itu, untuk perbandingan realisasi penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (tingkat putus pakai) tahun 2018 terhadap target tahun 2019 maka capaian IKU ini adalah sebesar 98,4 persen yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Tingkat Putus Pakai Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25	24,6	25	98,40

Untuk meningkatkan capaian dalam rangka penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi maka pada tahun 2019 akan dilaksanakan penguatan pemberian KIE pra pelayanan oleh PKB/PLKB dan konseling oleh tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan KB MKJP, menjamin ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan KB dengan mengacu pada standar pelayanan KB, penguatan pemantauan pasca pelayanan kontrasepsi oleh PKB/PLKB dan meningkatkan peran IMP/Toga Toma sebagai role model bagi peserta KB.

A.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

A.2.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Untuk memastikan sasaran strategis BKKBN tercapai, maka ditetapkan sasaran program BKKBN 2015-2019 yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) indikator kinerja program. Hasil capaian sasaran program BKKBN pada tahun 2018 dapat ditunjukkan pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator kinerja program (IKP) sebagai berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2018

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
1. Jumlah Peserta KB Baru	7,39	6,03	81,60
2. ASFR 15-19 tahun	40	30	133,33
3. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50	17,6	35,20

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
4. Persentase Keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	40	38,1	95,25
5. Indeks Pengetahuan Remaja tentang Generasi Berencana	51	57,1	111,96
6. Persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan	48	51,4	107,08
7. Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1	1	100,00
8. Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur dan tenaga fungsional	90	97,4	108,22
9. Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	11	8	72,73
10. Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3	33	1100,00
11. Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitaian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,3	3,1	93,94
12. Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	34	34	100,00
13. Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	2	200,00
14. Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	100,00
15. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3	5	166,67
16. Persentase terlaksananya pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	60 (Pengembangan SDM)	60	100,00
17. Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4	3,14	78,50
18. Jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi	34	34	100,00 persen
19. Persentase temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK oleh eksternal audit	5 persen	0,12 persen	4166,67
20. Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker perwakilan BKKBN Provinsi	34	34	100,00

Sumber: SKAP 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa dari 20 (dua puluh) indikator kinerja program sasaran strategis BKKBN terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja program yang telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan indikator kinerja program yang belum tercapai sejumlah 6 (enam) indikator.

Pengukuran kinerja 20 (dua puluh) indikator kinerja program dapat diuraikan sebagai berikut:

A.2.1 JUMLAH PESERTA KB BARU (PB)

Peserta KB baru (PB) adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara atau alat kontrasepsi setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Indikator peserta KB baru tidak mencakup akseptor ganti cara yang beralih dari suatu metode kontrasepsi ke metode yang lain karena alasan kenyamanan atau biaya. Realisasi capaian jumlah Peserta KB Baru (PB) untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Peserta KB Baru (PB) Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Peserta KB Baru (juta)	7,39	6,03	81,6

Sumber: Statistik Rutin BKKBN 2018

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari Statistik Rutin BKKBN Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi sampai dengan Desember 2018, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 realisasi jumlah peserta KB baru (PB) sebesar 6,03 juta peserta KB dari target sebesar 7,39 juta peserta KB atau persentase capaian untuk indikator kinerja program ini sebesar 81,6 persen .

Adapun, perbandingan target dan realisasi Jumlah Peserta KB Baru (PB) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa peserta KB baru (PB) belum mencapai target yang ditetapkan yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Peserta KB baru (PB) Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKU	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%									
Jumlah Peserta KB baru (dalam juta)	6,84	6,41	93,71	7,15	6,66	93,14	7,43	6,39	85,86	7,39	6,03	81,59

Selanjutnya, untuk perbandingan realisasi jumlah peserta KB baru tahun 2018 terhadap target tahun 2019 maka capaian indikator ini adalah sebesar 82,26 persen yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Peserta KB Baru (PB) Tahun 2018 Dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Jumlah Peserta KB Baru (PB) (dalam juta)	7,39	7,33	6,03	82,26

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Jumlah Peserta KB baru (PB), maka telah dilakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Memperkuat komitmen BKKBN dengan mitra kerja terkait dalam mendukung penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Memperkuat penggerakan pelayanan KB MKJP melalui penyediaan dukungan dana penggerakan dengan sasaran sebanyak 1.831.470 peserta termasuk peserta KB baru;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan KB melalui fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang memberikan pelayanan KB dengan jumlah yang memadai. Berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 terdapat 9.825 Puskesmas, 2.766 Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta dan 7.641 klinik pratama. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut berpotensi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan KB;
- d. Meningkatkan Kapasitas SDM, serta ketersediaan Alokasi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Berkualitas di Faskes Swasta dan Jejaringnya;
- e. Menyediakan Sarana dan distribusi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan.
- f. Adanya regulasi tentang pelayanan KB dalam JKN yaitu Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam pembiayaan pelayanan KB;
- g. Meningkatkan Kesertaan KB Pascapersalinan dan Pascakeguguran baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut.

Untuk meningkatkan capaian jumlah peserta KB baru (PB) maka pada tahun 2019 akan dilaksanakan peningkatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi berbasis komunitas, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya jumlah peserta KB baru (PB) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan informasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, aplikatif, dan mudah diperoleh khususnya bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan pertama;
- b. Kurangnya strategi KIE program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang menasar pada kelompok masyarakat tertentu dengan pendekatan sosiokultural;
- c. Belum optimalnya pelayanan KB pasca persalinan karena mekanisme pembiayaan dalam jaminan kesehatan yang menjadikan biaya pelayanan KB menjadi satu paket dengan biaya persalinannya, khususnya di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL);
- d. Tidak semua fasilitas kesehatan yang teregistrasi dalam SIM BKKBN melaporkan hasil pelayanan KB;
- e. Belum optimalnya jaminan ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan; dan
- f. Belum optimalnya sinkronisasi data fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam SIM BKKBN. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada OPD Dalduk KB untuk aktif dalam memberikan registrasi kepada faskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS kesehatan dan berpotensi melayani KB. Berdasarkan data potensi faskes semester 2 tahun 2017 dari 18.786 total faskes yang terigister dalam SIM BKKBN terdapat 10.428 faskes (55,5 persen) yang bekerjasama dengan BPJS dan data potensi faskes semester 1 tahun 2018 dari 18.912 total faskes yang terigister dalam SIM BKKBN terdapat 10.709 faskes (56,6 persen) yang bekerjasama dengan BPJS sehingga mengakibatkan pelayanan KB yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang belum teregistrasi tidak tercatat dan dilaporkan.

Untuk meningkatkan capaian jumlah peserta KB baru (PB) maka pada tahun 2019 akan dilaksanakan peningkatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi berbasis komunitas, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk penataan fasilitas kesehatan yang teregister dalam SIM BKKBN dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, meningkatkan koordinasi dalam penguatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan lini lapangan dengan mengoptimalkan peran PKB/PLKB serta memberdayakan kader, melakukan percepatan pembelian alokon sesuai dengan perencanaan dan menjamin ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan, melakukan diseminasi *MEC wheel* KB PP dan PK, pemutakhiran sarana promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang aplikatif dan mudah peroleh oleh PUS, memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program KB dan kesehatan reproduksi, melakukan advokasi dan penyamaan persepsi antara pengambil kebijakan dan organisasi profesi terkait dengan pembiayaan pelayanan KB pasca persalinan; melakukan advokasi dan mendorong optimalisasi pemanfaatan biaya distribusi alokon melalui BOKB kepada OPD-KB

A.2.2 AGE SPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR) 15-19 TAHUN

Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun adalah Angka kelahiran kelompok umur 15-19 tahun, menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan pada suatu tahun tertentu per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Tinggi rendahnya ASFR 15-19 tahun merupakan representasi fertilitas pada kelompok usia remaja. Tingginya fertilitas usia remaja merupakan alarm peringatan dini terhadap ancaman tingginya fertilitas secara umum. Hal tersebut karena fekunditas (kemampuan perempuan untuk hamil dan melahirkan) yang terbentang sepanjang usia reproduksinya hingga usia 49 tahun. Jika di usia muda (masa reproduksi awal) sudah hamil dan melahirkan berarti akan memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan lebih banyak lagi sampai dengan akhir usia reproduksinya. Oleh karena itu, menurunkan fertilitas remaja (ASFR 15–19 tahun) adalah upaya dalam menurunkan fertilitas secara umum (TFR).

Pada tahun 2018 angka kelahiran pada kelompok umur wanita/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 tahun sebesar 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun dari target 40 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun atau persentase capaian untuk indikator ini sebesar 133,33% yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	40	30	133,33

Pencapaian indikator ini merupakan hasil dari pelaksanaan program antara lain melalui program Generasi Berencana (GenRe), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan kesehatan reproduksi pada remaja.

Adapun, perbandingan target dan realisasi ASFR 15-19 tahun pada tahun 2018 dengan target tiga tahun sebelumnya (2015 - 2017) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian ASFR 15-19 tahun Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015*			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%									
Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	46	33	139,39	44	38	115,79	42	33	127,27	40	30	133,33

Sumber: SKAP 2018

* Performance Monitoring and Accountability

Pada tabel diatas menunjukkan pencapaian target selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari indikator penurunan pada angka kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) sudah tercapai. Pencapaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan ASFR dari Tahun 2015 karena perbedaan metode pengukuran dari 2 (dua) sumber data yang berbeda (Tahun 2015 bersumber dari PMA dan Tahun 2016 bersumber dari SKAP).

Sementara itu, untuk perbandingan realisasi tahun 2018 terhadap target tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian ASFR 15-19 tahun Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKP	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	40	38	30	126,67

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi ASFR 15-19 tahun pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan target RPJM tahun 2019, maka capaian indikator ini adalah sebesar 126,67 persen.

Keberhasilan capaian kinerja ASFR 15-19 Tahun 2018 dipengaruhi upaya-upaya sebagai berikut:

- Memperkuat jangkauan program Generasi Berencana dari 10.690 kelompok PIK Remaja jalur pendidikan pada Tahun 2017 menjadi 25.186 kelompok pada Tahun 2018 (sumber: Dallap);

- b. Memperluas jangkauan program Generasi Berencana yang menasar remaja berbasis komunitas melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial pada kelompok anak jalanan dan difabel serta melalui kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM pada kelompok remaja yang ada di Lembaga Masyarakat;
- c. Menyediakan materi dan media KIE Generasi Berencana sampai lini lapangan melalui Menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB.
- d. Menyediakan pembiayaan operasional untuk kelompok kegiatan di kampung KB melalui Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
- e. Melakukan penguatan advokasi dan KIE Generasi Berencana melalui kegiatan sosialisasi bersama mitra di 33 provinsi;
- f. Membangun aplikasi GenRe Apps untuk memperluas informasi kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dengan 5 (lima) transisi kehidupan remaja;
- g. Membangun karakter remaja yang bersih tertib dan mandiri melalui kegiatan GenRevolution berteman.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja ASFR 15-19 Tahun 2018

1. Potensi penggarapan program Genereasi Berencana masih besar dengan jumlah struktur remaja 25 persen dari total jumlah penduduk ;
2. Adanya undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun;
3. Mahkamah Konstitusi memberikan peluang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan;
4. Tersedia panduan, modul dan *prototype* program Bina Ketahanan Remaja (BKR);
5. Adanya kerjasama dengan stakeholder dan mitra kerja yang memiliki anak cabang sampai tingkat lini lapangan.

Upaya tindak lanjut pada tahun 2019 untuk mempertahankan ASFR 15 – 19 adalah menjangkau sasaran remaja berbasis komunitas yang belum terintervensi. Fokus penggarapan program akan mengarah pada penguatan karakter remaja dan *life skill*. Dalam rangka memasuki fase revolusi industri 5.0 maka muatan program akan dipekuat dengan sistem digital.

A.2.3 PERSENTASE PUS YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG SEMUA JENIS METODE KONTRASEPSI MODERN

Pasangan Usia Subur yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern.

Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50	17.6	35.2

Sumber: SKAP, 2018

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber SKAP tahun 2018 dapat diketahui bahwa capaian realisasi persentase pus yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern adalah target sebesar 50 persen, berdasarkan hasil skap 2018 realisasinya adalah 17,6 persen yang berarti baru tercapai 35,2 persen, data tersebut menunjukkan hasil yang masih sangat kurang dari target yang seharusnya dicapai.

Indikator penyebab terjadinya kegagalan realisasi kinerja untuk mencapai target persentase pus yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sosialisasi dari pengelola program KKBPK
2. masih kurangnya publikasi dan promosi dari berbagai media baik elektronik melalui TV, radio, media sosial dan media cetak/luar ruang seperti Koran, majalah, borus, flyer, leaflet, billboard, lembar balik, buku dan lain lain sesuai dengan segmentasi sasaran dan kearifan wilayah dan budaya masing-masing.

Kegagalan capaian indikator Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Kurang optimalnya informasi yang diberikan saat penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja putri sebagai calon pengantin;
2. Kurang optimalnya tenaga kesehatan dalam memberikan KIE bagi Pasangan Usia Subur.

Adapun, perbandingan target dan realisasi persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015 – 2018) menunjukkan bahwa telah mencapai target yang ditetapkan yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27
Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018	16	n/a	n/a	21	14.8	70.48	31	17.30	55.81	50	17.6	35.2

Sumber: SKAP, 2018

Tabel 3.28
Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode
kontrasepsi modern Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase pus yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50	70	17.6	25.14

Sumber: SKAP, 2018

Terkait capaian target Indikator persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Tahun 2018 sudah 25.14 persen, upaya yang dilakukan pada tahun 2019 selanjutnya adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, publikasi dan promosi dengan berbagai media dengan isi pesan dan program KKBPK yang sesuai segmentasi sasaran wilayah dan kearifan lokal.

A.2.4 PERSENTASE KELUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA

Salah satu kinerja ke deputian bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) dalam mewujudkan keluarga berkualitas diukur melalui **keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga**, yang terdiri dari fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Realisasi capaian indikator persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga yang memiliki Pemahaman dan
Kesadaran Tentang Fungsi Keluarga Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	40	38,10	95,25

Sumber: SKAP, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk indikator ini sebesar 38,10 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 40 persen maka persentase capaiannya sebesar 95,25 persen.

Adapun, perbandingan target dan realisasi persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga Tahun 2018 dengan target tiga tahun sebelumnya (2015 - 2017) dapat dilihat pada tabel 3.29 di bawah ini.

Tabel 3.30
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Keluarga Yang Memiliki Pemahaman dan Kesadaran Tentang Fungsi Keluarga Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	10	n/a	-	20	24,0	120	30	29,5	98,33	40	38,1	95,25

Sumber: SKAP, 2018

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi indikator persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga mengalami tren penurunan dari tahun 2016 ke 2018 masing-masing sebesar 120%; 98,33 persen ; dan 95,25 persen .

Pada tahun 2018 capaian keluarga yang mengetahui seluruh fungsi keluarga hanya mencapai sekitar 38,1 persen dari responden sebanyak 69.516 keluarga. Sedangkan untuk pencapaian yang mengetahui 1 (satu) fungsi keluarga menunjukkan capaian diatas 80 persen pada tahun 2015-2017 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.31
Persentase Keluarga Menurut Pengetahuan Minimal Dua Nilai di Masing-Masing Fungsi Tahun 2015, 2016, dan 2017

Persentase keluarga menurut pengetahuan minimal dua nilai di masing-masing fungsi, Indonesia 2015-2017			
Pengetahuan tentang Fungsi Keluarga	2015	2016	2017
- Mengetahui sedikitnya 1 fungsi keluarga	85,4	88,1	94,3
- Mengetahui sedikitnya 2 fungsi keluarga	64,0	78,1	86,6
- Mengetahui sedikitnya 3 fungsi keluarga	52,8	70,3	78,3
- Mengetahui sedikitnya 4 fungsi keluarga	43,8	62,1	69,9
- Mengetahui sedikitnya 5 fungsi keluarga	36,3	53,8	61,4
- Mengetahui sedikitnya 6 fungsi keluarga	9,4	45,4	52,0
- Mengetahui sedikitnya 7 fungsi keluarga	29,4	36,0	41,9
- Mengetahui 8 (semua) fungsi keluarga	15,3	24,0	29,5
- Tidak mengetahui satupun fungsi keluarga	14,6	11,9	5,7
Jumlah responden	44.904	53.606	67.224

Sementara itu, untuk perbandingan realisasi persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga tahun 2018 terhadap target tahun 2019 maka capaian IKU ini adalah sebesar 95,8 persen yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.32
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga Yang Memiliki Pemahaman dan Kesadaran Tentang Fungsi Keluarga Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKP	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	40	50	38,1	76.20

Sumber: SKAP, 2018

Belum tercapainya persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga sesuai dengan target tahun 2018 dapat disebabkan antara lain:

- Kurangnya sosialisasi tentang 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh karena dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan oleh keluarga namun belum familiar terhadap pengklasifikasian tersebut.
- Kurang optimalnya Sinergitas Program Pembangunan Keluarga antar kementerian lembaga yang menangani pembangunan keluarga;
- Kebijakan pembangunan keluarga belum diterjemahkan secara operasional di seluruh tingkatan wilayah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota;

Atas permasalahan pada capaian indikator persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga yang belum mencapai target yang ditetapkan maka telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- Menyediakan materi 8 (delapan) fungsi keluarga untuk kegiatan sosialisasi pada kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan Kelompok UPPKS);
- Menguatkan kapabilitas dan kapasitas pengelola dan pelaksana program melalui orientasi dan *workshop* program pembangunan keluarga;
- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga dalam hal pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup; penguatan karakter anak melalui pola asuh; penguatan karakter remaja melalui pembinaan ketahanan remaja dan *life skill*; penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan remaja tentang perencanaan berkeluarga dan tentang kesehatan reproduksi; dan penyiapan keluarga pra lansia dalam mewujudkan lansia tangguh yang aktif, sehat, mandiri dan produktif;

Upaya perbaikan pada tahun 2019 adalah menyusun NSPK bidang Pembangunan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan di provinsi, kabupaten dan kota. Untuk mengetahui keberhasilan program pembangunan keluarga maka disusun indeks pembangunan keluarga (IPK).

Upaya perbaikan pada tahun 2019 adalah menyusun NSPK bidang Pembangunan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan di provinsi, kabupaten dan kota

A.2.5 INDEKS PENGETAHUAN REMAJA TENTANG GENERASI BERENCANA

Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) merupakan ukuran untuk mengetahui keberhasilan upaya peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui pembinaan ketahanan remaja. Indeks pengetahuan remaja tentang KRR diukur melalui 4 (empat) indikator pengetahuan remaja meliputi (1) masa subur; (2) umur sebaiknya menikah dan melahirkan; (3) HIV/AIDS ; dan (4) Narkoba. Pada tahun 2018, realisasi capaian indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengetahuan Remaja
tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2018

IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	51	57,1	111.96

Sumber: SKAP 2018

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari SKAP 2018, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 realisasi indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja sebesar 57,1 persen dari target sebesar 51 persen atau persentase capaian untuk indikator kinerja program ini sebesar 111,96 persen.

Keberhasilan realisasi kinerja tersebut disebabkan oleh antara lain :

1. Tersedianya kebijakan, strategi, pedoman, materi dan administrasi tentang Program Bina Ketahanan Keluarga ;
2. Tercapainya target menurunkan ASFR 15-19 tahun dari target 40/1000 kelahiran menjadi 30/1000 kelahiran, merupakan keberhasilan program Generasi Berencana (GenRe), dalam mensosialisasikan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kesehatan reproduksi pada remaja, Advokasi dan KIE;
3. Tersedianya materi dan media KIE Generasi Berencana sampai lini lapangan melalui Menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB.
4. Tersedianya pembiayaan operasional untuk kelompok kegiatan di kampung KB melalui Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang mendukung program KKBPK;
5. Tersedianya sinergitas dengan pimpinan kementerian/lembaga, NGO serta instansi lainnya dalam penyelenggaraan program KKBPK;
6. Teroptimalkannya pemanfaatan informasi dan teknologi terhadap program pembangunan keluarga.

Adapun, upaya untuk mempertahankan keberhasilan kinerja terhadap capaian indikator Indeks Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja pada tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Potensi penggarapan program Generasi Berencana masih besar dengan jumlah struktur remaja 25 persen dari total jumlah penduduk ;
- b. Tersedia panduan, modul dan *prototype* terkait Kesehatan Reproduksi Remaja;
- c. Adanya kerjasama dengan *stakeholder* dan mitra kerja yang *concern* terhadap kesehatan reproduksi remaja (Plan, Unicef, UNFPA).
- d. Penguatan KIE kepada remaja tentang substansi kesehatan reproduksi remaja.
- e. Membangun aplikasi GenRe Apps untuk memperluas informasi kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang di dalamnya terdapat muatan kesehatan reproduksi remaja;

Adapun, perbandingan target dan realisasi indikator ini dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa peserta KB baru (PB) belum mencapai target yang ditetapkan yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.34
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja	48,4	49	101,23	49	51	104,08	50	52	104	51	57	111,76

Sumber: SKAP, 2018

Pada tabel diatas menunjukkan pencapaian target selama 4 (empat) tahun berturut-turut, indikator kinerja indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sudah tercapai. Capaian indikator kinerja "indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan melebihi target kinerja setiap tahunnya. Peningkatan capaian indikator kinerja ini antara lain disebabkan semakin meningkatnya sinergitas yang dilakukan di dalam pelaksanaan promosi dan KIE Kesehatan reproduksi baik dengan melibatkan kementerian dan lembaga lainnya, maupun dengan organisasi non pemerintah maupun dengan lembaga donor.

Selanjutnya, untuk perbandingan realisasi jumlah peserta KB baru tahun 2018 terhadap target tahun 2019 maka capaian indikator ini adalah sebesar 82,26 persen yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Pada tabel diatas menunjukkan pencapaian target selama 4 (empat) tahun berturut-turut, indikator kinerja indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sudah tercapai.



Tabel 3.35
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja	51	52	57	109,62

Sumber: SKAP, 2018

Upaya tindak lanjut pada tahun 2019 untuk mempertahankan Indeks Pengetahuan Remaja dilakukan kegiatan yang mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). Fokus penggarapan program juga akan mengarah pada penguatan karakter remaja dan *life skill*. Dalam rangka memasuki fase revolusi industri 5.0 maka muatan program akan diperkuat dengan sistem digital.

A.2.6 PERSENTASE KELUARGA MENGETAHUI TENTANG ISU KEPENDUDUKAN

Keluarga yang mengetahui tentang isu kependudukan diukur melalui pembobotan 8 kriteria yang meliputi indeks pendapat tentang pengendalian kelahiran; indeks pendapat tentang dampak buruk pertambahan penduduk; indeks pendapat tentang remaja menikah kurang dari 21 tahun; indeks pendapat tentang keluarga ingin anak banyak (lebih dari 2); indeks pendapat tentang mudik saat hari raya atau libur sekolah; indeks pendapat tentang persiapan masa tua yang lebih baik; dan indeks perilaku membuang sampah. Realisasi capaian persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga Mengetahui Tentang Isu Kependudukan Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan	48	51,4	107,08

Sumber: SKAP 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 realisasi persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan sebesar 51,4 persen dari target sebesar 48 persen atau persentase capaian sebesar 107,08 persen.

Capaian tersebut disebabkan oleh antara lain :

- Kerja sama dalam penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk di seluruh Indonesia bersama para mitra antara lain: IPADI; FAPSEDU; Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan; dan Pusat Studi Kependudukan;
- Komitmen dan dukungan lintas sektor baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pembangunan berwawasan kependudukan.
- Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bidang pengendalian penduduk, diantaranya:(1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga; (3) Peraturan

Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; dan Permendagri No. 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana kerja Daerah Tahun 2018.

- d. Tersedianya berbagai sumber data kependudukan yang bisa dikembangkan untuk penyusunan materi bahan advokasi dan sosialisasi program.
- e. Tersedianya pemetaan perkembangan Program KKBPK secara geospasial melalui yang dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan program serta bahan advokasi dan KIE kepada para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di level pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
- f. Sudah tersedia pembagian yang jelas urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di pusat, provinsi, kabupaten dan kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Tersedianya panduan penerapan pendidikan kependudukan jalur formal, informal dan nonformal serta peningkatan sosialisasi strategi penerapan kerjasama pendidikan kependudukan

Keberhasilan capaian Indikator ini dipengaruhi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Pengendalian Penduduk antara lain:

- a. Proaktif dalam berkoordinasi lintas kementerian dan mitra untuk menyiapkan strategi dalam pemaduan kebijakan dan program pengendalian penduduk;
- b. Mengembangkan dan mendorong Perwakilan BKKBN Provinsi dalam memberikan fasilitasi program pengendalian penduduk;
- c. Pendampingan langsung kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Berkoordinasi dengan lintas direktorat dan bantuan pihak ketiga lain yang bersedia melakukan peningkatan kompetensi pejabat pemerintah daerah terkait dengan teknik demografi, kebijakan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
- e. Telah dilaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang berwenang di BKKBN untuk melakukan finalisasi dokumen kerjasama secara legal lembaga BKKBN;
- f. Telah dilaksanakan penyempurnaan petunjuk teknis serta melakukan sosialisasi dan fasilitasi strategi penerapan program pengendalian penduduk;
- g. Telah dilakukan penyempurnaan instrumen monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk serta melakukan sosialisasi kepada para pengelola program dan mitra terkait.

Adapun, perbandingan target dan realisasi persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.37
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga Mengetahui Tentang Isu Kependudukan Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan	38	n.a	-	42	48,5	115,48	46	48,3	105	48	51,4	107,08

Pada tabel diatas menunjukkan pencapaian target selama 4 (empat) tahun berturut-turut, indikator kinerja persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan sudah tercapai.

Selanjutnya, untuk perbandingan realisasi persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan 2018 terhadap target tahun 2019 maka capaian indikator ini adalah sebesar 102,8 persen yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluarga Mengetahui Tentang Isu Kependudukan Tahun 2018 Dengan Target RPJM Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase keluarga mengetahui tentang isu kependudukan	48	50	51,4	102,8

Sumber: SKAP, 2018

A.2.7 JUMLAH KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA

(PENDATAAN KELUARGA) YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU

Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang Data Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Untuk setiap tahunnya dilakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).

Tabel 3.39
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018	1	1	100

Sumber: Pendataan Keluarga (PBDKI) BKKBN 2018

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber pada Pendataan Keluarga (PBDKI) Tahun 2018 dapat diketahui bahwa capaian realisasi jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan Keluarga) yang akurat dan tepat waktu adalah 100 persen .

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil pelayanan KB dan pengendalian lapangan.
- Memberikan umpan balik hasil PBDKI, Pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan kepada wilayah 1 tingkat dibawahnya mulai dari tingkat pusat hingga lini lapangan setiap bulannya baik dalam bentuk kegiatan radialgram maupun dalam bentuk buku umpan balik pelayanan KB dan Pengendalian lapangan.
- Mengintegrasikan aplikasi Pendataan Keluarga (PBDKI) kedalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga.
- Melakukan harmonisasi data dengan Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes.
- Melakukan koordinasi dengan PULAP dalam rangka pelaksanaan *Master of Trainer (MOT) dan Training*

of Trainer (TOT) pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) bagi kasubbid datin dan pengelola data di OPD/KB.

- f. Mengadakan kegiatan temu kerja regional dengan peserta kasubbid datin dan pengelola data dan informasi OPD/KB dalam rangka mensosialisasikan kebijakan program KKBPK, peningkatan kualitas data, sebagai wadah berdiskusi permasalahan yang terjadi di lapangan sekaligus sebagai reward bagi pengelola data.
- g. Membuat tools peningkatan kualitas data rutin (PMKDR).
- h. Membentuk Tim Posko Pengelolaan SIGA yang bertanggungjawab dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi keluarga.
- i. Melakukan koordinasi dengan DITBINLAP dalam rangka pendayagunaan PKB/PLKB untuk pengelolaan data SIGA.
- j. Melakukan koordinasi dengan DITTIFDOK dalam pembuatan *Application Programming Interface* (API) agar harmonisasi data lintas sektor bisa terlaksana dengan baik.
- k. Membuat panduan pengelolaan SIGA.
- l. Mengembangkan Dashboard Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga.

Keberhasilan capaian Indikator Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- a. Terlaksananya Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) setiap tahun sebagai updating hasil pendataan keluarga termasuk untuk mengakomodir data keluarga baru yang belum terdata pada pendataan keluarga Tahun 2015;
- b. Adanya dukungan dan komitmen berbagai dari pihak pusat sampai dengan lini lapangan antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat Desa dan Perguruan Tinggi.
- c. Tersedianya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendataan keluarga dan PBDKI berupa:
 - 1) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga.
 - 2) Panduan Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2015.
 - 3) Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dalam Sistem Informasi Keluarga.
 - 4) Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 - 5) Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Program Kependudukan,

Keberhasilan capaian Indikator Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018

- Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 6) Panduan Pengelolaan KMR (Kartu Motivasi dan Rujukan).
 - 7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga.
 - 8) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Data Rutin.
 - 9) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Data Non Rutin.
 - 10) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Keluarga.
 - 11) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 119/5831/DUKCAPIL Nomor : 58/PKS/G2/2017 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas dan Kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 - 12) Kesepakatan Bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1/KSM/G2/2017 Nomor : 01/PKS/M/2017 tentang Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - 13) Surat Plt. Kepala BKKBN Nomor : 319/LP.01/G4/2018 tanggal 18 Januari 2018 Perihal : Pelaksanaan PBDKI Tahun 2018.
 - 14) Surat Plt. Kepala BKKBN Nomor : 318/LP.01/G4/2018 tanggal 18 Januari 2018 Kebijakan Pelaksanaan Uji Coba Sistem Informasi Keluarga Tahun 2018.

Adapun, perbandingan target dan realisasi jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan Keluarga) yang akurat dan tepat waktu dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015 – 2018) menunjukkan bahwa telah mencapai target yang ditetapkan yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.40
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%									
Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keluarga (Pendataan Keluarga) yang Akurat dan Tepat Waktu Tahun 2018	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100

Sumber: LAKIP Kedeputian ADPIN 2018

Selanjutnya, untuk perbandingan realisasi jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan Keluarga) yang akurat dan tepat waktu tahun 2018 terhadap target tahun 2019 maka capaian indikator ini adalah sebesar 100 persen yang dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil pendataan keluarga, pelayanan KB, dan pengendalian

lapangan.

2. Memberikan umpan balik hasil PBDKI, Pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan kepada wilayah 1 tingkat dibawahnya mulai dari tingkat pusat hingga lini lapangan setiap bulannya baik dalam bentuk kegiatan radalgram maupun dalam bentuk buku umpan balik pelayanan KB dan Pengendalian lapangan.
3. Mengintegrasikan aplikasi Pendataan Keluarga (PBDKI) kedalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga.
4. Melakukan harmonisasi data dengan Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes.
5. Melakukan koordinasi dengan PULAP dalam rangka pelaksanaan Master of Trainer (MOT) dan Training of Trainer (TOT) pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) bagi kasubbid datin dan pengelola data di OPD/KB.
6. Mengadakan kegiatan temu kerja regional dengan peserta kasubbid datin dan pengelola data dan informasi OPD/KB dalam rangka mensosialisasikan kebijakan program KKBPK, peningkatan kualitas data, sebagai wadah berdiskusi permasalahan yang terjadi di lapangan sekaligus sebagai reward bagi pengelola data.
7. Membuat tools peningkatan kualitas data rutin (PMKDR).
8. Membentuk Tim Posko Pengelolaan SIGA yang bertanggungjawab dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi keluarga.
9. Melakukan koordinasi dengan DITBINLAP dalam rangka pendayagunaan PKB/PLKB untuk pengelolaan data SIGA.
10. Melakukan koordinasi dengan DITTIFDOK dalam pembuatan Application Programming Interface (API) agar harmonisasi data lintas sektor bisa terlaksana dengan baik.
11. Membuat panduan pengelolaan SIGA.
12. Membuat Panduan Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2020.
13. Melakukan Uji Coba PK 2020 di 9 Provinsi.
14. Mengembangkan aplikasi SIGA dengan menambahkan fitur approval di setiap tingkatan wilayah dalam rangka peningkatan kualitas data.
15. Membuat Panduan Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2020.
16. Melakukan Uji Coba PK 2020 di 9 Provinsi
17. Mengembangkan aplikasi SIGA dengan menambahkan fitur approval di setiap tingkatan wilayah dalam rangka peningkatan kualitas data.
18. Mengadakan seminar pemanfaatan data bersama mitra kerja.
19. Menyelenggarakan forum lintas sektor untuk peningkatan kualitas data.
20. Menyelenggarakan review (telaah) tengah tahun pelaksanaan program KKBPK.
21. Mengembangkan aplikasi R/I/BDKI untuk membantu dalam pemutakhiran basis data keluarga indonesia.

A.2.8 PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR DAN TENAGA FUNGSIONAL

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan BKKBN, maka BKKBN melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB (Pusdiklat KKB) yang berada di bawah Kedeputusan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang) menetapkan program prioritas yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Kependudukan dan KB yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional bagi tenaga pegawai dan program Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Untuk mengukur pencapaian hasil tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN yaitu meningkatnya persentase kualitas SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program.

Data capaian indikator ini didapatkan melalui hasil Survey Kepuasan Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS dengan mengukur tingkat atribut kepuasan pengguna (user) peserta diklat atas hasil pelatihan/orientasi Diklat, yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan jабaran sebagai berikut:

No Atribut Pelayanan Pemanfaatan Hasil Penelitian KB dan KS

1. Terjadi peningkatan pengetahuan pada pegawai setelah mengikuti pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
2. Pegawai Bapak/Ibu mendapatkan jenis pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB sesuai dengan kebutuhan komponen
3. Materi pelatihan yang di dapat pegawai Bapak/Ibu dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB sesuai dengan kebutuhan komponen
4. Lama pelatihan yang diikuti pegawai Bapak/Ibu dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB tidak mengganggu rutinitas pekerjaan di komponen

KOFNITIF

5. Pegawai bersedia mensosialisasikan pelatihan yang telah diikuti dalam pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB

AFEKTIF

6. Terjadi peningkatan keterampilan pada pegawai setelah mengikuti pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
7. Terjadi peningkatan kinerja pegawai yang telah mengikuti pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
8. Setelah pegawai Bapak/Ibu mengikuti pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Bapak/Ibu mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diinginkan komponen
9. Pegawai dapat menyebarkan (*sharing*) hasil pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB yang diikuti kepada rekan kerja di dalam dan atau lintas komponen
10. Pegawai dapat mengimplementasikan *Plan of Action (PoA)* hasil dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB

PSIKOMOTORIK

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer

Survey tersebut telah dilaksanakan untuk mengukur capaian indikator kinerja peningkatan persentase kualitas SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM Peneliti, pada tahun 2018 survey tersebut tidak dilaksanakan sehingga angka capaian target tersebut untuk tahun 2018 tidak dapat disampaikan.

Namun bila ditinjau dari perbandingan target dan realisasi persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan serta menunjukkan tren peningkatan yaitu meningkat dari 81,47 persen pada tahun 2015 menjadi 85,12 persen pada tahun 2017, terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.41
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, Dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Dan Tenaga Fungsional	60 % SDM Aparatur	81,47%	135,78%	70 % SDM Aparatur	84,33%	120, 47%	80 % SDM Aparatur	85,12%	106,4%	90 % SDM Aparatur	-	-

Sumber: LAKIP Kedepuitan Latbang 2015 – 2018

Terkait perbandingan target dan realisasi pencapaian persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional tahun 2018 dengan target RPJMN Tahun 2019, tidak dapat disampaikan dikarenakan ketidaktersediaan data capaian indikator tersebut pada tahun 2018.

Namun apabila dibandingkan antara target dan realisasi pencapaian persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional tahun 2017 dengan target RPJMN Tahun 2019, maka indikator persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional belum mencapai target sebagaimana terlihat pada tabel terlampir:

Tabel 3.42
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Dan Tenaga Fungsional dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional	80 % SDM Aparatur	100 % SDM Aparatur	85,12 % SDM Aparatur	85,12 %

Sumber: LAKIP Kedepuitan Latbang 2015 – 2018

Tidak tercapainya indikator persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional dapat disebabkan antara lain :

- Posisi definitif Kepala Pusdiklat KKB belum terisi
- Terbatasnya SDM tenaga pengelola dalam penyelenggaraan Diklat
- Terbatasnya jumlah SDM tenaga fungsional widyaiswara Pusdiklat dikarenakan banyak yang sedang melaksanakan Tugas Belajar
- SOP Kediklatan masih dalam proses penyusunan
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Pusdiklat KKB dikarenakan pengelolaan masih berada pada kewenangan Biro Umum pada Sekretariat Utama
- Belum konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai AJK dikarenakan sebagian besar pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan mengikuti alokasi waktu mitra komponen kegiatan

Atas permasalahan pada capaian persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional yang belum mencapai target yang ditetapkan, maka telah dilakukan berbagai upaya antara lain:

- Posisi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB diisi oleh pejabat pelaksana tugas
- Melakukan analisis kebutuhan SDM dan mengajukan permintaan penambahan tenaga yang dibutuhkan
- Meningkatkan kompetensi tenaga pengelola program
- Melakukan kerjasama dengan mitra kerja terkait dan koordinasi lintas sektor
- Memberikan bantuan teknis untuk mengantisipasi kekurangan tenaga fungsional di Balatbang dan Balai Diklat
- Memperbaharui instrumen monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Diklat dan tindak lanjut pasca Diklat

- g. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Akreditasi Diklat Teknis dan Fungsional
- h. Memperkuat peran Tim Penjamin Mutu Diklat dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat, tindak lanjut pasca Diklat dan akreditasi Balatbang provinsi
- i. Melakukan optimalisasi kegiatan sesuai anggaran yang tersedia dan aturan yang berlaku
- j. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran sesuai Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) dan tertib administrasi

A.2.9 JUMLAH LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI

Kedeputan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan berkewajiban untuk memastikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan di lingkungan BKKBN telah memenuhi standar pelaksanaan pelatihan yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BKKBN baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi telah memenuhi standar yang ditetapkan, maka Pusdiklat KKB mulai pada tahun 2017 melaksanakan proses akreditasi Diklat Teknis dan Fungsional di lingkungan BKKBN.

Kewenangan Pusdiklat KKB dalam melaksanakan proses akreditasi didasari oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 393/K1/PDP.09/2016 tanggal 8 Desember 2016, yang telah menetapkan Pusdiklat KKB BKKBN sebagai Instansi Terakreditasi dan Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Penetapan tersebut diberikan atas prestasi Pusdiklat KKB BKKBN dalam memenuhi standar kualitas untuk 2 (dua) indikator penilaian yaitu unsur organisasi lembaga diklat; serta unsur program diklat dan pengelola program diklat. Untuk mengukur pencapaian hasil tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN yaitu meningkatnya jumlah lembaga diklat yang terakreditasi dengan capaian pada tabel terlampir.

Tabel 3.43
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018	1	8	800

Sumber: LAKIP Kedeputan Latbang 2018

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018 adalah tercapai sebesar 800 persen, yang merupakan hasil perbandingan dari realisasi 8 dengan target 1.

Capaian yang tinggi tersebut (800 persen) disebabkan bahwa sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018, terdapat peningkatan target pada IKU bidang dengan IKU yang sama yaitu dari target 1 menjadi 11 sehingga pelaksanaan kegiatan akreditasi ditujukan untuk mencapai 11 Lembaga Diklat.

Adapun perbandingan target dan realisasi persentase jumlah lembaga Diklat yang terakreditasi tahun 2018 dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.44
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018	1	1	100	1	1		1	13	1300	1	8	800

Sumber: LAKIP Kedeputian Latbang 2018

Terkait perbandingan target dan realisasi pencapaian persentase capaian kinerja Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi tahun 2018 dengan target RPJMN Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa indikator persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional telah mencapai target yang ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel terlampir:

Tabel 3.45
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi Tahun 2018	1	1	8	800

Sumber: LAKIP Kedeputian Latbang 2018

Namun terlepas dari tercapainya indikator persentase capaian kinerja Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi, Pusdiklat Kependudukan dan KB dihadapkan pada beberapa kendala terbatasnya tenaga SDM pengelola dan tenaga fungsional widyaiswara di Pusdiklat Kependudukan dan KB serta Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelatihan.

Pada tahun 2018 Pusdiklat Kependudukan dan KB memiliki widyaiswara berjumlah 11 (sebelas) orang, namun 5 (lima) diantaranya sedang melaksanakan tugas belajar. Sedangkan Pusdiklat Kependudukan dan KB juga diminta untuk memenuhi permohonan pendampingan widyaiswara ke Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi yang belum terakreditasi untuk membantu penyelenggaraan diklat dikarenakan terbatasnya tenaga widyaiswara di Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi.

Disisi lain, pada tingkat provinsi terdapat terdapat 4 (empat) Perwakilan BKKBN Provinsi yang tidak memiliki Widyaiswara yaitu Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur serta terdapat 5 (lima) Perwakilan BKKBN Provinsi yang belum memiliki Gedung Latbang yaitu Gorontalo, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Bangka Belitung.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2018 Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Biro Kepegawaian telah menyusun analisis beban kerja jabatan fungsional widyaiswara serta memfasilitasi proses inpassing ke jabatan fungsional widyaiswara, dan orasi ilmiah dalam rangka penjenjangan widyaiswara. Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana juga telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya peningkatan kompetensi widyaiswara dalam memfasilitasi pelatihan, seperti: *training of trainer*, *capacity building*, serta Konsolidasi Widyaiswara pada tahun 2018.

A.2.10 JUMLAH KERJASAMA BILATERAL DAN MULTILATERAL, LEMBAGA PENELITIAN DAN PERGURUAN TINGGI DALAM DAN LUAR NEGERI DI BIDANG KKBPK

Kerjasama bilateral dan multilateral yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri meliputi kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan program KKBPK, pendidikan jangka panjang dan jangka pendek serta kerjasama internasional di bidang Program KKBPK.

Tabel 3.46
Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK	3	29	966.67

Sumber: LAKIP Kedeputian Latbang 2018

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK adalah sebesar 966.67 persen, yang merupakan hasil perbandingan dari realisasi 29 dengan target 3.

Indikator Jumlah Kerjasama bilateral Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam Negeri di Bidang KKBPK dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain adalah :

- Pelaksanaan Identifikasi tema kerjasama kepada Lembaga penelitian dan perguruan tinggi
- Memberikan penawaran kerjasama penelitian kepada Lembaga penelitian dan perguruan tinggi
- Melakukan seleksi proposal penelitian yang diajukan oleh Lembaga penelitian dan perguruan tinggi
- Pemantauan dan Evaluasi proses pelaksanaan penelitian
- Penyajian hasil penelitian dan penerbitan publikasi berupa *Research Brief*

Adapun, perbandingan target dan realisasi jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.47
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%									
Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK	1	11	9.09	2	23	1150	2	42	2100	3	29	966.67

Sumber: LAKIP Kedeputian Latbang 2018

Tabel 3.48
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK Tahun 2018 Dengan Target RPJM Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Jumlah Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri di Bidang KKBPK	3	3	29	966.67

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2019 adalah sebesar 3, sedangkan jika diperbandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 29 maka persentase realisasi nya adalah sebesar 966,7 persen

A.2.11 INDEKS KEPUASAN HASIL DIKLAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KB, KS DAN KEPENDUDUKAN KKBPK

Sasaran Program (*outcome*) Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN, yaitu meningkatnya Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS, dan Kependudukan KKBPK.

A.2.11.1 INDEKS KEPUASAN HASIL DIKLAT NASIONAL

Data capaian indikator ini didapatkan melalui hasil Survey Kepuasan Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS dengan mengukur nilai indeks kepuasan user/pengguna peserta diklat atas hasil pelatihan/ orientasi diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan perhitungan *Customer Satisfaction Index* (CSI) yang dibandingkan dengan indeks kepuasan sesuai target Renstra BKKBN 2015-2019.

Tabel.3.49
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK	3,3 (Skala 1 -4)	3,1	93,94 %

Sumber: Lakip PULAP 2018

Survey tersebut telah dilaksanakan untuk mengukur capaian indikator kinerja peningkatan Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

Survey tersebut telah dilaksanakan untuk mengukur capaian indikator kinerja peningkatan Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM Peneliti, pada tahun 2018 survey tersebut tidak dilaksanakan sehingga angka capaian target tersebut untuk tahun 2018 tidak dapat disampaikan. Namun bila ditinjau dari perbandingan target dan realisasi Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan serta menunjukkan trend peningkatan yaitu meningkat dari 3,07 pada tahun 2015 menjadi 3,1 pada tahun 2017, terlihat pada table dibawah ini.

Atas permasalahan pada capaian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional yang belum mencapai target yang ditetapkan, maka telah dilakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Melakukan analisis kebutuhan SDM pengelola dan analisis beban kerja jabatan fungsional widyaiswara dan mengajukan permintaan penambahan tenaga yang dibutuhkan
- b. Memperkuat peran Tim Penjamin Mutu Diklat dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat, tindak lanjut pasca Diklat dan akreditasi Balatbang provinsi
- c. Meningkatkan kompetensi tenaga pengelola program dan tenaga pengajar widyaiswara
- d. Memberikan bantuan teknis untuk mengantisipasi kekurangan tenaga fungsional di Balatbang dan Balai Diklat
- e. Melakukan kerjasama dengan mitra kerja terkait dan koordinasi lintas sektor
- f. Memperbaharui instrumen monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Diklat dan tindak lanjut pasca Diklat
- g. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Akreditasi Diklat Teknis dan Fungsional
- h. Melakukan optimalisasi kegiatan sesuai anggaran yang tersedia dan aturan yang berlaku
- i. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran sesuai Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) dan tertib administrasi

Indikator Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional yang belum mencapai target dapat disebabkan antara lain:

- a. Terbatasnya SDM tenaga pengelola dan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan Diklat
- b. SOP Kediklatan masih dalam proses penyusunan
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dikarenakan pengelolaan masih berada pada kewenangan Sekretariat Utama
- d. Belum konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai AJK dikarenakan sebagian besar pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan mengikuti alokasi waktu mitra komponen kegiatan

Adapun, perbandingan target dan realisasi indeks kepuasan hasil diklat nasional dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.50
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional
Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional	3 (Skala 1-4)	3,07	102	3,1 (Skala 1-4)	3,14	101	3,2 (Skala 1-4)	3,1	96,8	3,3 (Skala 1-4)	-	-

Sumber: Lakip PULAP 2018

Terkait perbandingan target dan realisasi pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional tahun 2018 dengan target RPJMN Tahun 2019, tidak dapat disampaikan dikarenakan ketidakterdediaan data capaian indikator tersebut pada tahun 2018.

Namun apabila dibandingkan antara target dan realisasi pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional tahun 2017 dengan target RPJMN Tahun 2019, maka indikator persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional belum mencapai target sebagaimana terlihat pada tabel terlampir:

Tabel 3.51
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional Tahun 2017 dengan Target RPJM Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2017	Persentase Realisasi 2017 dibanding Target 2019
	2017	2019		
Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional	3,2 (Skala 1-4)	3,4 (Skala 1-4)	3,1 (Skala 1-4)	91,18

Sumber: Lakip PULAP 2018

Berdasarkan tabel di atas, menggunakan data tahun 2017 dikarenakan, pada tahun 2018 tidak dilakukan survai indeks kepuasan hasil diklat nasional. Oleh karena itu diperbandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan target tahun 2017 adalah sebesar 3,2 dan realisasi tahun 2017 sebesar 3,1. Target tahun 2019 adalah sebesar 3,4 dari skala 1-4, maka persentase realisasi 2017 dibanding target tahun 2019 adalah sebesar 91,18 persen.

A.2.11.2 INDEKS KEPUASAN PIMPINAN TERHADAP PESERTA YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN JANGKA PENDEK DI LN

Data capaian indikator ini didapatkan melalui hasil Survey Kepuasan Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS dengan mengukur nilai indeks kepuasan pimpinan terhadap peserta yang mengikuti pendidikan jangka pendek Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional.

Tabel.3.52
Perbandingan Target dan Realisasi
Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap peserta yang mengikuti pendidikan jangka pendek di LN
hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK	3,3 (Skala 1 -4)	3,1	93,94 %

Sumber: Lakip PULIN 2018

Survey tersebut telah dilaksanakan untuk mengukur capaian indikator kinerja peningkatan Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di Luar Negeri pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM Peneliti, pada tahun 2018 survey tersebut tidak dilaksanakan sehingga angka capaian target tersebut untuk tahun 2018 tidak dapat disampaikan. Namun bila ditinjau dari perbandingan target dan realisasi Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan namun terdapat penurunan yaitu dari 3,2 pada tahun 2015 menjadi 3,1 pada tahun 2017, terlihat pada tabel dibawah ini.

“
 Sasaran Program (outcome) Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK.
 ”

Tabel 3.53
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS Dan Kependudukan KKBPK Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek Luar Negeri	3 (Skala 1 -4)	3,2	106	3,1 (Skala 1 -4)	3,1	100	3,2 (Skala 1 -4)	3,1	96,87	3,3 (Skala 1 -4)	-	-

Terkait perbandingan target dan realisasi pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional tahun 2018 dengan target RPJMN Tahun 2019, tidak dapat disampaikan dikarenakan ketidaktersediaan data capaian indikator tersebut pada tahun 2018.

Pada Indikator Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yang Mengikuti Pendidikan Jangka Pendek di Luar Negeri yang belum mencapai target dapat disebabkan antara lain;

1. Terbatasnya pendidikan jangka pendek luar negeri yang menawarkan substansi pelatihan sesuai yang dibutuhkan oleh BKKBN dalam meningkatkan kapasitas pegawai untuk mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana
2. Masih kurangnya kapasitas keterampilan berbahasa inggris peserta yang mengikuti pendidikan jangka pendek luar negeri serta ketidak sesuaian substansi pelatihan yang diikuti dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari;

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka langkah-langkah antisipatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mapping kegiatan jangka pendek luar negeri dengan melibatkan mitra BKKBN pada awal tahun serta melakukan berbagai jaringan kerja sama dengan mitra kerja nasional dan international development partners untuk pelaksanaan pelatihan dan kerja sama internasional;
2. Melakukan analisis kebutuhan SDM dan mengajukan permintaan pegawai yang dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan jangka pendek luar negeri serta mengikatkan kapasitas keterampilan berbahasa Inggris;

A.2.11.3 INDEKS KEPUASAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN KKBPK

Sasaran Program (*outcome*) Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN.

Tabel.3.54
Perbandingan Target dan Realisasi
Indeks Kepuasan hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK	3,3 (Skala 1 -4)	3,1	93,94 %

Sumber: Lakip PUSDU 2018

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari LAKIP Kedepuitan Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) Tahun 2018, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 realisasi indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK sebesar 3,1 dari target 3,3 dengan skala 1-4 dan persentase capaian untuk indikator kinerja program ini sebesar 93,94 %

Adapun, perbandingan target dan realisasi indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.55
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS Dan Kependudukan KKBPK	3 (Skala 1 -4)	2,94	98	3,1 (Skala 1 -4)	2,95	95,16	3,2 (Skala 1 -4)	2,99	93,44	3,3 (Skala 1 -4)	3,1	93,94

Tabel 3.56
Perbandingan Target dan Realisasi

Pencapaian Indeks Kepuasan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK Tahun 2018 Dengan Target RPJM Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS Dan Kependudukan KKBPK	3,3 (Skala 1 -4)	3,4 (Skala 1 -4)	3,1 (Skala 1 -4)	91,18

Indikator Indeks Kepuasan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK yang belum mencapai target dapat disebabkan atas permasalahan antara lain :

1. Data yang disediakan oleh Puslitbang Kependudukan tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan pengguna (*user*) khususnya ditingkat Kabupaten/Kota.
2. Diseminasi hasil penelitian belum bisa menjangkau seluruh stakeholder dan mitra kerja.
3. Keterbatasan dari variabel yang dikumpulkan sehingga tidak bisa memenuhi seluruh harapan stakeholder.
4. Sulitnya mengakses hasil-hasil penelitian yang ada di CIS BKKBN (<https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?p=13>) dan hasil SDKI pada website SDKI sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian.

A.2.11.4 INDEKS KEPUASAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Indikator tingkat kepuasan pengguna (*user*) terhadap hasil penelitian bertujuan untuk mengukur kepuasan stakeholder dan unit kerja (komponen) terhadap hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS. Perhitungan skala kepuasan dilakukan melalui survei indeks kepuasan pelayanan Puslitbang KB dan KS berdasarkan persepsi pelanggan pada masing-masing tingkat harapan dan kenyataan dari tiga aspek layanan yang meliputi aspek pelayanan data dan informasi hasil penelitian, kualitas penelitian dan pengembangan serta aspek penyajian hasil penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Puslitbang KB dan KS. Indeks diperoleh melalui survei kepuasan pelayanan Puslitbang KB dan KS dimana dasar perhitungan menggunakan *Customer Satisfaction Index (CSI)*.

Tabel 3.57
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan Di Provinsi Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KKBPK	3,2 (Skala 1 -4)	3,09	96,6 %

Sumber: Lakip PUSNA 2018

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018, Indeks kepuasan hasil penelitian KB dan KS dengan target skala 3,2 dari skala 1-4), terealisasi dengan skala 3,09 (96,6 persen), maka nilai kepuasan pelanggan/user terhadap hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain:

1. Penetapan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
2. Kerjasama penelitian dengan melibatkan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta se-Indonesia dan mengharuskan hasil penelitian dari Mitra Kerja Penelitian dan Pengembangan KB dan KS tersebut dipublikasikan ke Jurnal Ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional.
3. Kerjasama dengan para pakar dalam pembahasan metodologi penelitian.

Tabel 3.58
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS Dan Kependudukan KKBPK	3 (Skala 1 -4)	2.94	98	3,1 (Skala 1 -4)	2.97	95.8	3,2 (Skala 1 -4)	3.03	94.6	3,3 (Skala 1 -4)	3.09	96.6

Tabel 3.59
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Indeks Kepuasan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2018 Dengan Target RPJM Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Indeks Kepuasan Hasil Diklat Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengembangan KB, KS Dan Kependudukan KKBPK	3,3 (Skala 1 -4)	3,4 (Skala 1 -4)	3,09 (Skala 1 -4)	90.88

A.2.12 JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI

Tabel 3.60
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan Di Provinsi Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan Di Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100

Sumber : LAKIP Kedeputian Latbang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari lakip kedeputian pelatihan dan pengembangan (latbang) tahun 2018, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 realisasi jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi sebesar 34 provinsi dari target 34 provinsi, dari hasil tersebut maka diperoleh persentase capaian kinerjanya sebesar 100 persen .

Adapun, perbandingan target dan realisasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.61
Perbandingan Target dan Realisasi pencapaian jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi Tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%									
Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi	33 prov	33 prov	100	34 prov	34 prov	100	34 prov	34 prov	100	34 prov	34 prov	100

Tabel 3.62
Perbandingan Target Dan Realisasi Pencapaian Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan Di Provinsi Tahun 2018 Dengan Target Akhir Tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi	34 prov	34 prov	34 prov	100 %

Indikator jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100 persen.

A.2.13 JUMLAH PRODUK HUKUM DAN KEBIJAKAN YANG DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGUATAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB adalah jumlah Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.63
Perbandingan Target dan Realisasi
Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	2	200 %

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2018

Dilihat dari tabel tersebut, maka persentase capaian kinerja jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB adalah sebesar 200 persen.

Indikator Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang telah dilakukan agar dapat tercapai target yang diharapkan adalah :

1. Fasilitasi penyusunan Regulasi/ Kebijakan dan materi hukum, organisasi dan humas. Capaian target Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :
 - a) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
 - b) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, Tentang Organisasi Profesi Penyuluh Keluarga Berencana.
2. Pembinaan dan fasilitasi kehumasan BKKBN
 - a) Melaksanakan fasilitasi kegiatan kehumasan tentang Program Pembangunan KKB melalui jejaring kehumasan, diharapkan terbentuk citra dan persepsi positif mengenai program KKBPK dan instansi BKKBN Pusat.
 - b) Kunjungan Dapur Redaksi Sepanjang tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan karena padatnya jadwal Pimpinan BKKBN dan pimpinan media masing-masing. Sehingga beberapa kali dijadwalkan untuk kunjungan dapur redaksi, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena pimpinan harus hadir pada pertemuan-pertemuan lainnya yang mendesak seperti Rapat dengan Presiden, DPR, dan Menko PMK.
 - c) Dalam membentuk citra dan persepsi mengenai program KKBPK dan instansi BKKBN melalui pemberitaan selama tahun 2018 sebanyak 4259 (empat ribu dua ratus lima puluh sembilan) dengan rincian pemberitaan melalui media cetak sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) dan online sebanyak 3924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat). Dengan rincian berita positif sebanyak 2418 (dua ribu empat ratus delapan belas) berita, berita netral sebanyak 800 (delapan ratus) berita, dan berita negatif sebanyak 41 (empat puluh satu) berita.
3. Pembinaan dan fasilitasi Kasus Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembinaan dan fasilitasi kasus hukum:

 - a) Fasilitasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 2521/G/2018/PTUN-JKT.
 - b) Fasilitasi kasus tanah di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta Timur dan Jawa Tengah.

- c) Fasilitasi kasus Disiplin PNS di BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Barat.
4. Monitoring, evaluasi dan pembinaan kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB di daerah Target dalam indikator kinerja pada jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB di daerah adalah:
- Fasilitasi penguatan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 - Pembinaan dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan.
 - Monitoring dan Evaluasi/ uji peraturan perundang-undangan.
 - Pembinaan Kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB di daerah.
 - Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan tatalaksana, sehingga dapat memberikan informasi secara lengkap dan akurat kepada pengelola serta para pengambil kebijakan, stakeholder dan mitra kerja program pengendalian penduduk dan KB.

Adapun, perbandingan target dan realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.64
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan kb	4	-	-	1	-	-	1	8	800 %	1	2	200 %

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2018

Tabel 3.65
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produk Hukum dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018 dengan Target RPJMN Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Jumlah Produk Hukum Dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Dan KB	1	1	2	200 %

Seperti yang telah tersebut di atas, bahwa Indikator jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB pada tabel di atas dapat dilihat hasil persentase perbandingan target tahun 2019 dengan realisasi tahun 2018 sebesar 200 persen.

A.2.14 TINGKAT OPINI LAPORAN KEUANGAN OLEH BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.66
Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Opini Laporan Keuangan Oleh BPK Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	Tercapai

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2018

Realisasi penilaian kinerja didapatkan dari hasil opini penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2017 dikarenakan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2018 baru selesai disusun pada Bulan Februari 2019 dan akan diberikan opini penilaian oleh BPK pada Bulan Mei – Juni tahun 2019.

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, dimana capaian indikator kinerja ini sudah tercapai karena Laporan Keuangan Tahun 2017 sudah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tabel 3.67
Perbandingan Target Dan Realisasi
Tingkat Opini Laporan Keuangan Oleh BPK Tahun 2018 Dengan Tahun 2015, 2016, Dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WDP	-	WTP	WDP	-	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama

Tabel 3.68
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK
Tahun 2018 Dengan Target RPJM Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	100 % (Tercapai)

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2018

Seperti yang telah tersebut di atas, bahwa Indikator Tingkat Opini Laporan Keuangan oleh BPK untuk laporan keuangan tahun 2018 belum keluar hasilnya dari BPK. Selama tahun 2018, adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain adalah :

1. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang didukung dengan kegiatan seperti Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker (Semesteran) dan Reviu Laporan Keuangan Satker serta peningkatan kapasitas petugas penyusun laporan keuangan;
2. Penyusun laporan BMN yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kegiatan rekonsiliasi antara BKKBN dnegan DJKN setiap semesteran dan tahunan;
3. Kecukupan pengungkapan di dalam LKTahun 2017 dari sisi neraca laporan keuangan;
4. Berkurangnya selisih pencatatan transfer masuk dan transfer keluar atas barang persediaan yang disajikan pada LKTahun 2017 menjadi sebesar kurang lebih Rp 10.750.000,-.

A.2.15 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN YANG MENGACU PADA PENDEKATAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH, PENGANGGARAN TERPADU DAN BERBASIS KINERJA

Perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja. Tercapaiannya indikator ini salah satunya didukung oleh terjalinnya koordinasi yang baik dengan perencana komponen baik di pusat maupun provinsi, sehingga dapat tersusunnya perencanaan program dan anggaran dalam RENJA-K/L dan RKAK-K/L yang telah mengacu pada kebijakan perencanaan *money follow* program melalui pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang holistik, integrative, tematik, dan spasial.

Tabel 3.69
Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran
Terpadu dan Berbasis Kinerja Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu Dan Berbasis Kinerja	3	5	166,7

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2018

Pada tabel di atas, persentase capaian kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja tahun 2018 adalah sebesar 166,7 dari hasil perbandingan target dengan realisasi. Kelima dokumen perencanaan tersebut yaitu :

- 1) Dokumen SPA tahun 2019 terselesaikan pada kegiatan KOREN II T.A. 2019;
- 2) Dokumen RKP/RENJA K/L TA.2019 terselesaikan pada kegiatan KOREN II T.A 2019;
- 3) Dokumen RKA-KL TA.2019 terselesaikan pada kegiatan KOREN II T.A 2019;
- 4) Dokumen pedoman Harga Pokok Satuan Stnadar (HSPK) Tahun 2019 terselesaikan sebelum KOREN I TA. 2019;
- 5) Dokumen *Background Study* Penyusunan RPJMN 2020-2024 yang telah diselesaikan pada Bulan Desember 2018.

Penyusunan dokumen *Background Study* berkaitan dengan akan disusunnya RPJMN dan RENSTRA BKKBN periode 2020 – 2024, Biro Perencanaan telah menyusun *Background Study* sebagai langkah awal dalam menyusun rancangan RPJMN.

Adapun, perbandingan target dan realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.70

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Yang Mengacu pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Berbasis Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokumen Perencanaan Program Dan Anggaran Yang Mengacu Pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu Dan Berbasis Kinerja	3	4	133.33	3	5	166.7	3	4	133.33	3	5	166,7

Sumber: LAKIP Biro Perencanaan

Tabel 3.71

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Peserta KB Baru (PB) Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Jumlah Dokumen Perencanaan Program Dan Anggaran Yang Mengacu Pada Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu Dan Berbasis Kinerja	3	5	5	100

Berdasarkan tabel di atas, target tahun 2018 adalah sebesar 3 dengan capaian realisasi sebesar 5 dokumen. Persentase target tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 adalah sebesar 100 persen.

A.2.16 PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN KARIR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG KOMPETENSINYA SESUAI DENGAN STANDAR (SESUAI ROADMAP)

Sumber daya manusi merupakan aset utama dan mempunyai peranan yang penting untuk kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi maupun kompetensi setiap pegawai ASN dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Sebagai cara untuk mengukur kompetensi pegawai di lingkungan BKKBN adalah melalui Assesment Center, yaitu suatu metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggungjawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria standar kompetensi dalam jabatan tersebut.

Tabel 3.72
Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap) Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap)	60% Pengembangan SDM	60% Pengembangan SDM	100 %

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2018

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi dengan target kinerja terlaksananya pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap) diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 100 persen dimana tercapainya 60 persen pengembangan SDM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun, perbandingan target dan realisasi terlaksananya pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut pada tahun 2017 dan 2018 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.73
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap) Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai roadmap)Kependudukan KKBPK	52% Pengembangan SDM			55 % Pengembangan SDM	53.23 %	96.78 %	57 % Pengembangan SDM	57.98 %	101.5 %	60% Pengembangan SDM	60% Pengembangan SDM	100

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama

Pada tabel diatas menunjukkan pencapaian target selama 4 (empat) tahun berturut-turut, indikator kinerja persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap). Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 dan 2018 persentase capaian lebih dari sama dengan 100 persen.

Tabel 3.74
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai *roadmap*) Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai <i>roadmap</i>)	60% Pengembangan SDM	63% Pengembangan SDM	60% Pengembangan SDM	95,24 %

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target 2019 pada Indikator persentase Terlaksananya Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompetensinya Sesuai Dengan Standar (sesuai *roadmap*) adalah sebesar 95,24 persen.

A.2.17 INDEKS KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, KERUMAHTANGGAAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

Dalam suatu Kementerian/Lembaga dibutuhkan pelayanan administrasi perkantoran kerumatanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran untuk menunjang kinerja program. Oleh sebab itu, maka perlu adanya tolak ukur yang jelas dalam bentuk survei indeks kepuasan terkait penilaian indikator dimaksud.

Tabel 3.75
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	4	3,14	78,5

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2018

Realisasi penilaian kinerja didapatkan dari hasil survei kepuasan pelayanan yang merupakan kerjasama antara Biro Umum dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS (PUSNA). Secara kumulatif target capaian kinerja Biro Umum tahun 2018 belum sesuai dengan target yang telah di tuangkan dalam Renstra 2015 – 2019 yaitu harus mencapai 4 (sangat puas) dari skala 1 – 4 sedangkan realisasi tercapai 3,14 atau 78,5 persen yang artinya seluruh pimpinan dan pegawai BKKBN merasa puas terhadap layanan di Biro Umum

Adapun, perbandingan target dan realisasi terlaksananya indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran kerumatanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran untuk menunjang kinerja program dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.76
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	3 (skala 1-4)			3 (skala 1-4)	3,00	100	3 (skala 1-4)	2,87	95,6	4 (skala 1-4)	3,14	78,5

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2015 - 2018

Tabel 3.77
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	4 (skala 1-4)	4 (skala 1-4)	3,14	78,5

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang belum mencapai target dapat disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten;
- b. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran yang sesuai dengan perkembangan teknologi;
- d. Kurangnya tenaga arsiparis.

Atas permasalahan pada pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang belum mencapai target yang ditetapkan, maka telah dilakukan berbagai upaya antara lain:

1) Pengelolaan Administrasi Umum

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran seperti pelayanan pada sekretaris pimpinan, pengembangan tata kearsipan, pelayanan persuratan yang dilaksanakan dengan optimal.

2) Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang cepat dan tepat. Penyelenggaraan pada pelayanan administrasi kerumahtanggaan seperti pelaksanaan

- pembayaran gaji, tunjangan dan remunerasi serta pelayanan pimpinan dan tamu pimpinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan petugas protokol dan keamanan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari perkantoran dalam mendukung program perlu adanya penyediaan sarana prasarana yang maksimal serta berkualitas, sehingga output yang dicapai akan lebih optimal.

A.2.18 JUMLAH DUKUNGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB SERTA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI PROVINSI

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki Kantor Perwakilan di Provinsi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya indikator kinerja program terkait jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja.

Tabel 3.78

Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov	34 prov	100

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2018

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase capaian jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi adalah sebesar 100 persen. Sekretaris Utama telah melakukan fasilitasi dukungan manajemen di semua lini di tingkat provinsi.

Indikator Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi yang telah mencapai target. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target tersebut antara lain :

1. Fasilitasi dukungan manajemen terkait perencanaan program dan anggaran, yaitu tersedianya dokumen RKAK/L di semua provinsi.
Sudah terdokumentasi dokumen RKAK/L setiap provinsi dalam rangka pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat provinsi.
2. Fasilitasi dukungan manajemen terkait usulan revisi anggaran dari semua provinsi
Sudah terdokumentasi usulan revisi dan persetujuan kepada provinsi yang melakukan revisi.

Adapun, perbandingan target dan realisasi jumlah dukungan manajemen pengelolaan program kependudukan KB dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.79
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%									
Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	33 prov	33 prov	100	34 prov	34 prov	100	34 prov	34 prov	100	34 prov	34 prov	100

Sumber: LAKIP Sekretaris Utama 2017 - 2018

Tabel 3.80
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Tahun 2018 dengan Target akhir tahun RPJMN 2015 - 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Jumlah Dukungan Manajemen Pengelolaan Program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov	34 prov	34 prov	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari target tahun 2018 adalah sebesar 34 provinsi dengan realisasi sebanyak 34 provinsi. Persentase perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target tahun 2019 adalah sebesar 100 persen.

A.2.19 PERSENTASE TEMUAN PENYIMPANGAN STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK OLEH EKSTERNAL AUDIT

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki Kantor Perwakilan di Provinsi seluruh Indonesia. Dalam pengelolaan program KKBPK, BKKBN menggunakan APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Penggunaan APBN tersebut, setiap tahunnya dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghasilkan opini laporan keuangan. Pada tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 dengan wilayah uji petik pada seluruh satuan kerja di BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten dengan total anggaran sebesar Rp.1.301.804.041.000,00. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK nomor: 70A/HP/XVI/05/2018 tanggal 8 Mei 2018, nilai temuan pemeriksaan senilai Rp.1.584.196.048,00. Perhitungan persentase temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{\% temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK Oleh Eksternal Audit} \\
 & = \frac{\text{temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018}}{\text{Jumlah Pagu Satker wilayah uji petik BPK}} \times 100\% \\
 & = \frac{\text{Rp.1.584.196.048,00}}{\text{Rp.1.301.804.041.000,00}} \times 100\% \\
 & = 0,12\%
 \end{aligned}$$

Sehingga capaian indikator persentase temuan penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.81
Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit	5 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0,12 %	4166,67

Sumber: LAKIP Inspektorat Utama BKKBN 2018

Pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja dari temua penyimpangan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan program KKBPK oleh eksternal audit sebesar 0,12% atau 4.166,67% dari target yang ditetapkan sebesar 5%.

Adapun, perbandingan target dan realisasi Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.82
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit	25 %	0,024%	104,87%	15 % (dari satker yang diaudit eksternal)	8,25 %	181,8	10 % (dari satker yang diaudit eksternal)	1,02%	980,39	5 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0,12 %	4166,67

Sumber: LAKIP Inspektorat Utama BKKBN 2015 - 2018

Jika dibandingkan dengan target 2019, realisasi sampai dengan 2018 menunjukkan tren positif untuk dapat mencapai target pada tahun 2019 Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit sebesar 0%.

Tabel 3.83
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan
Program KKBPK Oleh Eksternal Audit Tahun 2018 Dengan Target RPJM Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK Oleh Eksternal Audit	5 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0,12%	∞

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan temuan penyimpangan strategis oleh eksternal audit antara lain:

- Seluruh satuan kerja di lingkungan BKKBN telah meningkatkan efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Tim Inspektorat Utama dengan unit kerja terkait cukup efektif menjadi *counterpart* dan pendampingan selama pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, sehingga temuan pemeriksaan dapat dikonfirmasi dan diklarifikasi secara cepat dan memadai.
- Inspektorat Utama telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan mempertimbangkan temuan BPK sebagai salah satunya faktor yang diukur dalam menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang memiliki tujuan *quality assurance*.

Untuk mencapai target pada tahun 2019 akan dilaksanakan

- Percepatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN sampai dengan tingkat satuan kerja,
- Meningkatkan pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan melalui kegiatan *quality assurance* diantaranya reviu atas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu atas Laporan Keuangan dan audit berbasis risiko

A.2.20 JUMLAH PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DI SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki Kantor Perwakilan di Provinsi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker BKKBN Provinsi. Dalam tahun 2018, Inspektorat Utama telah melaksanakan kegiatan pengawasan pada Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2018. Inspektur Utama telah menerbitkan 33 Laporan Hasil Audit (LHA) pada 33 satker Perwakilan BKKBN Provinsi. Pada Provinsi Kalimantan Utara belum dibentuk Perwakilan BKKBN Provinsi secara mandiri, melainkan masih tergabung dalam Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga pada LHA Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dapat mewakili provinsi Kalimantan Utara. Capaian indikator Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.84
Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2018

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi	34 provinsi	34 provinsi	100

Sumber: LAKIP Inspektorat Utama BKKBN 2018

Pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker perwakilan BKKBN Provinsi sebesar 100%.

Adapun, perbandingan target dan realisasi Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa target indikator program tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.85
Perbandingan Target dan Realisasi
Pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2018 dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

IKP	2015			2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	%									
Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi	33 provinsi	33 provinsi	100	33 provinsi	33 provinsi	100	34 provinsi	34 provinsi	100	34 provinsi	34 provinsi	100

Sumber: LAKIP Inspektorat Utama BKKBN 2015-2018

Jika dibandingkan dengan target 2019, realisasi sampai dengan tahun 2018 untuk pengawasan pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi. Kegiatan pengawasan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur tetap dilakukan dengan memperhatikan kegiatan yang diperuntukkan untuk Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.86
Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Jumlah Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2018 Dengan Target RPJM
Tahun 2019

IKU	Target		Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2019
	2018	2019		
Jumlah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	100

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Satker Perwakilan BKKBN Provinsi antara lain:

- Melaksanakan audit kinerja/operasional/keuangan pada seluruh satker di Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat sesuai target dalam PKPT 2018.
- Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas aparatur melalui sosialisasi/bimbingan teknis terkait penyelenggaraan SPIP, Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk mencapai target pada tahun 2019 akan dilaksanakan

- Inspektorat Utama menyusun PKPT tahun 2019 dengan memprioritaskan pelaksanaan audit pada satker BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi,
- Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan PKPT tahun 2019

A.3 CAPAIAN KINERJA OUTPUT PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Tabel 3.87
Capaian Kinerja Output Proyek Prioritas Nasional

NO	KODE	SASARAN PROYEK PRIORITAS	PENANGGUNG ESELON II	OUTPUT PROYEK PRIORITAS	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3312010	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan internasional Kependudukan dan KB dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan	Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional bidang Kependudukan dan KB (PULIN)	SDM aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pelatihan internasional dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan	Orang	105	117	111,43
2	3313022	Meningkatnya Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam promosi dan KIE program KKBPK melalui Media	Direktorat Advokasi dan KIE (DITVOKOM)	Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam promosi dan KIE program KKBPK melalui Media	Media	40	40	100%
3	3313023	Meningkatnya Penguatan advokasi program KKBPK bagi stakeholder dan mitra kerja	Direktorat Advokasi dan KIE (DITVOKOM)	Penguatan komitmen dan dukungan stakeholder/ pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota	Stakeholder	421	257	76,72%
4	3316020	Terlaksanannya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes (DKI)	Direktorat Bina Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM)	Pemenuhan Ketersediaan Alokon	Faskes	546	537	98,35
5	3318029	Meningkatnya Kinerja Tenaga Lini Lapangan	Direktorat Bina Lapangan (DITBINLAP)	Peningkatan Kinerja Tenaga Lini Lapangan	PKB/PLKB	10.746	10.812	100,61
6	3331079	Meningkatnya penggerak pelayan MKJP	Direktorat Bina Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM)	Peningkatan Penggerak KB MKJP	Peserta KB	1.829.788	1.151.419	62,93
7	3331080	Terlaksanannya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes (Provinsi)	Direktorat Bina Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM)	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes	Faskes	19.427	19.508	100,42

NO	KODE	SASARAN PROYEK PRIORITAS	PENANGGUNG ESELON II	OUTPUT PROYEK PRIORITAS	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	3331081	Meningkatnya Promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	Direktorat Bina keluarga Balita dan Anak (DITBALNAK)	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	Keluarga	2.353.789	1.346.707	57,21
9	3331082	Meningkatnya Promosi dan Penguatan Keluarga Lansia dan Lansia melalui BKL	Direktorat Bina Keluarga Lansia dan Rentan (DITHANLAN)	Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia melalui BKL	Keluarga	1.467.662	1.715.827	116,91
10	3331083	Meningkatnya Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	Direktorat Bina Lini Lapangan (DITBINLAP)	Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK oleh PKB/ PLKB dan PPKBD/ Sub PPKBD	Gerak/ Tahun	5	153	3.060,00
11	3331084	Meningkatnya penguatan dan pengembangan Kampung KB	Direktorat Bina Lini Lapangan (DITBINLAP)	Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB	Desa	6.727	6.915	102,79

A.3.1 MENINGKATNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNASIONAL KEPENDUDUKAN DAN KB DALAM KERANGKA KERJA SAMA SELATAN SELATAN

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia memiliki program yang tertuang dalam RKP untuk mendukung Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai Pro Prioritas Nasional. BKKBN merupakan salah satu instansi yang melaksanakan Pro Prioritas Nasional, sebagai implementing agency dalam bidang Kependudukan dan KB yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun menyelenggarakan berbagi pengalaman dengan negara-negara di benua Asia dan Afrika dalam rangka Kerja Sama Selatan-Selatan. Pulin sebagai komponen pelaksana kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan Pro Prioritas Nasional tersebut. Output yang ditargetkan dalam kegiatan Pro Prioritas Nasional adalah jumlah SDM aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pelatihan internasional dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan. Di tahun 2018, pencapaian target peserta pelatihan internasional adalah sebesar 117 peserta dari 105 peserta yang ditargetkan. Pelatihan Internasional yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. *Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders (MRLs)*, di Yogyakarta pada 23-28 April 2018;
2. *The Training Course on Public Private Partnership on FP Services Interventions*, di DKI Jakarta pada 16-20 April 2018;
3. *Study Visit on Public and Private Partnership on Family Planning by Ministry of Health of Bangladesh*, di DKI Jakarta pada 19 Juli 2018;
4. *COE UGM - Training on Comprehensive Right Based FP Services*, di Yogyakarta, pada 2-22 September 2018;
5. *Short Study Visit on Kampung KB*, di Bali pada 18-20 Desember 2018.
6. *Workshop on Writing for Academic Journals*, di Malang, Jawa Timur, 11-14 November 2018;
7. *International Training on Knowledge Sharing Program for Autonomous Region Muslim Mindanao*, di Palembang, Sumatera Selatan, 18-24 November 2018;
8. *Workshop Bridging Leadership*, di Malang, Jawa Timur, 25-29 November 2018;
9. *OST on Family Planning and Reproductive Health Program for General Office for Population and Family Planning Vietnam Delegation*, di Bali, 10-15 Desember.

Program OST ini bertujuan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan berbasis pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia.

A.3.2 MENINGKATNYA PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA

Tabel 3.88
Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Tahun 2018

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam promosi dan KIE program KKBPK melalui Media	40	40	100%

Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam dan KIE program KKBPK melalui Media bertujuan untuk: (1) meningkatkan komitmen stakeholders dan mitra kerja dalam Program KKBPK; (2) meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat, keluarga, PUS, WUS, dan remaja tentang Program KKBPK; dan (3) memberikan pelayanan informasi dan KIE untuk memenuhi kebutuhan sasaran Program KKBPK.

Jumlah media yang dimanfaatkan untuk Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam promosi dan KIE program KKBPK melalui Media sesuai target sebanyak 40 terealisasi 40 media (100 persen) Jenis media yang dimanfaatkan untuk menginformasikan Program KKBPK yaitu : media massa cetak dan elektronik, media luar ruang, media printing, pameran, merchandise, media tradisional budaya dan Mobil unit penerangan KB.

A.3.3 MENINGKATNYA PENGUATAN ADVOKASI PROGRAM KKBPK BAGI STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA

Tabel 3.89
Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Penguatan Advokasi Program KKBPK bagi Stakeholder dan Mitra Kerja

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Penguatan komitmen dan dukungan stakeholder/pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota	421	257	76,72

Penguatan komitmen dan dukungan stakeholder/pemangku kepentingan dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen dan dukungan stakeholder/pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program KKBPK, melalui pembentukan dan pengembangan tim pokja advokasi dan KIE di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam hal ini melibatkan kementerian/lembaga, dinas/Badan terkait dalam penggarapan program KKBPK sesuai segmentasi wilayah sasaran.

Dari target 421 Penguatan komitmen dan dukungan stakeholder/pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang terealisasi 257 Stakeholder (76,72), dengan rincian capaian sebagai berikut : Kementerian/Lembaga : 32 Stakeholder, Pemerintah Daerah tingkat provinsi : 34 Stakeholder dan pemerintah kabupaten dan kota 190 Stakeholder.

Tidak terealisasinya target capaian tersebut dikarenakan belum semua kabupaten dan kota membentuk dan mengembangkan tim pokja advokasi dan KIE di wilayahnya dalam penggarapan program KKBPK, serta sulitnya menentukan jadwal pertemuan/audiensi bersama secara keseluruhan/full tim.

Selanjutnya tim pokja advokasi tingkat pusat dan provinsi segera mengadvokasi pemerintah kabupaten

dan kota agar membentuk dan mengembangkan tim pokja advokasi dan Kie di wilayahnya, penguatan pembinaan secara berjenjang/langsung secara berkala serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan membuat laporan triwulan secara berjenjang.

A.3.4 TERLAKSANANNYA PENGELOLAAN PERMINTAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALOKON DI FASKES (DKI)

Pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes khususnya DKI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan PUS akan pelayanan kontrasepsi di 546 Faskes di wilayah DKI Jakarta yang teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN. Proses pemesanan dan pembelian alokon untuk DKI Jakarta dilakukan oleh BKKBN Pusat (dekonsentrasi).

Realisasi capaian fasilitas kesehatan yang dapat terpenuhi alokonnya di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2018 lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 537 dari 546 Faskes atau capaian sebesar 97,06 persen (Tabel xx). Tidak tercapainya target ini dikarenakan adanya fasilitas kesehatan yang sudah tidak aktif melayani KB dan juga adanya fasilitas kesehatan yang telah tutup sehingga tidak lagi teregister dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN.

Registrasi fasilitas kesehatan dalam SIM BKKBN diperlukan karena merupakan syarat untuk mendapatkan distribusi alokon bagi fasilitas kesehatan dan setiap tahun dilakukan pemutakhiran data fasilitas kesehatan.

Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pengelolaan permintaan dan pemenuhan alokon menjadi Pro PN mulai dilaksanakan pada tahun 2018.

Tabel 3.90
Terlaksananya pengelolaan permintaan dan pemenuhan
kebutuhan alokon di Faskes (DKI Jakarta) Tahun 2018

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Pemenuhan Ketersediaan Alokon	546	537	97,06

A.3.5 MENINGKATNYA KINERJA TENAGA LINI LAPANGAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi bagi para petugas lini lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan melalui :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga lini lapangan melalui sertifikasi PKB/PLKB;
2. Mengembangkan aplikasi *e-visum* untuk menilai kinerja bagi PKB/PLKB dalam melaksanakan tugas dan sebagai salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja;
3. Mengembangkan materi program KKBPK untuk PKB/PLKB melalui media sosial, rumah baca, dan kuliah *whatsapp*;
4. Melaksanakan pembinaan dan monitoring kinerja PKB/PLKB melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
5. Memberikan *reward* bagi PKB/PLKB teladan.

Tabel 3.91
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Tenaga Lini Lapangan yang meningkat kinerjanya Tahun 2018

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang meningkat kinerjanya	10.746	10.531	98

Sumber data : laporan e-visum

Capaian Kinerja Tenaga Lini Lapangan sebesar 98 persen hal ini disebabkan beberapa hal :

- Tingkat jenjang pendidikan PKB/PLKB bervariasi sehingga mempersulit dalam penentuan kategori materi KIE yang akan diberikan;
- Tingkat pemahaman PKB/PLKB tentang program KKBPK masih rendah karena sebelum alih kelola PKB/PLKB dibawah pembinaan dan kendali pemerintah daerah;
- Masih banyaknya tenaga PKB/PLKB yang belum bisa memanfaatkan teknologi informasi dan ada di beberapa daerah masih belum dapat mengakses jaringan internet.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2019 adalah melaksanakan remedial sertifikasi bagi PKB/PLKB yang memiliki kompetensi dibawah standar, pelaksanaan kuliah melalui Watshap (kulwhapp), mengembangkan program pelayanan publik KIE oleh PKB/PLKB dan pengembangan sosial rumah baca melalui jejaring media sosial.

A.3.6 MENINGKATNYA PENGGERAKAN PELAYANAN MKJP

Penggerakan pelayanan KB MKJP dimaksudkan sebagai upaya dalam meningkatkan kesertaan KB MKJP. Hal ini diperlukan karena masih rendahnya kesertaan KB MKJP (IUD, implan, MOW dan MOP). Capaian target penggerakan pelayanan KB MKJP tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pertama kali baru masuk Pro PN pada tahun 2018.

Realisasi penggerakan pelayanan KB MKJP hanya mencapai 1.151.419 peserta (62,93 persen) dari target 1.829.788 yang ditetapkan (Tabel 3.92). Tidak tercapainya penggerakan pelayanan KB MKJP disebabkan antara lain karena adanya penyempurnaan peraturan dalam bentuk Surat Edaran terkait tata cara klaim sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK pada awal tahun 2018 yang menyebabkan beberapa provinsi menghentikan sementara kegiatan penggerakan KB MKJP sampai dengan trimester 2 dan 3 serta diperlukannya penyesuaian dilapangan terkait persyaratan dan tata cara klaim dana penggerakan berdasarkan Surat Edaran Kepala BKKBN yang diterbitkan. Selain itu adanya kekurangan stok alokon MKJP khususnya implan yang disebabkan tidak dilakukannya lelang dan gagal lelang pada beberapa provinsi juga berdampak terhadap tidak tercapainya target penggerakan pelayanan KB MKJP. Adanya hambatan pembiayaan pelayanan KB khususnya MOW interval dalam program jaminan kesehatan yang menyebabkan rendahnya penggerakan KB MOW

Tabel 3.92
Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya penggerakkan Pelayanan KB MKJP Tahun 2018

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Penggerakkan KB MKJP	1.829.788	1.151.419	62,93

A.3.7 TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PERMINTAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALOKON DI FASKES (PROVINSI)

Pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di fasilitas kesehatan khususnya di Provinsi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan PUS akan pelayanan KB di 19.427 Faskes yang teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN di 32 Provinsi selain wilayah DKI Jakarta. Proses pemesanan dan pembeliannya dilakukan pada masing – masing Perwakilan BKKBN Provinsi. Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pengelolaan permintaan dan pemenuhan alokon baru masuk kedalam pro PN pada tahun 2018.

Realisasi capaian fasilitas kesehatan yang dapat dipenuhi alokonnya di 32 Provinsi pada tahun 2018 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu dari 19.427 fasilitas kesehatan menjadi 19.508 fasilitas kesehatan atau capaian sebesar 100,42 persen (Tabel 3.93). Hal ini karena terdapat penambahan jumlah faskes yang diregistrasi dalam SIM BKKBN, khususnya faskes swasta berpotensi melayani KB setelah dilakukan pemutakhiran data faskes yang teregistrasi pada tahun 2018. Selain itu, pemenuhan kebutuhan alokon di faskes juga mendapat dukungan pembiayaan distribusi alokon melalui Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) atau DAK Non Fisik Sub Bidang KB.

Tabel 3.93
Perbandingan Target dan Realisasi Terlaksananya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di Faskes (Provinsi) Tahun 2018

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Pemenuhan Ketersediaan Alokon	19.427	19.508	100,42

A.3.8 MENINGKATNYA PROMOSI PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Tahun 2018 Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga melalui Program Pembangunan Keluarga, mendukung Prioritas Nasional Kesehatan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat dalam rangka Penurunan *Stunting* melalui Promosi dan KIE 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan sasaran 2.353.789 keluarga yang memiliki Baduta. Realisasi kinerja dalam mendukung Prioritas Nasional Kesehatan berdasarkan capaian laporan dalam Aplikasi Smart-Kemenkeu adalah sebesar 47,30 persen dari target 2.353.789 keluarga yang memiliki Baduta dan terpapar promosi dan KIE 1000 HPK;

Realisasi capaian Meningkatkan Promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan belum tercapai dikarenakan terdapat perbedaan penetapan Target antara jumlah keluarga yang memiliki baduta sebesar 2.353.789 keluarga dengan sasaran program penurunan *stunting* hanya pada 10 desa per kabupaten kota.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan materi dan media KIR 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka penurunan *stunting* sesuai kearifan lokal;
2. Sosialisasi materi dan media KIE 1000 hari Pertama Kehidupan kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
3. Penguatan kapasitas penyuluh PKB/PLKB dan Kader BKB tentang 1000 HPK dalam rangka penurunan *stunting* kepada keluarga sasaran dan masyarakat;
4. Melakukan promosi dan KIE 1000 HPK dalam rangka penurunan *stunting* ke desa-desa lain yang tidak termasuk dalam sasaran tetapi masih dalam wilayah Kabupaten dan Kota tersebut.

Upaya perbaikan pada tahun 2019 akan dilakukan perbaikan materi tentang pengasuhan 1000 HPK yang lebih fokus kepada pola pengasuhan balita dan anak. Materi ini untuk memperbaiki materi tahun 2018 yang masih fokus pada dimensi kesehatan. Selain itu juga disusun modul BKB eliminasi masalah anak *stunting* (EMAS), kalender pengasuhan 1000 HPK. Prototype BKB Kit *stunting* sebagai media penyuluhan kelompok BKB di wilayah sasaran pencegahan *stunting* dan kampung KB. Selain itu juga ada, permainan

ular tangga dengan materi pengasuhan 1000 HPK terdiri dari 6 sesi di sesuaikan dengan jumlah pertemuan dalam modul BKB EMAS.

A.3.9 MENINGKATNYA PROMOSI DAN PENGUATAN KELUARGA LANSIA DAN LANSIA MELALUI BKL

Terlaksananya promosi dan penguatan Keluarga lansia dan lansia melalui BKL dimaksudkan untuk “Mewujudkan Kemandirian dan kecakapan keluarga lansia dan rentan menuju lansia tangguh yang aktif, sehat, mandiri dan produktif”. Upaya ini diperlukan mengingat meningkatnya penduduk Lansia sebesar 8,96 persen atau sejumlah 23,4 juta jiwa, tetapi memiliki kualitas rendah (dengan angka kesakitan lansia sejumlah 26,72) – Sumber Data BPJS, 2017, materi belum tersampaikan pada kelompok-kelompok Bina Keluarga Lansia. Capaian target Promosi dan penguatan keluarga lansia dan lansia di BKL tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pertama kali baru masuk Pro PN pada tahun 2018. Selanjutnya untuk tahun 2019 ini tidak ada lagi.

Berdasarkan realisasi capaian promosi dan penguatan keluarga lansia dan lansia di BKL telah tercapai 1.715.827 keluarga (116,91 persen) dari target 1.467.662 keluarga yang ditetapkan. Tercapainya target tersebut karena adanya dukungan mitra kerja dalam penggarapan kelanjutusiaan di tingkat lini lapangan, dukungan dana sosialisasi penyebarluasan peningkatan kualitas kelompok BKL, aplikasi penyebarluasan informasi kelanjutusiaan berbasis teknologi, Program Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan menjadi salah satu kegiatan strategis dalam merevitalisasi pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Upaya yang telah dilakukan terdiri dari:

1. Mengembangkan dan menyediakan materi dan media KIE kelanjutusiaan sesuai dengan kearifan lokal;
2. Mensosialisasikan materi dan media KIE kelanjutusiaan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia kepada OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dan Kabupaten Kota;
3. Mensosialisasikan materi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Lansia Rentan Berbasis Keluarga oleh Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia kepada OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dan Kabupaten Kota.

A.3.10 JUMLAH PENGGERAKAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN

Penggerakan mekanisme operasional lini lapangan adalah Suatu rangkaian aktivitas mekanisme yang harus dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan melalui kegiatan koordinasi dan evaluasi secara berjenjang dan terintegrasi dengan lembaga masyarakat desa dan pemerintah daerah setempat.

Tabel 3.94
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Penggerakan Dan Pembinaan Program KKBPK Oleh PKB/PLKB Dan Sub PPKBD

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan PPKBD/ Sub PPKBD	5	5	100

Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD sesuai target yang ada sudah sesuai target melalui upaya meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dan kader IMP (PPKB, Sub PPKBD, kelompok KB dan lembaga masyarakat desa) terhadap program KKBPK. Untuk meningkatkan kualitas penggerakan maka pada tahun 2019 akan dilaksanakan peningkatan kompetensi kader IMP melalui pembinaan, workshop, refreshing dan temu kader.

A.3.11 MENINGKATNYA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Penguatan dan pengembangan Kampung KB adalah suatu rencana kegiatan untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (lintas sektor) di kampung KB yang telah dicanangkan serta memperluas jangkauan keseluruhan desa termasuk desa stunting dan peningkatan kualitas kampung KB percontohan. Indikator ini mulai dilaksanakan tahun 2018 sebagai bagian dari kegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional. Realisasi pada tahun 2018 seperti tabel berikut:

Tabel 3.95
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB	6.727	5.779	86%

Sumber data : Aplikasi monitoring Kampung KB

Capaian persentase Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 86 persen.

Penyebab belum tercapainya indikator persentase Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB:

1. Instruksi Presiden tentang kampung KB belum disahkan oleh Presiden, sehingga dalam pelaksanaan kampung KB belum memiliki acuan yang kuat, terutama untuk melibatkan lintas sektor;
2. Adanya pemahaman lintas sektor bahwa kampung KB merupakan program milik BKKBN;
3. Menurunnya frekuensi pertemuan rapat koordinasi di lini lapangan yang tidak sesuai dengan panduan mekanisme operasional program KKBPK di lini lapangan;
4. Pembinaan berjenjang sulit dilakukan karena adanya kendala geografis dan pendanaan;
5. Jumlah tenaga PKB yang tidak relevan dengan rasio wilayah binaan yang seharusnya 1:2 tetapi kenyataannya 1:6, sehingga pembinaan kepada kader tidak berjalan dengan baik.

Upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan kinerja pokja kampung KB yang anggotanya dari lintas sektor dan lembaga masyarakat;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme operasional sesuai panduan mekanisme operasional program KKBPK di lini lapangan;
3. Melakukan monitoring evaluasi yang ditindak lanjuti dengan rekomendasi dan pemecahan masalah.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2019 adalah mengembangkan aplikasi laporan kampung KB untuk mempermudah penyampaian laporan ke Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kompetensi pokja kampung KB akan dilakukan penilaian kampung KB . Untuk membangun standar kampung KB yang bagus maka akan dikembangkan 1 (satu) kampung KB percontohan di setiap provinsi.

Tabel 3.96
Analisis atas Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya

NO.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	Target 2018	Realisasi 2018	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	KESIMPULAN
	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG	1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.31	2.38	97.06	2,329,243,928,000	1,676,732,873,149	71.99	Efisien
			2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	61.1	57	93.29				
			3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,14	12.40%	81.77				
			4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	22.30	23.1	103.59				
			5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25.0	25.0	100.00				
I	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7.39	3.1	81.60				
			2 ASFR 15-19 Tahun	40 per 1000 perempuan 15-19 tahun	30 per 1000 perempuan 15-19 tahun	133.33				
			3 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50	18	35.20				
			4 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	40	38	95.25				
			5 Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	51	57.1	111.96				
			6 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	48	51.40	107.08				
			7 Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1	1	100.00				
II	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK	1 Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	2	200.00	2,963,279,341,000	2,381,041,091,336	80.35	Efisien
			2 Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	100.00				
			3 Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3	5	166.67				
			4 Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	60% pengembangan SDM	60% pengembangan SDM	100.00				
			5 Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4	3.14 dari skala 1-4	78.50				
			6 Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov	34 prov	100.00				

NO.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	Target 2018	Realisasi 2018	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	KESIMPULAN	
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	1	Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	5 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0.12 % (dari satker yang diaudit)	17,600,000,000	14,601,144,527	82.96	Efisien	
			2	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi	34 prov	34 prov					100.00
IV	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK	1	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	90% SDM Aparatur	97.40	108.22	264,038,896,000	226,306,632,492	85.71	Efisien
			2	Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	1	8	72.73				
			3	Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3	33	1100.00				
			4	Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,3 (dari skala 1-4)	3.1	93.94				
			5	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	34 prov	34 prov	100.00				

Sumber Data : Aplikasi SMART DJA 21 Januari 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan secara efisien dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2018, capaian kinerja BKKBN didukung dengan pemanfaatan anggaran (realisasi) sebesar Rp 4.298.081.741.504,00 atau sebesar 77,11% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 5.574.162.165.000,00 dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran per program disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.97
Daftar Alokasi dan Realisasi Anggaran per Program

NO.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	KESIMPULAN
	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG	1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) 4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	2,329,243,928,000	1,676,732,873,149	71.99	Efisien
I	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Jumlah peserta KB baru /PB (juta) 2 ASFR 15-19 Tahun 3 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern 4 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga 5 Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana 6 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan 7 Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu				
II	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK	1 Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB 2 Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK 3 Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja 4 Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap) 5 Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtangaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 6 Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	2,963,279,341,000	2,381,041,091,336	80.35	Efisien
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	1 Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit 2 Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di satker Perwakilan BKKBN provinsi	17,600,000,000	14,601,144,527	82.96	Efisien
IV	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK	1 Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional 2 Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi 3 Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK 4 Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan 5 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	264,038,896,000	226,306,632,492	85.71	Efisien
			TOTAL ANGGARAN	5,574,162,165,000	4,298,681,741,504		

Sumber : Aplikasi Smart DJA, Kementerian Keuangan per 21 Januari 2019

Dilihat dari realisasi per program, menunjukkan bahwa program KKBPK memiliki realisasi anggaran terendah sebesar 71,99 persen. Hal ini disebabkan karena terjadi gagal lelang alat dan obat kontrasepsi di 19 Provinsi. Selain itu rendahnya realisasi anggaran pada program KKBPK juga diakibatkan karena adanya ketidaksinkronan regulasi dan pedoman pelaksana dari pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan klaim biaya penggerakan mekanisme operasional lini lapangan dan penggerakan pelayanan KB MKJP.

Adapun capaian realisasi anggaran tertinggi di BKKBN ada di Program Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional yaitu sebesar 85,71 persen. Walaupun demikian, capaian tersebut belum sesuai dengan target realisasi yang ditetapkan (≥ 95 persen). Faktor penyebabnya antara lain karena pengaturan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) harus mengikuti alokasi waktu yang disediakan oleh mitra strategis.

C. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

1. Kinerja Proyek Prioritas Nasional

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 BKKBN mendapat mandat mendukung program prioritas yaitu (1) program prioritas peningkatan kesehatan ibu dan anak, (2) program prioritas pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, dan (3) program prioritas stabilitas politik dan keamanan, dengan 11 (sebelas) Proyek Prioritas Nasional dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.98
Daftar Alokasi Anggaran dan Realisasi Proyek Prioritas Nasional

NO	SASARAN PROYEK PRIORITAS	PENANGGUNG ESELON II	OUTPUT PROYEK PRIORITAS	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan internasional Kependudukan dan KB dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan	Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional bidang Kependudukan dan KB (PULIN)	SDM aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pelatihan internasional dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan	Orang	2.419.000.000	1.961.178.904	81,07
2	Meningkatnya Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam promosi dan KIE program KKBPK melalui Media	Direktorat Advokasi dan KIE (DITVOKOM)	Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam promosi dan KIE program KKBPK melalui Media	Media	62.879.000.000	55.288.567.195	87,93
3	Meningkatnya Penguatan advokasi program KKBPK bagi stakeholder dan mitra kerja	Direktorat Advokasi dan KIE (DITVOKOM)	Penguatan komitmen dan dukungan stakeholder/ pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota	Stakeholder	30.599.000.000	27.421.836.826	89,62
4	Terlaksananya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes (DKI)	Direktorat Bina Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM)	Pemenuhan Ketersediaan Alokon	Faskes	18.538.618.000	13.128.121.957	70,81
5	Meningkatnya Kinerja Tenaga Lini Lapangan	Direktorat Bina Lini Lapangan (DITBINLAP)	Peningkatan Kinerja Tenaga Lini Lapangan	PKB / PLKB	4.000.000.000	3.642.908.175	91,07

NO	SASARAN PROYEK PRIORITAS	PENANGGUNG ESELON II	OUTPUT PROYEK PRIORITAS	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
6	Meningkatnya penggerakan pelayanan MKJP	Direktorat Bina Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM)	Peningkatan Penggerakkan KB MKJP	Peserta KB	299.210.730.000	117.368.149.468	39,23
7	Terlaksanannya pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes (Provinsi)	Direktorat Bina Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM)	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes	Faskes	451.687.938.000	280.266.193.718	62,05
8	Meningkatnya Promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan	Direktorat Bina keluarga Balita dan Anak (DITBALNAK)	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	Keluarga	28.200.000.000	24.088.144.229	85,42
9	Meningkatnya Promosi dan Penguatan Keluarga Lansia dan Lansia melalui BKL	Direktorat Bina Keluarga Lansia dan Rentan (DITHANLAN)	Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia melalui BKL	Keluarga	18.500.000.000	15.214.572.520	82,24
10	Meningkatnya Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	Direktorat Bina Lini Lapangan (DITBINLAP)	Peningkatan Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK oleh PKB/ PLKB dan PPKBD/ Sub PPKBD	Gerak/ Tahun	250.308.750.000	197.226.945.903	78,79
11	Meningkatnya penguatan dan pengembangan Kampung KB	Direktorat Bina Lini Lapangan (DITBINLAP)	Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB	Desa	67.270.000.000	59.925.509.741	89,08

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi terendah pada proyek prioritas nasional ada pada Output Peningkatan Penggerakkan KB MKJP yaitu sebesar 39,23 persen . Hal ini karena adanya ketidaksielarasan regulasi dan pedoman pelaksana yang berakibat pada tidak terlaksananya kegiatan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan dan penggerakan pelayanan KB MKJP secara maksimal.

Adapun capaian realisasi tertinggi pada proyek prioritas nasional berada pada output Peningkatan Kinerja Tenaga Lini Lapangan yaitu sebesar 91,07 persen . Faktor pendukung cukup tingginya realisasi di output tersebut karena terlaksananya berbagai kegiatan peningkatan kapasitas PKB/PLKB antara lain refreshing PKB/PLKB, pelatihan peningkatan kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis PKB/PLKB yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi.

2. Capaian Lainnya

Selama tahun 2018, selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian kinerja, BKKBN juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain:

A. Capaian di Tingkat Nasional

- 1) BKKBN menjadi pemenang dalam PR Indonesia Award (PRIA) 2018 dalam kategori Media Cetak Internal
- 2) Mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 500/K.1/PDP.10.4.Lembaga Administrasi Negara, BKKBN melanjutkan mempertahankan statusnya sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar/Pra Jabatan Golongan I dan II dengan kategori terakreditasi A, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori terakreditasi B, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori terakreditasi B.



- 3) Mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 393/K.1/PDP.09/2016, BKKBN melanjutkan mempertahankan statusnya sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Tenis dan Diklat Fungsional untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Kependudukan dan KB dibawah lingkungan BKKBN dan lembaga diklat pemerintah lainnya.



- 4) Berpartisipasi dalam ajang penganugerahan Penghematan Energi dan Air tingkat Kementerian dan Lembaga oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta mendapatkan penghargaan dalam inovasi berupa lampu tenaga surya dan sistem pemanenan air hujan dan air AC sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penghematan energi listrik dan air;



B. Capaian di Tingkat Internasional

- 1) BKKBN menjadi *host* pada *Inter - Ministerial Conference on South-South and Triangular Cooperation: Emerging Population and Development Issues Influencing the 2030 Agenda*, Bali, 18-20 September 2018. Konferensi tersebut dibuka oleh Ibu Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moelok. Konferensi dihadiri oleh para menteri dari berbagai negara, para ahli dan praktisi di bidang kependudukan dan sektor pembangunan, berbagai organisasi internasional dan media.



- 2) BKKBN menjadi *host* pada *The South East Asia Biennial Conference on Population and Health*, Malang 8-9 November 2018. Konferensi tersebut digagas oleh BKKBN bekerjasama Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Portsmouth Inggris. Konferensi tersebut mengangkat topik Kependudukan dan Kesehatan di Asia Tenggara dan dihadiri oleh kurang lebih 250 orang dalam dan luar negeri.



- 3) BKKBN menduduki peringkat III pada *International Competition on South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Population and Development* yang diselenggarakan oleh UNFPA Headquarters
- 4) BKKBN melanjutkan perannya sebagai *Executive Director UNESCAP* di Bangkok Thailand sehingga aspirasi Indonesia di PBB khususnya Regional Asia Tenggara dapat lebih terwadahi
- 5) BKKBN melanjutkan perannya sebagai anggota *Partnership in Population and Development (PPD)* dimana Sekretaris Utama BKKBN berperan sebagai PCC pada organisasi tersebut
- 6) BKKBN melanjutkan perannya sebagai *Chair dari International Council on Management of Population Programmes (I Comp)* untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019
- 7) Implementasi *Bridging Leadership*

Bridging Leadership sebagai salah satu program prioritas nasional pendidikan dan kerjasama Selatan-Selatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan meningkatkan penggunaan keluarga berencana berbasis hak melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, berdasarkan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Ibu 2016-2030 dan Strategi Keluarga Berencana Berbasis Hak 2016-2020.

Implementasi kegiatan ini dilaksanakan oleh BKKBN, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan UNFPA. Proyek percontohan ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Malang (Jawa Timur), Lahat (Sumatera Selatan), and Aceh Barat (Aceh). Pendekatan *bridging leadership* menggunakan tiga langkah transformasi: kepemilikan (*ownership*), kepemilikan bersama (*co-ownership*), dan penciptaan bersama (*co-creation*).

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka mendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja BKKBN 2018 telah dilakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT), yaitu:

a. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM)



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepegawaian untuk mewujudkan data dan informasi kepegawaian yang cepat, akurat, berkualitas, dan terintegrasi dilingkungan BKKBN, maka telah dibangun jaringan aplikasi berbasis TI yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM SDM). Selain itu tujuan dari sistem aplikasi ini adalah untuk mentransformasikan proses manual menjadi otomatis sehingga administrasi dan pelayanan kepegawaian dilingkungan BKKBN berbasis teknologi informasi.

SIM SDM mencakup penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.

b. Sistem Informasi Visum Kinerja (SIVIKA) 2.0



Sistem Informasi Visum Kinerja 2.0 merupakan pengembangan dari SIVIKA 1.2 yang selanjutnya disebut "SIVIKA" adalah aplikasi dalam jaringan (daring/online) yang dipergunakan untuk membuat Laporan Kinerja Pegawai yang dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan aplikasi SIM SDM BKKBN. SIVIKA berisi laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai pada hari kerja yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan dalam SKP. Untuk itu, pengisian SIVIKA 2.0 digunakan sebagai salah satu komponen dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai setiap bulannya dengan penambah fitur persetujuan atasan dan menu Sistem Kinerja Pegawai (SKP). Besarnya Komponen SIVIKA berkontribusi terhadap perhitungan tunjangan kinerja maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen dalam 1 (satu) bulan.



c. Kampung KB Online

Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat.

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBP/KB serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Selengkapnya tentang kampung kb | Jelajahi kampung kb | Statistik

Persebaran Kampung KB

Pencapaian Program Kampung KB
Mewujudkan satu Kampung KB di setiap desa sangat tertinggal di Indonesia.

Total kampung KB sudah dicanangkan
13924

Statistik selengkapnya

Sesuai dengan 9 (sembilan) agenda prioritas Presiden (nawacita) khususnya nawacita ke-3 untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, Presiden mencanangkan Kampung KB pada 14 Januari 2016 di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Pencanangan oleh Presiden ini ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 440/70/SJ tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB. BKKBN telah menyusun *road map* Kampung KB untuk kurun waktu 2015-2019. Untuk memonitor pelaksanaan program KKBP/KB di kampung KB telah dikembangkan Aplikasi Kampung KB Online (kampungkb.bkkbn.go.id).

d. Jurnal Keluarga Berencana Online

Mulai tahun 2018 Puslitbang KB dan KS telah meluncurkan Jurnal Keluarga Berencana (JKB) online (ejurnal.bkkbn.go.id). Jurnal ini sudah didaftarkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI). Jurnal ini masih dalam proses untuk mendapatkan akreditasi dari LIPI, namun sudah dapat digunakan sebagai sarana bagi para peneliti BKKBN maupun dari Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan masyarakat untuk mempublikasikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) nya serta mendapatkan bahan referensi terkait program KBPK. Jurnal online ini terbit 2 (dua) kali setiap tahun.



e. e-Koren (Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran berbasis TI)

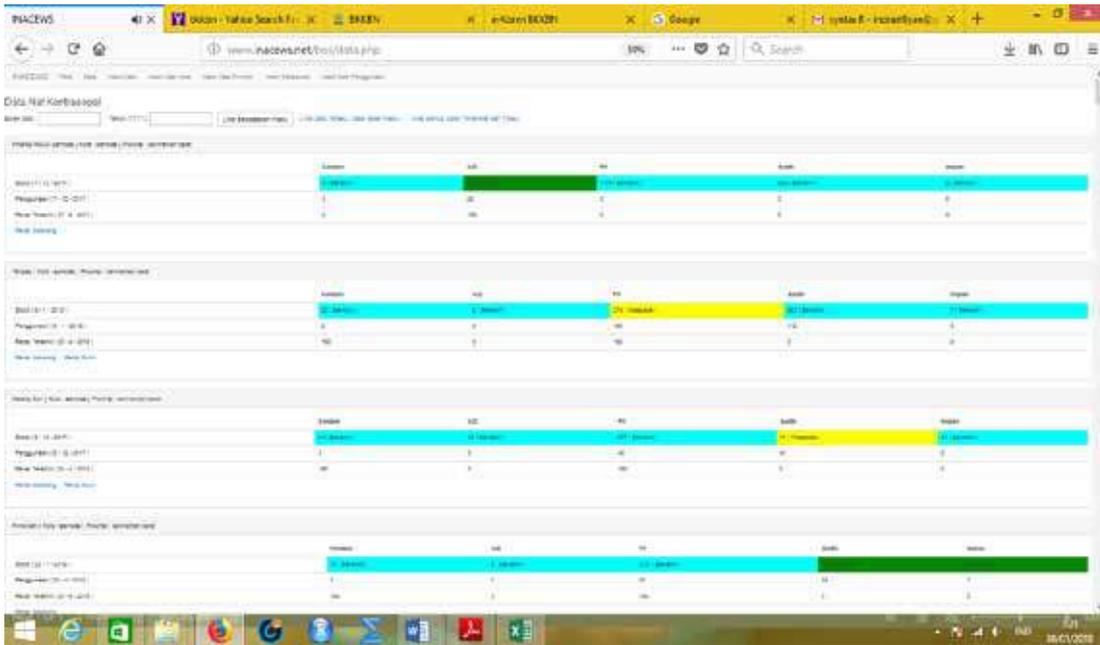


Pada tahun 2018, pelaksanaan konsolidasi perencanaan program dan anggaran di BKKBN dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-Koren). Pelaksanaan e-Koren merupakan sebuah bentuk inovasi yang pertama kali dilakukan oleh BKKBN dalam rangka menciptakan sistem perencanaan yang efektif, transparan dan akuntabel yang terintegrasi dengan website BKKBN. Pelaksanaan kegiatan e-Koren menggantikan mekanisme Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran yang semula dilakukan melalui wawan muka bersama seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan BKKBN Pusat dan Provinsi menjadi dilakukan melalui *video conference*.

f. Pengembangan Sistem Kekosongan Alat dan Obat Kontrasepsi (sirene alokon) atau Indonesian Contraceptive Early Warning System (INA CEWS)

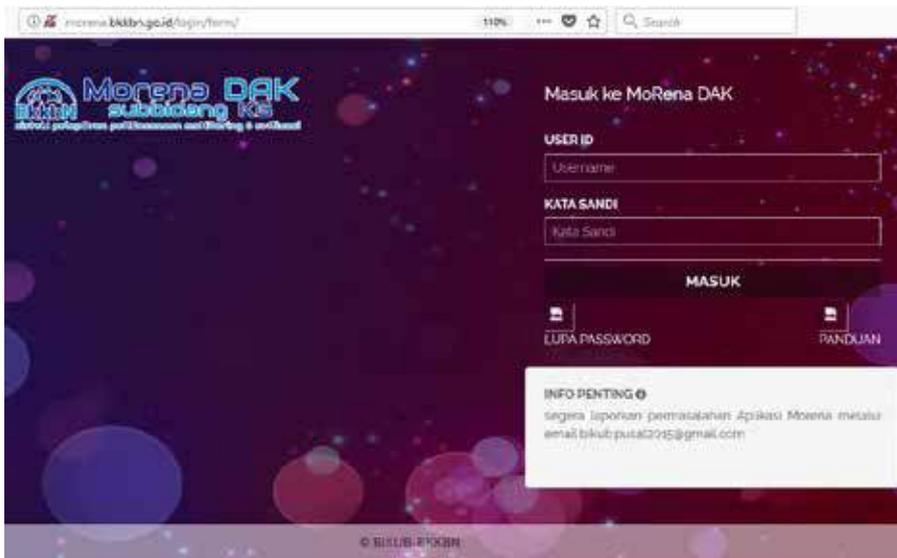
Sistem ini memungkinkan dilakukan pengendalian rencana pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dari kabupaten dan kota ke fasilitas kesehatan melalui input data hasil pelayanan kontrasepsi dan sisa stok alat dan obat kontrasepsi. Sistem ini memiliki nilai tambah untuk melakukan perhitungan jumlah dan waktu pengiriman alat dan obat kontrasepsi secara *real time*. Pada tahun 2017 telah dilakukan ujicoba di 4 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Uji coba tersebut selalu dipantau sampai

dengan tahun ini, karena di masing-masing daerah lokus masih melakukan *entry data*. Pada tahun 2018, aplikasi INA CEWS ini dalam proses penggabungan dengan aplikasi SIGA.

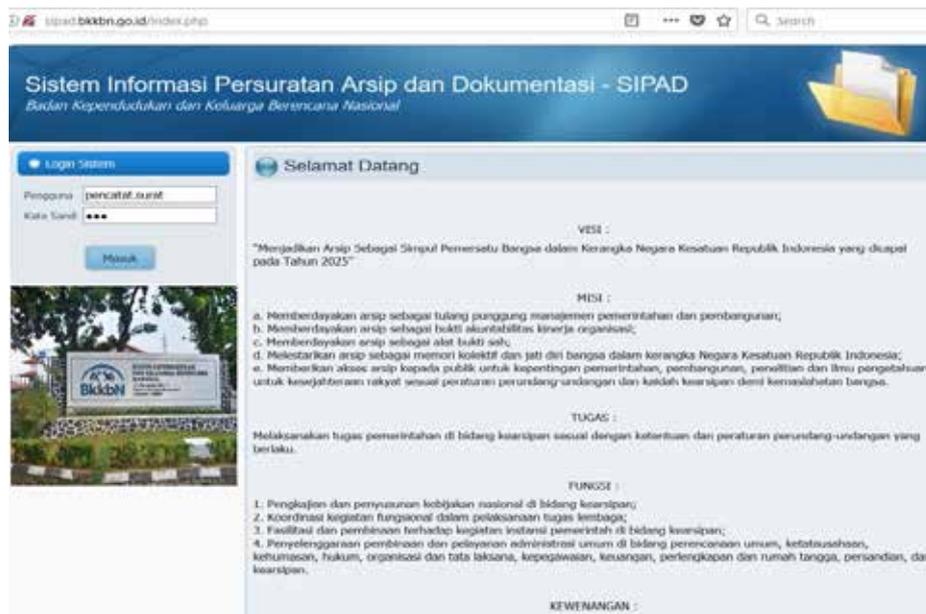


g. Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (MORENA DAK Sub Bidang KB)

Sistem ini merupakan pencatatan dan pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Sistem ini menggantikan sistem perencanaan dan pelaporan pemanfaatan DAK Fisik dan Non Fisik dari kabupaten dan kota ke BKKBN secara manual. Sistem ini memungkinkan dilakukannya keterpaduan perencanaan dan pelaporan pemanfaatan DAK di daerah dan mampu mendokumentasikan proses pelaksanaan DAK tersebut.



h. Sistem Informasi Persuratan Arsip dan Dokumentasi (SIPAD)



Sistem Informasi Persuratan Arsip dan Dokumentasi atau selanjutnya disingkat SIPAD merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan (1) memudahkan penemuan kembali dokumen/arsip pada saat dibutuhkan; (2) memiliki system pencatatan dokumen/arsip dalam bentuk digital/softcopy; (3) menjaga dokumen dari kehilangan karena dokumen tercatat dan teregistrasi dengan baik; (4) kemudahan akses dokumen/arsip dalam memenuhi kebutuhan organisasi. SIPAD ditujukan juga dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan sehingga terhindar dari tindak pidana tentang penyalahgunaan pengelolaan kearsipan.

i. Aplikasi Mobile Orang Tua Hebat

Aplikasi ini memuat materi-materi informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak, berupa buku, leaflet, poster dan video tentang cara pengisian kartu kembang anak. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan kader dalam menyampaikan informasi pada saat penyuluhan kepada masyarakat. Aplikasi ini dapat diunduh melalui googleplay atau playstore.



j. Aplikasi Lansia Tangguh

Aplikasi Lansia Tangguh berbasis *web* dan **android** ini digunakan sebagai sumber informasi tentang lansia tangguh, kelompok kegiatan BKL, video tentang Lansia Tangguh, Tips Lansia Tangguh dan berita tentang lansia tangguh yang dapat di akses oleh masyarakat secara bebas, karena aplikasi ini dapat diunduh melalui *googleplay* atau *playstore*.



k. Sistem Aplikasi (Website) SDKI



Pengadaan aplikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia dilakukan dalam rangka mendukung proses perencanaan yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan BKKBN dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Mendukung capaian sasaran prioritas Pembangunan Kesehatan Nasional dalam bidang Kebijakan dan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Kebijakan dan Program Kesehatan
- 2) Pemenuhan kebutuhan data untuk operasional yang sifatnya mendasar;
- 3) Penyediaan informasi pendamping
- 4) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi Bidang Kependudukan dan KB.

Atas dasar ini, maka pengembangan aplikasi bertujuan :

- 1) Menyediakan data mengenai perilaku fertilitas, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kematian ibu, dan pengetahuan tentang AIDS dan PMS yang dapat digunakan oleh para pengelola program, pengambil kebijakan, dan peneliti dalam menilai dan menyempurnakan program yang ada.
- 2) Mengukur perubahan - perubahan yang terjadi pada angka kelahiran dan pemakaian KB, serta mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pola dan status perkawinan, daerah tempat tinggal, pendidikan, kebiasaan menyusui, dan pengetahuan, penggunaan, serta penyediaan alat - alat kontrasepsi.
- 3) Mengukur pencapaian sasaran dari program kesehatan nasional, khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan kesehatan ibu dan anak.
- 4) Menilai partisipasi dan penggunaan pelayanan kesehatan oleh pria bagi seluruh keluarganya.
- 5) Menyediakan data dasar yang secara internasional dapat dibandingkan dengan negara - negara lain dan dapat digunakan oleh para pengelola program, pengambil kebijakan, dan peneliti dalam bidang fertilitas, KB, dan kesehatan.

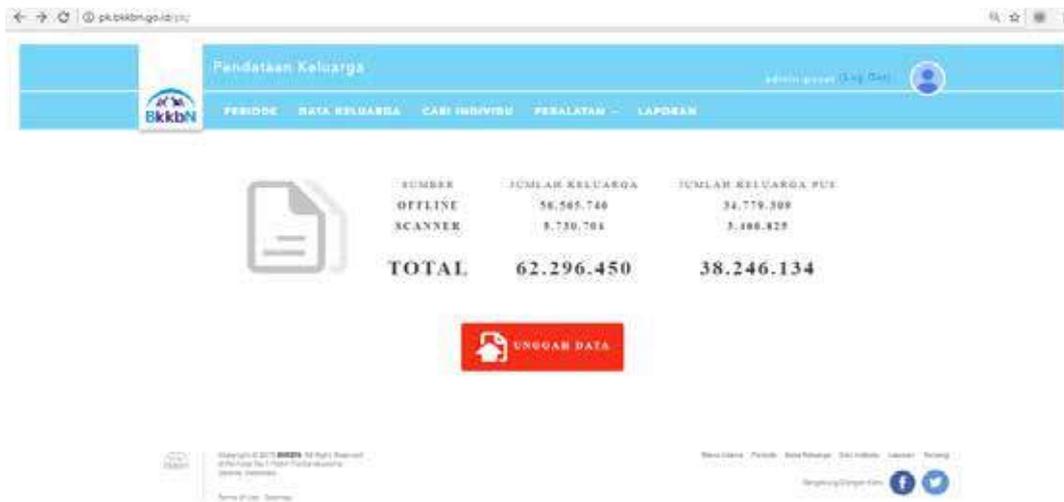
I. Aplikasi Statistik Rutin

Aplikasi Statistik Rutin merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Situs pengolahan data statistik rutin ini merupakan hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan. Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi (Pelkon) adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB pemerintah maupun swasta serta dokter atau bidan praktek swasta sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Sedangkan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dalap) adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek tentang kegiatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program KKB di lapangan.



m. Aplikasi Pendataan Keluarga

Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, Keluarga Berencana, pembangunan keluarga dan anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.



n. Aplikasi SIGA

Sistem Informasi Keluarga (SIGA) adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. Tujuan dilaksanakan SIGA adalah menyediakan data dan informasi berbasis keluarga sebagai peta kerja dan sasaran program KKBPK serta pengukuran kinerja setiap tingkatan wilayah. SIGA merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selain Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 ada pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana ditegaskan salah satu urusan di dalam bidang keluarga berencana adalah pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Di dalam PP Nomor 87 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan data rutin yang meliputi pengelolaan data pelayanan keluarga berencana, pengelolaan data pengendalian lapangan, dan Pendataan Keluarga (PK) serta Pemutakhirannya. Pengumpulan data dan informasi keluarga di daerah diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Operasionalisasi SIGA tertuang dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Keluarga.

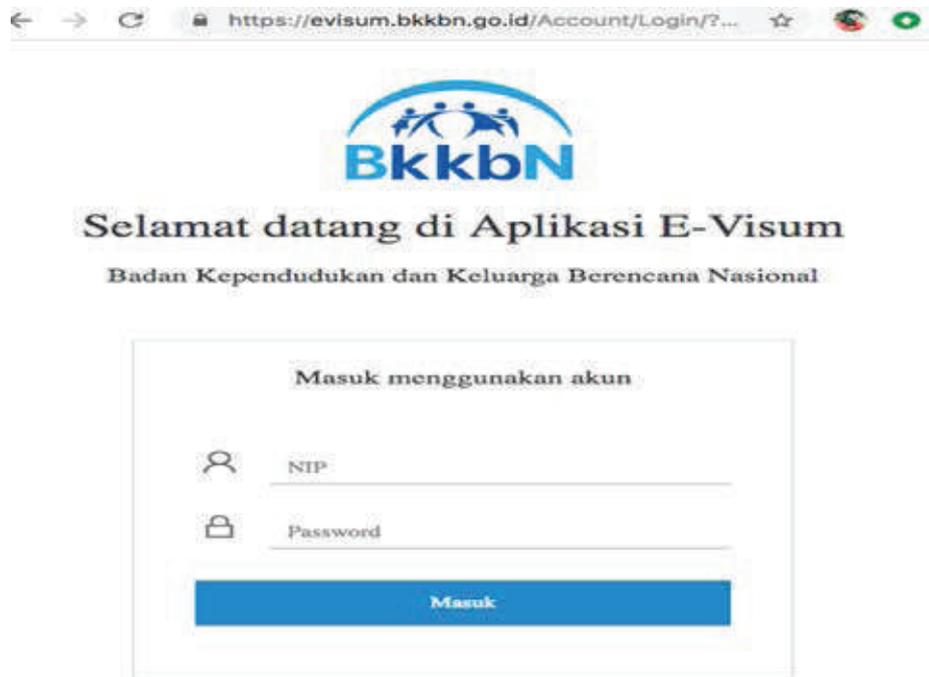


o. Aplikasi E-Visum

Aplikasi yang dikembangkan untuk mengetahui dan menilai kinerja PKB/PLKB di Lapangan. Aplikasi ini dikembangkan dari versi 20.16 pada tahun 2017 menjadi 3.0 pada tahun 2018. Fitur tambahan utama yang diupdate dalam versi 3.0 adalah teredainya tambahan fitur cuti, filter

kegiatan yang dilakukan oleh PKB/PLKB berdasarkan kegiatan penyuluhan dan non penyuluhan, fitur pengumuman, fitur daftar bantuan dan menampilkan data profil PKB/PLKB dengan detail. Selain itu pada versi terbaru 3.0 juga menampilkan *display progress* capaian kinerja yang telah dicapai oleh PKB/PLKB secara persentase. Aplikasi E-Visum terdiri dari 2 (dua), yakni: aplikasi E-Visum Mobile dan Aplikasi E-Visum WEB.

Output dari E-Visum digunakan sebagai salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja bagi PKB/PLKB yang berada di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.



D. Inovasi Kegiatan Lainnya dalam rangka mendukung Capaian Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja, BKKBN juga melakukan inovasi-inovasi kegiatan yang diarahkan untuk mendukung keberhasilan program KKBPK, yaitu:

a. Pembentukan *Assesment Center*

BKKBN secara resmi telah mendirikan *Assesment Center* BKKBN sebagai pusat penilaian potensi dan kompetensi pegawai dengan menggunakan berbagai teknik/ metode. *Assesment Center* BKKBN bisa dipergunakan bagi ASN BKKBN, ASN yang akan pindah antar instansi juga terbuka bagi ASN kementerian/lembaga negara lainnya.



Dengan tersedianya tenaga asesor, sarana dan prasarana serta struktur *Assessment Center* diharapkan kegiatan *assessment* dapat dilaksanakan kepada seluruh ASN BKKBN secara berkala sehingga dapat mendukung terwujudnya manajemen talenta BKKBN.



b. Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku)

Rumah Data kependudukan yang berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung KB. Rumah Data Kependudukan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung KB.

Rumah Data Kependudukan pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan tata kelola data, terutama di desa atau kampung. Keberadaan data di Rumah Data Kependudukan terintegrasi dengan sumber data lain, seperti data sektoral yang dikumpulkan oleh berbagai institusi, misalnya data luas lahan pertanian, perkebunan, data kepemilikan jamban keluarga, data balita kurang gizi atau teridentifikasi *stunting*, data penduduk menurut tingkat pendidikan, pekerjaan dan lainnya, yang kesemuanya dapat dimanfaatkan untuk intervensi pembangunan. Kualitas data diharapkan akan semakin baik, karena data tersebut dikumpulkan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

D. EVALUASI KINERJA

Dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan (*continuous improvement*) pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di BKKBN, kami telah melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang dari mulai tingkatan satuan kerja (Eselon II) hingga tingkatan organisasi (BKKBN). Dalam hal evaluasi terhadap capaian kinerja BKKBN, prosesnya dimulai dari reviu internal di Direktorat Perencanaan bersama unsur pengawasan internal BKKBN yakni Inspektorat Utama (Irtama) dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dalam Forum Eselon I BKKBN hingga evaluasi dan arahan pimpinan melalui rapat-rapat/pertemuan.

Dari 25 indikator kinerja (revisi renstra dari BSC) yang diukur pada periode kinerja Tahun 2018, sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja telah mencapai target, yaitu:

Tabel 3.99
Perbandingan Target dan Realisasi Presentase Capaian Kinerja 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang Berhasil Mencapai Target Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi	Capaian
1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,31	2,38	103%

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi	Capaian
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)(%)	10,14	12,4	122,3%
3	Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP	22,30	23,1	103,6%
4	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25,0	25,0	100%
5	ASFR 15-19 tahun	40 per 1000 perempuan 15-19 tahun	30 per 1000 perempuan 15-19 tahun	133%
6	Indeks pengetahuan remaja tentang generasi berencana	51	57,1	112%
7	Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	48	52,0	108,3%
8	Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1	1	100%
9	Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	1	100%
10	Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	100%
11	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3	5	167%
12	Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	57% pengembangan SDM	100% Pengembangan SDM	100%
13	Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di provinsi	34 provinsi	34 provinsi	100%
14	Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	5% (dari satker yang diaudit eksternal)	0,12%	4.108,7%
15	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi	34 provinsi	34 provinsi	100%
16	Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi	1 Lembaga	8 Lembaga	800%
17	Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3 Kerjasama	33 Kerjasama	1.10%
18	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100%

Sedangkan realisasi untuk 7(tujuh) IKU lainnya masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, seperti disajikan berikut:

Tabel 3.100
Perbandingan Target dan Realisasi Presentase Capaian Kinerja 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang Belum Mencapai Target Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemakaian kontrasepsi (Modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	61,1	57	93,3%
2	Jumlah peserta KB baru/ PB (juta)	7,39 juta	6.03 juta	81,6%
3	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50	17,6	35,2%
4	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	40	38,1	95,3%
5	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana	4 dari skala 1-4	3,14	78,5%
6	Indeks kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS, dan Kependudukan	3,3 (dari skala 1 – 4)	3,1	94%
7	Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur dan tenaga fungsional	90% SDM aparatur		

Meski demikian, target kinerja yang tidak tercapai tersebut beberapa di antaranya mengalami peningkatan dalam hal realisasi dari tahun sebelumnya sebagaimana telah diungkapkan dalam pembahasan realisasi dan capaian kinerja sebelumnya.

Adapun upaya ke depan dalam rangka memperbaiki capaian atas target kinerja yang masih dirasakan belum sesuai harapan, BKKBN mengupayakan perbaikan implementasi dari bisnis proses dan kegiatan yang signifikan sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Beberapa penyebab tidak tercapainya indikator Kinerja tahun 2018 adalah :

1. Persentase pemakaian kontrasepsi (Modern contraceptive prevalence rate/ CPR)
Dari target CPR 61,1 persen hanya tercapai 57 persen . Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Masih tingginya tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi modern
 - b. Belum optimalnya pembiayaan pelayanan KB melalui skema pembiayaan jaminan kesehatan khususnya pelayanan KB MOW Interval dan pelayanan KB yang sifatnya rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
 - c. Belum optimalnya pelayanan KB melalui peran fasilitas kesehatan swasta dan Praktek Bidan Mandiri sebagai jejaring dalam sistem jaminan kesehatan
 - d. Belum optimalnya penggarapan KB di wilayah Galciltas (tertinggal, terpencil, dan perbatasan)
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan dokter dan bidan yang sudah dilatih dalam pelayanan KB

- f. Belum optimalnya upaya pemenuhan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi terutama MKJP di fasilitas kesehatan.
 - g. Hasil Pendataan Keluarga dan Updatingnya belum dijadikan sebagai peta kerja operasional untuk mencapai sasaran/ target peserta KB.
2. Jumlah Peserta KB baru/ PB (juta)
- Dari target 7,39 juta Peserta KB Baru, ternyata hanya tercapai 6,03 juta (81,6 persen). Hal ini disebabkan oleh:
- a. Belum optimalnya penggarapan untuk KB pasca persalinan, terutama klaim pembiayaan melalui BPJS Kesehatan terhadap pelayanan KB pasca persalinan dengan biaya tindakan persalinan
 - b. Belum semua faskes yang teregister melaporkan cakupan pelayanan
 - c. Kurang optimalnya penggerakan calon peserta KB Baru
 - d. Pada tahun 2018, untuk pembelian *implant* dalam e-katalog hanya ada di 14 provinsi, sedangkan di 19 provinsi tidak dapat melakukan pemesanan melalui e-katalog sehingga pembelian dilakukan melalui lelang umum. Selanjutnya pada 6 provinsi tidak melakukan pembelian alokon yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan 1 provinsi gagal lelang yaitu Kepulauan Riau. Hal ini mempengaruhi ketersediaan alokon *implant* dan juga rendahnya realisasi anggaran.
3. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
4. Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
- a. Belum optimalnya sosialisasi 8 (delapan) fungsi keluarga, terutama pada masyarakat yang tidak bersekolah, masyarakat di daerah pedesaan, dan masyarakat dengan kuantil kekayaan terbawah
 - b. Sebanyak 30 persen kelompok kegiatan tidak aktif sehingga materi 8 (delapan) fungsi keluarga pada buku pegangan kader BKR tidak tersampaikan.
 - c. Sebagian besar masyarakat belum pernah mendengar tentang fungsi keluarga, tetapi hampir semua responden telah menerapkan fungsi tersebut
 - d. Kurangnya sosialisasi 8 (delapan) fungsi keluarga sehingga Kemungkinan besar istilah fungsi keluarga tidak dikenal masyarakat
 - e. Penerapan 1-2 fungsi keluarga sudah dianggap memahami (>90 persen)
5. Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana
- a. Belum optimalnya layanan informasi terkait perubahan gaji kepada pegawai BKKBN
 - b. Belum optimalnya pengelolaan Manajemen SDM dalam pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana
 - c. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana perkantoran
 - d. Belum optimalnya penerapan SOP tentang pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana
6. Tingkat kepuasan pengguna (*user*) terhadap Hasil Penelitian KB dan KS tercapai 96,6 persen
- Ketidakberhasilan dalam upaya pencapaian target disebabkan karena:
- a. Data yang disediakan oleh Puslitbang KB dan KS tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan pengguna (*user*) khususnya di tingkat kabupaten dan kota

- b. diseminasi hasil penelitian Puslitbang KB dan KS belum bisa menjangkau seluruh stakeholder
- c. keterbatasan dari variabel yang dikumpulkan sehingga tidak bisa memenuhi harapan stakeholder

Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja program KKBPK Tahun 2019

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja program KKBPK di Tahun 2019, maka BKKBN akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- (1) untuk pemenuhan kebutuhan alokon, BKKBN akan mengupayakan pengadaan melalui katalog sektoral
- (2) meningkatkan koordinasi dengan kementerian kesehatan, BPOM, dan LKPP dalam penyediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB
- (3) melakukan perbaikan strategi penganggaran program KKBPK, sesuai dengan kewenangan
- (4) menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat waktu
- (5) melaksanakan fasilitasi dalam rangka penyerasian dan sinkronisasi kebijakan daerah provinsi, kabupaten/kota dengan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat.
- (6) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kinerja BKKBN
- (7) meningkatkan kualitas penggarapan program KKBPK di lini lapangan
- (8) meningkatkan kompetensi SDM pengelola program KKBPK, serta
- (9) menyusun standar kompetensi jabatan dengan berdasarkan sistem merit.

Penutup

Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BKKBN kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019. Tahun 2018 merupakan tahun keempat periode Renstra tersebut yang pengukurannya dijabarkan dalam 5 (lima) Sasaran Strategis, 25 (duapuluh lima) Indikator Sasaran Program dan 11 (sebelas) Program Prioritas Nasional (Pro PN). Berdasarkan hasil monitoring atas pencapaian kinerja Tahun 2018, masih terdapat 7 (tujuh) Indikator Sasaran Program yang belum memenuhi target kinerja, sedangkan 18 (delapan belas) Indikator Sasaran Program telah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, pencapaian skor kinerja BKKBN pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 64,19 yang berarti lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 63,37. Skor tersebut diharapkan dapat meningkat jika semua Satker Perwakilan BKKBN Provinsi telah melaporkan realisasi anggaran melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (Smart DJA). Realisasi kinerja tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan anggaran sebesar Rp.4.298.681.741.504,- (77,12 persen) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.574.162.165.000,-.

Ketidaktercapaian atas target kinerja tersebut diatas, mengharuskan BKKBN untuk mengambil langkah-langkah perbaikan antara lain, mengupayakan pengadaan melalui katalog sektoral untuk pemenuhan kebutuhan alokon, meningkatkan koordinasi dengan kementerian kesehatan, BPOM, dan LKPP dalam penyediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB, melakukan perbaikan strategi penganggaran program KKBPK sesuai dengan kewenangan, penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat waktu dan mudah dipahami, melaksanakan fasilitasi dalam rangka penyerasian dan sinkronisasi kebijakan daerah provinsi, kabupaten/kota dengan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kinerja BKKBN, meningkatkan kualitas penggarapan program KKBPK di lini lapangan, meningkatkan kompetensi SDM pengelola program KKBPK, sertamenyusun standar kompetensi jabatan dengan berdasarkan sistem merit.

Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2018 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BKKBN secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BKKBN, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas



BIRO PERENCANAAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650, PO. BOX. 296 JKT 13013

Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85, Fax. : (021) 8008554

Website : <http://www.bkkbn.go.id>